



PERSEPSI HAKIM DALAM MENGHADAPI TUNTUTAN REFORMASI HUKUM PIDANA

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD SAINAL, SH.

NIM : B4A.098.064

Pembimbing

Prof.Dr.I.S.SUSANTO, SH.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

PERSEPSI HAKIM DALAM MENGHADAPI TUNTUTAN REFORMASI HUKUM PIDANA

UPT-PUSTAK-UNDIP	
Nb. Daft:	2131/T/MIH/c/
Tgl.	29/1/04

Disusun Oleh :


MUHAMMAD SAINAL, SH.

NIM : B4A.098.064

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal :

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. I. S. Susanto, SH.



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan strata dua ilmu hukum. Setelah sempat dirasuki kejenuhan dan penurunan semangat, akhirnya Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas tersebut, sehingga terwujudlah satu tesis dengan judul : *"persepsi hakim dalam menghadapi tuntutan reformasi hukum pidana"*.

Tidak berkelebihan kiranya kami mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang memberikan kesempatan kepada kami untuk turut menimba ilmu di lembaga yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing kami hingga selesainya tesis ini. Kami rasakan benar besarnya kesabaran beliau selaku pembimbing dengan tekun dan bijaksana dalam memberikan arahan dan bimbingan bagi kelancaran penulisan tesis ini.

3. Bapak **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.** yang telah menyadarkan dan menjelaskan kerangka berpikir penulis melalui paradigma baru ilmu hukum. Disamping itu melalui kepribadian dan kedisiplinan yang kuat terutama ketika memberikan kuliah (di kelas) telah membuka mata bahwa kemauan dan kerja keras bisa membuat harapan bagaimanapun sulitnya bisa terwujud.
4. Bapak **Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Tegal, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran,** yang memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan mengadakan riset sehingga dapat menyelesaikan tugas kami tersebut.
5. Bapak **Drs. Soebroto** yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada kami sehingga dapat memudahkan kami dalam menyelesaikan studi kami.
6. Istri tercinta **Nurul Khamidah, SH.** beserta anak kami tersayang **Mahadina Virginia sanita** dan **Mahadina Risa Assyifa** yang selalu setia mendampingi kami dalam keadaan suka dan duka selalu memberi perhatian kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Semua keluarga dan handai taulan dan sahabat-sahabat yang telah banyak membantu kami menyelesaikan tugas-tugas kami.

Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada mertua kami Bapak H. Sodikin Wasnadi dan Ibu Hj. Lina dimana beliau tidak henti-hentinya menanyakan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis kami ini, terakhir kepada Ayahanda Mappeare Saguni dan ibunda Nurhayati Painringi, dimana beliau mendorong penulis untuk selalu menuntut ilmu dan mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran, do'a serta wejangan tanpa pamrih yang tidak akan bisa dibalas oleh penulis sampai akhir hayat, seluruh diserahkan kepada Allah SWT, semoga limpahan rahmat berlipat ganda, serta mengajarkan bagaimana berbagi kasih sayang dengan orang lain.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna dan kebenaran, baik dari segi bentuk maupun isinya. Semua itu tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami, namun harapan penulis semoga tesis ini ada guna dan manfaatnya.

Akhirnya atas seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat yang berlipat ganda, Amin.

Semarang, April 2003.
Penulis,

MUHAMMAD SAINAL

ABSTRACT

Reformation of law is not only a renewal towards Legal Substances, but also is a renewal toward the system of application and maintenance of law. The process of renewal which is done only to law, without renewing the law enforcing institution (Legal Structure) will be useless, or otherwise, will not run as smoothly as it is expected. However, in-concreto, it is the practice which will determine whether or not the aim of law renewal is accomplished, included the renewal of Legal Culture.

Judges, commonly, have opinion that the demand of Penal Law reformation is seen as a non-law factor that can be considered in making a decision. What is written within legal substance is not congruently applied in a case concretely. From the explanation above, can be gained a description that in making decisions, a judge must consider every aspects related to the case, included the social condition of society.

Factors which influence the formation of a judge's perception towards the demands of Penal Law reformation are: (1) the currently used Penal Law is a product of colonial era, which is sometimes not fit to present condition, (2) advanced technology is a new thing which is not clearly ruled in Penal Law, (3) rapidly growing society, sophisticated communication are not yet included in the currently prevailed Penal Law.

However, in making decision, this kind of perception is not fully implemented by judges. There are still many judges who are not yet responsive toward the conditional changes, and they act conservatively, where they tend not to improvise, because they are repressed by the thought to give priority to Positive Law rigidly. Only few judges who catch and give response for the demand of Penal Law reformation by implementing the way of thinking which combine both ideas for the system and decision based on social problems.

That is why, for the success of Penal Law maintenance, as it is hoped to be achieved, it requires similar perception among judges (and also other law upholders) by showing the same sidedness from juridical justice to sociological justice and moral justice. Also included the similar perception from society, which meant, for the uprightness of law supremacy, all kinds of self-judging must be stopped.

RINGKASAN

Reformasi hukum tidak sekedar pembaharuan terhadap aturan hukumnya (*legal substance*) saja, pembaharuan mesti juga mengenai sistem penerapan atau penegakannya. Semata-mata melakukan pembaharuan hukum tanpa pembaharuan pada lembaga penyelenggara hukum (*legal structure*) akan sia-sia atau sekurang-kurangnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimanapun *in-concreto*, pelaksanaanlah yang akan menentukan tercapai atau tidak suatu tujuan pembaharuan hukum, termasuk di dalamnya pembaharuan budaya hukum (*legal culture*).

Hakim dalam memutus perkara sebagian berpendirian bahwa tuntutan reformasi hukum pidana dipandang sebagai suatu faktor non hukum yang dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Apa yang tertulis dalam peraturan hukum tidak secara konkuren diterapkan dalam kasus secara konkret. Dalam banyak hal penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan perkara termasuk di dalamnya kondisi sosial masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi hakim terhadap tuntutan reformasi hukum pidana, yaitu: (1) bahwa hukum pidana yang digunakan sekarang ini adalah produk kolonial, karena itu ada kalanya tidak sesuai dengan keadaan jaman sekarang ini; (2) bahwa dengan kemajuan teknologi merupakan hal-hal baru yang belum diatur secara jelas di dalam hukum pidana; (3) bahwa dengan kemajuan masyarakat yang begitu cepat, komunikasi yang begitu canggih belum semuanya tertampung oleh hukum pidana yang berlaku sekarang ini.

Namun dalam putusannya, persepsi yang demikian tidak diimplementasikan oleh semua hakim. Masih banyak hakim yang belum responsif terhadap perubahan keadaan dan bersifat konservatif dimana cenderung tidak berimprovisasi karena terlalu dicekam oleh pemikiran yang mengutamakan hukum positif secara kaku, dan hanya sedikit hakim yang menangkap dan merespon tuntutan reformasi hukum pidana dengan menerapkan pola pemikiran yang menggabungkan antara pola pikir pada sistem dan keputusan yang didasarkan pada masalah-masalah atau problem sosial.

Oleh karena itu untuk keberhasilan penegakan hukum pidana sebagaimana dicita-citakan dapat dicapai, maka diperlukan persepsi yang sama di antara hakim (juga aparat penegak hukum lainnya) dengan menunjukkan keberpihakan dari keadilan yuridis menuju keadilan sosiologis dan keadilan moral. Termasuk juga perlunya persepsi yang sama dari masyarakat, artinya demi tegaknya supremasi hukum segala bentuk main hakim sendiri harus dihentikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Kerangka Teoritis	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
E. Kontribusi Penelitian	21
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Persepsi Hakim Dalam Menghadapi Tuntutan Reformasi Hukum Pidana	32
1. Pengertian Persepsi	32
2. Pengertian Reformasi Hukum Pidana	36
3. Hakim dan Putusan Hakim	45
B. Penegakan Hukum dan Birokrasi Peradilan Terhadap Bekerjanya Hukum Pidana	50
1. Pengertian Penegakan Hukum	50
2. Birokrasi Peradilan terhadap Bekerjanya Hukum Pidana	53

C. Peran dan Tanggung Jawab Hakim Terhadap Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara	57
1. Tugas dan Peranan Hakim	57
2. Tanggung Jawab Hakim	74
3. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	87
A. Tuntutan Reformasi Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana	87
1. Fungsi Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan	89
2. Aktualisasi Fungsi Hakim Terhadap Penegakan Hukum Pidana	104
B. Persepsi dan Sikap Hakim Terhadap Tuntutan Reformamsi Hukum Pidana	124
C. Implementasi Tuntutan Reformasi Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim	149
1. Putusan Hakim Dalam Masa Reformasi Hukum Pidana	149
2. Kinerja Hakim Sehubungan Dengan Tuntutan Reformasi Hukum Pidana	174
BAB IV PENUTUP	186
A. Kesimplan	186
B. Saran	188

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan turunnya Soeharto sebagai Presiden terlama dan paling lama berkuasa di Republik ini. Bersamaan dengan itu pula muncul tuntutan reformasi total di segala aspek kehidupan termasuk adanya tuntutan reformasi hukum. Hal ini bisa dipahami mengingat bukan hanya karena negara kita adalah negara hukum, akan tetapi di dalam kenyataan bahwa hukum selalu ada dan dibutuhkan dalam lingkungan pergaulan hidup manusia, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan adil.

Dalam pergaulan kehidupan yang nyata selama rezim Orde Baru, hukum dijadikan alat legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, KKN, ketidakadilan, pelanggaran HAM dan segala bentuk "penyiksaan" sosial lainnya. Dengan kata lain hukum telah terkooptasi oleh kekuasaan, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi utamanya untuk melindungi, memberikan keadilan, mensejahterakan rakyat banyak sebagaimana tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD.¹⁾

1) IS. Susanto, Mencari Format Penegakan Hukum di Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Diskusi Interaktif Mencari Format Upaya Penegakan Hukum di Masyarakat oleh LIKH Jateng, Semarang 29 Maret 200, hal.1.

Pelaksanaan hukum yang sesuai dengan fungsinya ternyata masih jauh dari harapan, tidak sesuai dengan yang diamanatkan, tuntutan reformasi hukum hanyalah ditanggapi dengan janji-janji yang berupa setumpuk undang-undang dan janji-janji akan menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Kondisi semacam ini telah mengakibatkan kehancuran di segala aspek kehidupan dan berakibat kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, tentunya menjadikan kita semua prihatin dan harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk memperbaiki citra penegakan hukum di negara kita ini. Tidak hanya dengan membuat undang-undang atau peraturannya saja yang baik, akan tetapi harus dibarengi dengan keinginan dan niat yang baik dari para penegak hukum untuk memperbaiki citra penegakan hukum di masyarakat.

Salah satu pelaksana penegakan hukum dan mempunyai peranan strategis untuk memperbaiki citra hukum dalam era reformasi ini adalah hakim. Karena melalui putusan-putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki citra hukum yang sudah terpuruk ini.

Oleh sebab itu dapat dimaklumi bahwa keperluan akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat diperlukan bagi terselenggaranya negara hukum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disini figur hakim sangat menentukan, melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka hakim diberikan kekuasaan yang merdeka sehingga putusan-putusannya tidak mudah diintervensi, baik oleh kekuatan internal maupun eksternal. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam kaitan ini adalah mencakup baik terhadap putusan-putusan atau proses pemutusan perkara oleh para hakim (*kemandirian individual*) maupun badan peradilan itu sendiri (*kemandirian insitusional*).

Menurut **P. Effendi Lotulung**, pengertian kemandirian dan independensi peradilan harus senantiasa dibaca dalam satu nafas dengan ketidak-berpihakan suatu lembaga peradilan, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan "bias" maupun sifat pra-mengadili dari hakim (*the actual absence of bias and prajudgement*).²⁾ Selanjutnya **P. Effendi Lotulung** mengatakan : Asas bahwa peradilan

2) Paulus Effendi Lotulung, "Kemandirian dan Independensi Peradilan", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Reformasi Sistem Peradilan, Semarang 6 Maret 1999, hal.2.

tidak boleh berpihak (*impartial*) itu merupakan salah satu asas yang paling utama di dalam pengertian "asas-asas peradilan yang baik". Bahkan tidaklah cukup adanya persepsi bahwa keadilan *impartial* itu harus diberikan oleh badan-badan peradilan, tetapi haruslah secara nyata dapat dilihat bahwa keadilan *impartial* itu sudah diharapkan dan dilakukan (*impartial justice must not only be done, but manifestly be soon to have been some*).³⁾

Akan tetapi pada akhir-akhir ini semakin banyak suara-suara yang dilontarkan berupa kritik yang ditujukan kepada badan peradilan (*dan para hakimnya*), yang dianggap lamban dan membuang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum atau dianggap terlalu formalistik dan terlampaui teknis,⁴⁾ dan bahkan putusan-putusannya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Fenomena tersebut tergambar dalam sebuah ungkapan yang sangat menyinggung keberadaan pengadilan saat ini, yaitu : "kalau dahulu kita mengalami kesulitan mendapatkan gedung-gedung pengadilan namun untuk mencari keadilan sangatlah mudah kita dapatkan, sebaliknya untuk kondisi saat ini begitu banyak gedung-gedung pengadilan kita temukan namun begitu sulitnya keadilan kita dapatkan".

3) Ibid, hal.3.

4) M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.1-2.

Didalam sudut pandang masyarakat seperti ini mungkin ada kebenarannya karena ungkapan seperti ini lahir dari masyarakat berdasarkan interaksinya dengan dunia pengadilan saat ini, baik itu interaksi secara langsung ataupun tidak langsung.

Berkaitan dengan itu, I.S. Susanto⁵⁾ mengatakan bahwa : Dominasi dan campur tangan pemerintah terhadap bekerjanya birokrasi penegak hukum dapat kita lihat melalui berbagai kasus meski seringkali dibantah oleh penguasa. Meski dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Berbagai kasus yang ditangani oleh pengadilan baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas (Mahkamah Agung) apabila menyangkut kepentingan penguasa tidak pernah lepas dari campur tangan pemerintah. Beberapa kasus yang terjadi seperti kasus Marsinah, tanah Kareth Ohee, peristiwa 27 Juli 1996, Kedung Ombo, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pakpahan, Majalah Tempo diindikasikan terjadinya campur tangan oleh penguasa.

5) I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan, Disajikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 12 Oktober 1999, hal. 14-15.

Lebih lanjut I.S. Susanto⁶⁾ mengatakan : Meskipun lembaga peradilan (baca : Pengadilan) merupakan lembaga yang merdeka yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, namun dalam kenyataannya mereka mudah tunduk pada tekanan-tekanan yang berasal dari kekuatan lain.

Pada hakekatnya pandangan-pandangan masyarakat dan kaum ilmuwan seperti yang telah dikemukakan didepan, bukanlah pernyataan yang tanpa didasari oleh kenyataan-kenyataan. Sebab hal tersebut telah disadari dan diakui sendiri oleh para aparat yang berada di dalam lembaga peradilan. Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I. Poerwoto Gandasubrata, SH. mengemukakan :

“bahwa dari pengamatan dan pengalaman kita sendiri maka dengan hati yang sedih harus kita akui, bahwa wibawa dan citra pengadilan pada saat ini masih cukup memperhatikan sedangkan seharusnya dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, hukum dan pengadilan/kekuasaan kehakiman harus berwibawa dan dihormati. Dengan menyadari akan segala kekurangan yang ada pada jajaran kita, maka sudah saatnya kita berkumpul untuk menyusun kesepakatan bersama dan kebulatan tekad bersama untuk mengatasi segala kemelut dan kendala yang ada di sekelilingnya dan dihadapan kita, sehingga seluruh jajaran kekuasaan kehakiman yang kita cintai ini akan selamat, kekal, sentosa, memasuki era tinggal landas sebagai salah

6) I.S. Susanto, Menciptakan Lingkungan Hidup yang Nyaman, Pidato Dies Natalis UNDIP ke-40, Semarang 15 Oktober 1997, hal 4 -5.

satu soko guru Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".⁷⁾

Tetapi dalam realitasnya, hukum dan keadilan hanya berlaku bagi warga masyarakat yang kuat dalam arti ekonomi dan politik, dan bagi penguasa.⁸⁾ Dalam kondisi yang demikian telah mengakibatkan berbagai permasalahan sosial, termasuk tuntutan reformasi hukum yang harus dipecahkan dengan berbagai institusi sosial yang ada termasuk di dalamnya institusi hukum. Ia ditantang untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, serta melakukan perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dilakukan. Keadaan yang demikian itu sesungguhnya telah menggeser fungsi hukum untuk menjadi lebih baik.⁹⁾

Penggunaan secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu dapat tidaknya hukum bekerja untuk mencapai tujuan tersebut akan terkait dengan basis sosial di mana hukum itu bekerja. Disinilah terlihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan

-
- 7) Poerwoto Gandasubrata, SH; Pidato pada Mukernas Ikahi, Bandung 18-20 April 1994, dalam Bismar Siregar, Hakim-Akukah Hakim yang Didambakan Mampu Menegakkan Keadilan, Jakarta, 1994, hal.3.
 - 8) Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, edisi II Juli - September 1998, hal.1.
 - 9) Esni Warassih, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum", Hukum dalam Perspektif Sosial, Ed.Setjipto Rahardjo (Bandung, 1981), hal.124.

serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum.¹⁰⁾.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejalan dengan perkembangan hukum dan masyarakat dengan adanya prinsip-prinsip tentang demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia, maka hakim sebagai *key figure* pengadilan menjadi salah satu tumpuan untuk mendukung adanya perubahan (*reformasi*) di bidang hukum.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat di satu pihak, dan kehadiran serta keberadaan peradilan (*dan para hakimnya*) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap diperlukan dan dibutuhkan dilain pihak, menggugah niat dan semangat penulis untuk mengadakan penelitian ini. Dalam rangka itu maka judul penelitian ini dirumuskan "Persepsi Hakim Dalam Menghadapi Tuntutan Reformasi Hukum Pidana".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian (tesis) ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

10) Ibid.

1. Apakah tuntutan reformasi hukum pidana dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pandangan (persepsi) dan sikap hakim sehubungan dengan adanya tuntutan reformasi hukum pidana ?
3. Bagaimanakah putusan-putusan yang diambil hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana sehubungan dengan tuntutan reformasi hukum pidana ?

c. Kerangka Teoritis

Pembahasan tentang persepsi hakim dalam menghadapi tuntutan reformasi hukum pidana dirasa penting dan sangat menarik untuk dikaji, mengingat penegakan hukum pidana secara *Integrated Criminal Justice System* meletakkan hakim sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan.¹¹⁾

Era reformasi mengharuskan hakim untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman serta keinginan yang dipersepsikan hakim terhadap perubahan sosial yang berakibat terhadap perubahan hukum, menuntut hakim untuk mereformasi hukum melalui putusan-putusannya yang dapat mencerminkan nilai-

11) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.21.

nilai keadilan seperti apa yang diinginkan oleh reformasi hukum.

Menurut A. Muis, Era reformasi harus diberi makna: Reaktualisasi hakekat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan individu, keterbukaan, demokrasi, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (HAM) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (*civil society*).¹²⁾

Karena itu, reformasi pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan dalam masyarakat atau sesungguhnya merupakan gerakan kultural untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai dasar demokrasi. Dengan demikian reformasi pada dasarnya adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap suatu sistem, proses maupun tingkah laku kearah yang lebih baik. Pemahaman tersebut mengingatkan, bahwa era reformasi seperti sekarang ini merupakan momentum untuk merenungkan kembali paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum. Ada keyakinan bahwa paradigma kekuasaan yang banyak dipakai di negara-negara totaliter, kerap kali

12) A. Muis, "Fenomena Baru Usia 53 Tahun Proklamasi Kemerdekaan" artikel dalam Kompas, 19 Agustus 1998, hal.4.

tidak cukup ampuh dalam menjaga tata tertib masyarakat. Sebaliknya, paradigma moral dan intelektual (profesional) untuk mencapai kebenaran dirasakan sangat efektif sebagai titik tolak penegakan hukum, dimana hukum diperjuangkan sesuai dengan fungsinya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Reformasi penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menunjukkan diri bahwa telah terjadi perubahan dalam lembaga penegakan hukum kita, yang merubah diri dari keberpihakan kepada keadilan yuridis menuju keadilan sosiologis dan keadilan moral. Yakni berani menunjukkan sikap bahwa hakim lebih mengutamakan rasa keadilan masyarakat, tidak saja menggunakan undang-undang untuk mencoba berdalih/berkelit dari tanggung jawab moralnya dalam memutus perkara, dimana ia mengalami tekanan-tekanan psikologis, politis, financial dan lain-lain.

Reformasi hukum tidak sekedar pembaharuan terhadap aturan hukumnya (*legal substance*) saja, pembaharuan musti juga mengenai sistem penerapan atau penegakannya. Semata-mata melakukan pembaharuan hukum tanpa pembaharuan pada lembaga penyelenggara hukum akan sia-sia atau sekurang-kurangnya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimanapun *in-concreto*, pelaksanaanlah yang akan

menentukan tercapai atau tidak suatu tujuan pembaharuan hukum.¹³⁾

Diketahui bahwa hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimanapun juga, karena hukum menawarkan perlindungan terhadap tirani disatu pihak dan terhadap anarki dilain pihak, hukum merupakan salah satu alat masyarakat yang utama guna melestarikan baik kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbitair oleh perorangan, golongan atau oleh pemerintah.¹⁴⁾ Senada dengan pendapat tersebut **Sudarto** mengatakan bahwa hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun dibolehkan dan sebaliknya.¹⁵⁾

Sebagai sebuah negara hukum (*rechshstaat*) prinsip *the rule of law* harus ditegakkan dalam negara Republik Indonesia. Bagi kita prinsip *the rule of law* itu tidak lain dari pada *the rule of justice*,¹⁶⁾ penegakan hukum yang berintikan keadilan. Prinsip demikian perlu ditegaskan karena diskriminasi penerapan hukum dalam realitasnya terlampau mencolok. Produk hukum dan

13) Bagir Manan, "Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum", Makalah disampaikan pada Pelatihan Teknis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta 4 Juni 2001, hal.3.

14) Horald J Berman, Ceramah-Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat, PT.Tata Nusa, 1996, hal.3.

15) Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal.111.

16) Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu ?, Penerbit Alumni, Bandung, 1976, hal.109.

penegakannya lebih berpihak kepada *the ruling class*, kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan ekonomi atau kekuasaan politik. Hak-hak masyarakat pencari keadilan yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok *powerlessness* selalu dikesampingkan, *substantive* atau *sociological justice* selalu dinikmati oleh mereka yang *powerfull* sedang *powerless* hanya mendapat *formal justice*. Keadaan demikian dalam negara yang baru merdeka masih dapat dipahami karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia.¹⁷⁾ Akan tetapi bagi kita tentu merupakan sebuah ironi. Negara hukum dengan segala perangkatnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi warganya sehingga sangat mendesak sekarang adalah "membawa keadilan kepada rakyat" (*to bring justice to the people*)¹⁸⁾, dengan menyelesaikan secara baik persoalan-persoalan yang oleh rakyat dianggap harus diselesaikan secara hukum.

Membicarakan masalah kebijakan penegakan hukum pada hakekatnya berbicara mengenai bagaimana mewujudkan ide-

17) Philippe Nonet dan Philip Seltznick, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*. Menurut mereka : the underlying phenomenon is a poverty of political resources. In general, a repressif potential is generated when urgent task must be met under condition of edequate power but scarce resources.,hal.36.

18) Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum*, Makalah Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", Semarang 22 Juli 2000, hal.25.

19) Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun, hal.15.

ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak, yaitu ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹⁹⁾, atau dengan kata lain bagaimana menegakkan ide-ide dan konsep tentang hukum yang masih bersifat abstrak menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat, yang oleh **Satjipto Rahardjo** dikatakan sudah memasuki bidang manajemen.²⁰⁾

Menurut **Barda Nawawi Arief** yang mendasarkan pendapatnya pada argumentasi M. Cherif Bassiouni, ada tiga tahap dalam proses penegakan hukum, yaitu : pertama, tahap kebijakan legislatif/formulatif, yang merupakan tahap dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Tahap ini dilakukan oleh pembuat undang-undang; kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, dalam menerapkan hukum (pidana) oleh badan-badan peradilan; ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administratif, dalam melaksanakan hukum (pidana) oleh aparat pelaksana pidana.²¹⁾ Pada penulisan ini dititik beratkan pembahasannya pada tahap kedua, yaitu tahap aplikatif, meskipun pembicaraan

20) Ibid.

21) **Barda Nawawi Arief**, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.31.

mengenai tahap ini tidak dapat lepas sama sekali dari dua tahap lainnya.

Dengan demikian, persoalan mendasar dalam penerapan kebijakan penegakan hukum pidana ialah sejauh mana kinerja aparat penegak hukum (*antara lain : hakim*) dapat mewujudkan ide mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat.

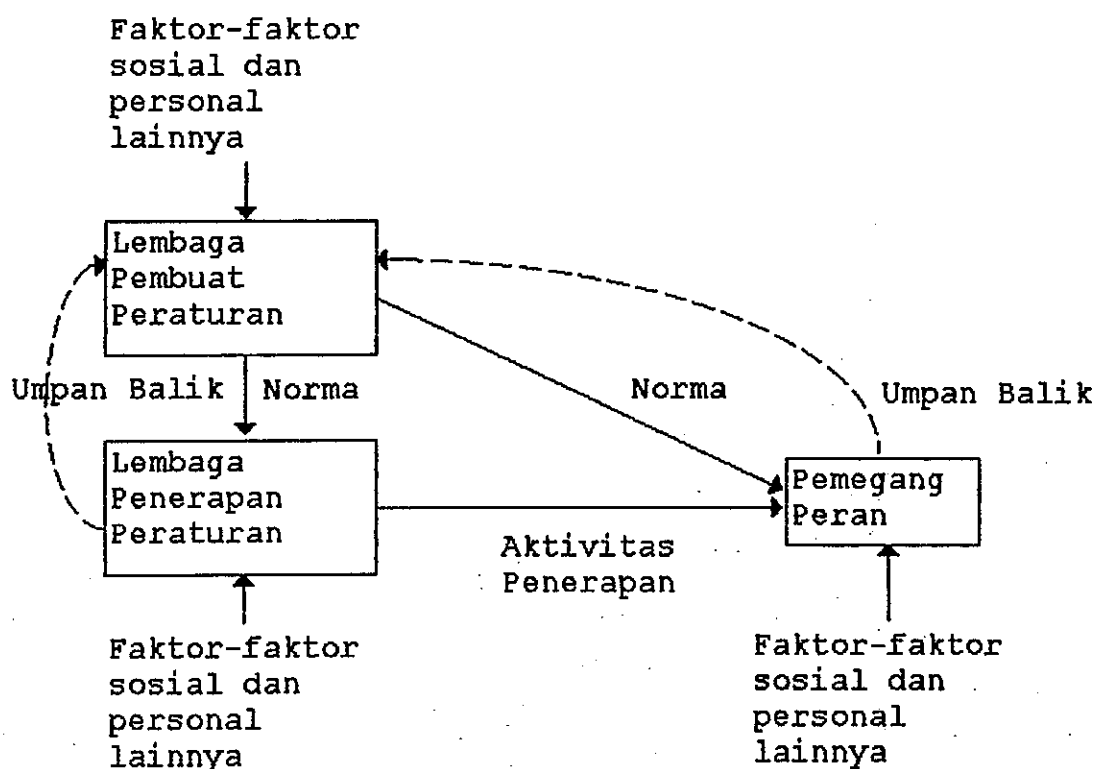
Jika menengok tujuan sistem peradilan pidana, dapat dirumuskan sebagai : (a) mencegah masyarakat menjadi korban; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya²²⁾, ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dilakukan namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan masyarakat.

Diakui bahwa sudah banyak kasus yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan menghasilkan begitu banyak putusan, tetapi dari sekian

22) Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal.84-85.

banyak putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Mengenai penegakan hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat, **Chambliss** dan **Robert B Seidman** secara teoritis memberikan penjelasan yang dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut²³⁾ :



(Diagram Chambliss dan Seidman mengenai Proses Penegakan Hukum)

Pendapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana antara lain dikemukakan oleh **I.S. Susanto** dikatakan : bahwa

23) Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Penerbit Alurnni, Bandung, 1980, hal.27.

paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undang, maka penegakan hukum secara konkret melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, didalam suatu hubungan yang bersifat interaksi, yakni hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.²⁴⁾

Berbicara masalah penegakan hukum, tidak dapat terlepas dari pengkajian terhadap organisasi penegak hukum itu sendiri, karena apabila kita membicarakan hukum dalam konteks organisasi, akan membuka pintu pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti memperlmasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta juga membicarakan kultur suatu organisasi.²⁵⁾

Membicarakan organisasi, maka satu hal yang pokok adalah bagaimana organisasi itu akan "dibuat berjalan". Proses ini tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Menurut **Shrode** dan **Voich** manajemen diartikan sebagai

24) I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial (dalam Majalah "Masalah-Masalah Hukum" No.9), 1992, hal. 17.

25) Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 15-17.

26) Ibid, hal. 16.

seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.²⁶⁾

Dalam kaitannya dengan perkara pidana, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindakya Polisi, Kejaksaan, dan akhirnya Hakim di Pengadilan.²⁷⁾ Dalam sistem peradilan pidana menurut ketentuan hukum merupakan suatu sistem hukum yang sinkron, yang mengandung makna keselarasan dan keserempakan.²⁸⁾ Sinkronisasi dalam hal ini, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat substansial (*substansial synchronization*) dapat pula bersifat struktural (*structural synchronization*) dan kultural (*cultural synchronization*). Pemahaman terhadap ketiga kerangka sinkronisasi di atas sangat penting, mengingat apa yang dinamakan sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan *open system*, mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya.

27) Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.24.

28) Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit UNDIP Semarang, 1996, hal.1.

Hakim mempunyai wewenang dalam penegakan hukum pidana dengan menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Kewenangan hakim sebagaimana dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 :

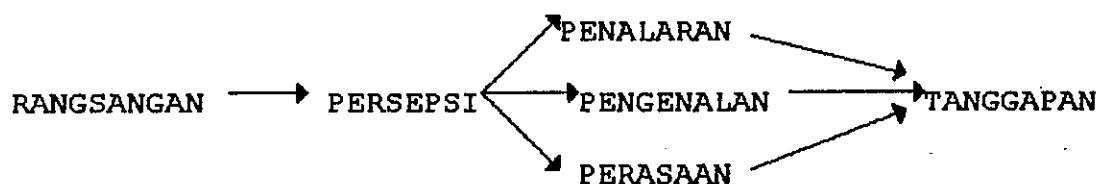
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 :

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Persoalan ini adalah bagaimanakah persepsi hakim dalam kewenangannya tersebut terhadap arti pentingnya nilai kebenaran dan keadilan.

Mengenai proses terbentuknya persepsi dapat diterangkan melalui salah satu teori psikologi yang dikenal sebagai teori Rangsangan - Tanggapan (atau "Stimulus - Respon"), yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Persepsi ("perception") dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan. Kognisi ("cognition") atau pengenalan adalah cara manusia memberikan arti kepada rangsangan. Penalaran ("reason") adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan ("feeling") adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.²⁹⁾

Studi tentang persepsi mempunyai arti yang penting untuk memahami attitude/sikap terhadap objek tertentu. Berkenaan dengan itu **Jack Plano** memberikan gambaran bagaimana seseorang dapat mempersepsikan suatu objek tertentu sebagai berikut :

"Persepsi terjadi sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan objek tertentu yang kemudian dapat menimbulkan penafsiran indrawi tadi. Persepsi bukanlah suatu yang sama sekali tersurat karena sambutan dan penilaian berbagai isyarat indra dapat terjadi diambang sadar".³⁰⁾

29) Bernard Hennessy, Pendapat Umum, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 117-118.

30) Jack Plano, Kamus Analisa Politik, Penerbit CV.Rajawali, Jakarta, hal.148.

Dalam konteks penelitian ini, persepsi dimaksud adalah persepsi sosial yang merupakan suatu proses dalam hal ini Hakim dalam memberikan interpretasinya terhadap tuntutan reformasi hukum pidana dan penegakannya.

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari uraian tersebut di atas dan permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Menjelaskan bahwa tuntutan reformasi hukum pidana dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana;
2. Mendeskripsikan pandangan (persepsi) dan sikap hakim sehubungan adanya tuntutan reformasi hukum pidana dikaitkan dengan proses memeriksa dan memutus perkara pidana;
3. Mendeskripsikan putusan-putusan yang diambil hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sehubungan dengan tuntutan reformasi hukum pidana

E. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan bagi hukum pidana terutama dalam penerapan hukum pidana yang dikaitkan dengan tuntutan reformasi hukum pidana.

2. Secara Praktis :

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam kerangka pembenahan lembaga peradilan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial, dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara pidana di tengah tuntutan reformasi hukum pidana. Bila dilihat dari tipe kajian, maka penelitian ini tergolong dalam kategori *social legal research*³¹⁾, yang mengkaji "*Law as it is in human action*". Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna

31) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.35.

simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Adapun metode peneliatian yang dipakai adalah Sosial/Non-Doktrinal dengan pendekatan interaksional/mikro, dengan analisis-analisis yang kualitatif.³²⁾

Penelitian ini juga mencari kejelasan mengenai apa yang diputuskan oleh hakim *in-concreto* mengenai perkara pidana yang diputus ditengah tuntutan reformasi hukum pidana. Sehingga bila dilihat dalam tipe kajiannya, penelitian ini juga tergolong dalam *American Sociological Jurispridence* yang mengkaji *Law as it is decided by judges throught judicial processes*. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan pula sebagai apa yang diputuskan oleh hakim *in-concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Adapun metode penelitian yang turut melengkapi adalah doktrinal dan *non-doktrinal* untuk mengkaji *court behaviour*.³³⁾

2. Lokasi Penelitian dan Informan

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah.

32) Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptual" (Makalah disampaikan dalam Seminar Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum di Bandung, 5-8 Desember, 1994) hal.4.

33) Ibid.

Pengadilan Negeri di Wilayah penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas I dan Kelas II yang sarat dengan kasus-kasus pidana.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*³⁴⁾, yaitu mereka yang terlibat secara langsung. Peneliti memandang perlu menentukan sampel sebagai informan awal dalam penelitian ini terdiri dari satu orang hakim Pengadilan Negeri Semarang, dan satu orang hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran yang dapat membuka jalan menuju informasi berikutnya secara lebih mendalam. Hal demikian sesuai dengan observasi partisipasi sekaligus menempatkan peneliti sebagai elemen utama dan terlibat langsung dengan informan.

Pengambilan sampel berikutnya berlangsung mengikuti "bola salju" (*snow ball*) dan pilihan sampel berakhir setelah terdapat indikasi "tak munculnya" variasi atau informasi baru yang terkait dengan penelitian ini.³⁵⁾

34) Mengenai teknik penarikan sample ini lihat Maria S.W Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar, Gramedia, Jakarta, 1996, hal.31-32. lihat pula Sanafiah Faisal, hal.56-57. Pemilihan informan atau situasi sosial tertentu, dan scandainya perlu dilakukan purposif (bukan secara acak), yaitu atas dasar apa yang kita ketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada.

35) Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3 Malang, 1990, hal.158-159. lihat pula Lexzy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, 1998, hal.165.

3. Jenis dan Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang menfokuskan pada perilaku manusia, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data primer yang bersumber atau diperoleh dari penelitian di lapangan;
- b. Data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka maupun dokumen-dokumen yang diperoleh pada waktu awal maupun pada saat penelitian lapangan.

Untuk selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap data tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, yang dimulai dengan pengamatan terlibat (*participation observation*) melalui catatan lapangan dan penggunaan dokumen.³⁶⁾ Ditambah wawancara mendalam secara informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data lebih banyak diperoleh dalam konteks yang demikian responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direkayasa dan ditutup-

36) Strategi pengumpulan data dalam riset kualitatif dapat dikelompokkan dalam dua cara pokok yaitu metode interaktif dan non interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berperan, sedangkan metode non interaktif meliputi observasi tak berperan dan "content analisis" dokumen dan arsip. Heribertus Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dan Praktis, Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1998, hal.23. Senada dengan itu Sanafiah Faisal mengemukakan, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, serta pengumpulan data dengan menggunakan sumber non manusia. lihat Sanafiah Faisal, Ibid, hal.61-81.

tutupi. Namun dalam hal tertentu peneliti dapat menanyakan pandangan responden tentang banyak hal yang sangat bermanfaat sebagai dasar penelitian.

Melalui observasi data atau sumber non verbal (misalnya ekspresi informan, penampilan fisik, gerak-gerik, kondisi ruangan dan sebagainya), untuk menemukan elemen-elemen situasi sosial yaitu pertama, lokasi/fisik tempat suatu situasi sosial itu berlangsung; kedua, manusia-manusia pelaku atau aktor yang menduduki status/posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu; dan ketiga, kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi/tempat berlangsungnya situasi sosial. Ketiga elemen sosial itu selanjutnya dapat dikembangkan lebih jauh lagi.

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini strategi/pendekatannya adalah induksi-konseptualisasi³⁷⁾ yaitu penelitian bertolak dari fakta/data empiris untuk membangun konsep, hipotesis dan teori, selanjutnya berkembang ketingkat abstraksi yang lebih tinggi. Analisis data pada penelitian ini meliputi tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara simultan, yakni berupa : reduksi

37) Lihat Sarapiyah Faisal, Ibid, hal.90

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁸⁾

Tahap reduksi data, diartikan sebagai proses penyeleksian data. Proses ini sebenarnya telah dimulai bahkan sebelum penelitian dimulai, yaitu pada saat peneliti menentukan permasalahan dan konsepsi. Mulai pada saat itulah peneliti telah menetapkan jalur yang harus ditempuh dan diisi dalam penelitian. Semua data yang dicari didasarkan pada jalur-jalur yang telah ditetapkan tersebut. Tahap reduksi ini secara konkret mulai dijalankan pada saat peneliti melakukan penggalian data. Seperti telah disebut di muka, tahap penggalian data dilaksanakan dengan membuat suatu daftar pertanyaan sebagai acuan. Segala data yang diberikan oleh informan yang tidak relevan dengan daftar pertanyaan, dapat di kesampingkan. Demikian juga apabila melalui teknik pengecekan keabsahan, apabila terdapat data-data yang tidak relevan, maka ia di kesampingkan pula. Setelah tahapan ini dilakukan diharapkan hanya data-data yang relevan dengan pokok permasalahan sajalah yang tersisa, guna dianalisis lebih lanjut.

38) Matthew B.Miles & A.Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Penerbit Universitas Indoensia (UI-Press), Jakarta, 1992, hal.16-21.

Tahap penyajian data, setelah diperoleh data dan diseleksi maka tahap selanjutnya adalah penyajian. Tahap ini pada hakekatnya adalah kegiatan menyusun serangkaian data yang diperoleh di lapangan yang tadinya tidak beraturan menjadi terjalih rapi dan dapat dipahami. Data-data yang di peroleh di susun dengan mengacu pada kerangka teoritis yang tersusun sebelumnya. Penyajian yang paling sering digunakan pada analisis kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Kendati demikian dalam penelitian ini penyajian data dibantu pula dengan penyajian dalam bentuk matriks dan bagan yang membuat data tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami. Ada kalanya tahap penyajian dibarengi pula dengan dilaksanakannya reduksi data. Hal tersebut dapat terjadi misalnya pada saat penulis hendak menyajikan data, penulis melakukan reduksi data-data mana sajakah yang perlu untuk dimasukan dan mana saja yang tidak perlu.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi berarti kegiatan memeriksa dan menguji data yang diperoleh di lapangan dengan kerangka teori yang telah tersusun. Sejak dari permulaan pengumpulan data, peneliti sudah mulai membuat kesimpulan sementara dari data-data yang

diperoleh di lapangan dan pada saat itu juga penulis mencari arti data-data yang diperoleh, pola-pola penjelesan dan alur sebab akibat dengan mendasarkan diri pada kerangka teori. Kesimpulan sementara yang telah di susun boleh jadi akan merupakan masukan bagi peneliti untuk melakukan kegiatan pengumpulan data berikutnya. Setelah data-data yang diperoleh di lapangan dianggap cukup, barulah peneliti akan melakukan kegiatan penarikan kesimpulan dan verifikasi final dan akhirnya akan disajikan dalam bentuk yang final pula.

Demikian tiga hal utama dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagai suatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik pemeriksaan *triangulasi*³⁹⁾ dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Melalui teknik triangulasi, data yang diperoleh dari seorang informan di *cross-check* pada informan yang lain. Sebagai contoh data yang diperoleh dari seorang hakim

39) S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996, hal. 26.

akan dikonfirmasi kepada pertimbangan-pertimbangan hakim yang diambil dalam putusannya, sesuaikah ia, bila tidak sesuai akan dikonfirmasi ulang dan bila tidak sesuai, maka data tersebut dianggap tidak valid (tidak absah).

Sebagai teknik pelengkap pengecekan lain yang digunakan adalah pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk diskusi kelas maupun dalam seminar hasil penelitian. Peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan meminta tanggapan dari para sejawat. Bila terdapat kritik terhadap data yang diperoleh di lapangan, maka dilakukan pengecekan ulang di lapangan dengan melakukan konfirmasi ulang kepada para informan.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun ke dalam empat bab, meliputi bab pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan analisis, serta bab mengenai kesimpulan dan saran.

Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini dimaksudkan sebagai acuan dalam keseluruhan penulisan tesis ini. Bab

tinjauan pustaka yang merupakan perangkat analisis terhadap permasalahan dan hasil-hasil penelitian mengenai persepsi hakim dalam menghadapi tuntutan reformasi hukum pidana. Bab hasil penelitian dan analisis adalah temuan lapangan yang menghasilkan penjelesan mengenai pandangan dan perilaku hakim tentang reformasi hukum pidana. Bersamaan dengan itu dikaji pula bagaimana kinerja lembaga peradilan dalam menghadapi tuntutan reformasi hukum pidana, serta analisis terhadap ketiga hasil penelitian tersebut. Bab terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran.

Sistematika penulisan dalam paragraf ini menjadi kerangka dasar penulisan bab-bab selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi Hakim Dalam Menghadapi Tuntutan Reformasi Hukum Pidana.

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses (psikologis) yang berlangsung pada diri kita sewaktu mengamati berbagai hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰⁾ Selanjutnya dikatakan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah suatu proses memberi makna terhadap informasi sensoris yang kita terima, melalui seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan mengenai hal-hal yang kita temui.

Oleh karena itu persepsi kerja dinyatakan sebagai suatu proses membangun kesan (*forming impressions*) atau membuat penilaian (*making judgment*). Adanya unsur interpretasi ini membuat persepsi kita, sedikit ataupun banyak mengandung muatan-muatan subyektif. Hal itulah yang menyebabkan persepsi seseorang tentang sesuatu hal dapat berbeda dari persepsi orang lain ataupun tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (bias).

40) Drs. Zainoel B. Biran, Bahan Pelengkap Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan/OPPEK, Tahun 1996, hal. 17.

Menurut Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulasi inderawi (*sensory stimuli*).⁴¹⁾ Persepsi juga seperti sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya persepsi. Menurut Zainoel B. Biran dapat dipilah-pilah dalam 3 (tiga) kategori variabel, yaitu : (1) karakteristik dari rangsangan-rangsangan (i.e. obyek persepsinya), (2) situasi yang melatari kehadiran obyek persepsi itu sendiri dan (3) dari kita sendiri sebagai subyek yang mengalami proses ini.⁴²⁾

Dari sudut psikologi, persepsi dari satu orang akan berbeda dengan orang lain, karena pembentukan persepsi dipengaruhi faktor fungsional dan struktural. Dalam hal timbulnya persepsi karena faktor fungsional berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk

41) Desiderato, O.DB.Howeison dan JHJJackson, *Investigating Behaviour : Principle of Psychology* (New York : Harper and Row Publishers, 1976), hal.129.

42) Zainoel, Op.Cit., hal.17. Pada variabel diri kita sendiri sebagai subyek yang mengalami proses merupakan peranan besar, karena dalam diri kita banyak hal yang "membingkai" pengalaman kita dan menimbulkan personal bias. Kita memiliki pengalaman-pengalaman, kebutuhan-kebutuhan, sikap-sikap, asumsi-asumsi, ataupun nilai-nilai tersendiri yang mewarnai persepsi kita. Kita cenderung untuk "melihat" sebagaimana yang kita ingin lihat, "mendengar" sebagaimana yang ingin kita dengar dan seterusnya.

rangsangan, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon terhadap rangsangan itu. Karena pengalaman menentukan terbentuknya persepsi maka sifat persepsi tersebut adalah subyektif, yang bisa dipengaruhi juga dengan tanggung jawab, pendidikan maupun pengaruh tempat tinggal.⁴³⁾

Sedangkan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi persepsi berasal semata-mata dari sifat rangsangan fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individual. Menurut teori Gestalt apabila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya.⁴⁴⁾

Proses timbulnya persepsi itu sendiri tidak lepas dari peranan manusia ketika dihadapkan pada suatu masalah, sehingga atas masalah tersebut diperoleh tanggapan sebagai bentuk rangsangan-rangsangan tersebut dihubungkan maka secara psikologis akan menimbulkan penalaran yang muncul dalam bentuk persepsi. Munculnya persepsi dipengaruhi pengalaman-pengalaman terdahulu sebagai kebiasaan. Dari teori psikologis yang dikenal

43) Berkaitan dengan itu Dimiyati Mahmud mengatakan bahwa berhubungan dengan stimulusnya, persepsi itu berbeda dengan sensasi. Sensasi ialah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak. Periksa M.Dimiyati Mahmud, Psikologi : Suatu Pengantar (Yogyakarta : BPFE, 1990), hal.41.

44) Jamaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996), hal.58.

sebagai teori rangsangan atau tanggapan, pengenalan (*cognition*) merupakan cara manusia memberikan arti kepada rangsangan yang kemudian ditangkap oleh persepsi.

Berdasarkan variable manusia sebagai peran terbesar membentuk persepsi, maka dalam penerapannya untuk menghindari kesubyektifitasnya diarahkan pada rangsangan yang membentuk persepsi tersebut muncul secara tajam dan juga mengembangkan kepekaan melalui pengasahan kemampuan untuk berempati dan meningkatkan kemampuan untuk mendudukan diri dalam posisi orang lain.⁴⁵⁾

Dalam kehidupan sehari-hari tindakan manusia dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan terhadap makna apa yang menjadi obyek perhatiannya. Hal ini didasarkan kepada pendapat I.S. Susanto yang menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang atau terhadap sesuatu, sementara "warna" tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu.⁴⁶⁾

Pengembangan persepsi dalam memahami tuntutan reformasi hukum pidana mempunyai arti sangat penting yang dicerminkan melalui ide-ide, pendapat, atau pandangan dan

45) Dalam hal ini Jack Plano memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang dapat mempersepsikan suatu obyek tertentu ialah : Persepsi terjadi sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan objek tertentu yang kemudian dapat menimbulkan penafsiran indrawi tadi. Persepsi bukanlah suatu yang sama sekali tersurat karena sambutan dan penilaian berbagai isyarat indra dapat terjadi diambang batas. Periksa : Jack Plano, Kamus Analisa Politik (Jakarta : CV.Rajawali, 1986), hal.148.

46) lihat : I.S. Susanto, tahun 1994, hal.10

sikap-sikap yang berperan dalam pembentukan persepsi di sertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan obyek yaitu untuk konsisten terhadap arti pentingnya reformasi hukum pidana. Sikap terhadap obyek tertentu (*attitude*) dari insiden yang dicerminkan melalui pendapat, cara pandangan tersebut diwujudkan dalam persepsi. Dengan adanya *attitude* berada dalam kehidupan manusia maka akan berpengaruh dalam menentukan cara-cara tingkah laku orang terhadap obyek yang menjadi tujuannya.

2. Pengertian Reformasi Hukum Pidana

Reformasi diartikan sebagai suatu perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan selalu mengandung makna pembaharuan atau memperbaharui sebagai suatu proses dinamika kehidupan atau yang bertalian dengan kehidupan, dapat berupa nilai, norma, tata kerja, dan lain sebagainya. Reformasi hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengganti tatanan hukum positif yang tidak sesuai dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat dengan tatanan hukum baru yang dicita-citakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Dengan mengacu kepada pengertian reformasi hukum tersebut, dapat dirumuskan terminologi reformasi hukum pidana. Reformasi hukum pidana merupakan upaya untuk mengganti tatanan hukum pidana positif (*Ius Constitutum*) dengan

tatanan hukum pidana yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).⁴⁷⁾

Salah satu peranan penting yang dapat dilakukan Hakim dalam reformasi hukum yaitu memperbaharui hukum-hukum yang berasal dari masa kolonial. Pembaharuan ini dapat dilakukan Hakim melalui metode penafsiran, konstruksi, penghalusan. Dengan cara tersebut, hakim melakukan koreksi, seleksi, sanering, atau amputasi terhadap hukum dari masa kolonial, sehingga tinggallah aturan-aturan hukum yang dapat menjadi subsistem hukum nasional. Lebih lanjut, melalui kewajiban menemukan hukum, dan wewenang tidak menerapkan hukum yang bertentangan dengan tatanan baru sebuah negara yang berdaulat, demokrasi, dan berdasarkan hukum, hakim dapat pula membentuk hukum baru.⁴⁸⁾

Untuk sampai pada reformasi hukum pidana harus mengacu kepada kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pengertian kebijakan hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum, yaitu diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam kesempatan lain Sudarto mengartikan bahwa politik hukum mempunyai dua arti,

47) Jurnal Hukum, Reformasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No.11 Vol.6 Tahun 1999, hal.1.

48) Bagir Manan, Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum, Makalah disampaikan pada Pelatihan Teknis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta 4 Juli 2001, hal.4.

yaitu : pertama; usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat,⁴⁹⁾ dan kedua; kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁰⁾

Ditinjau dari sudut politik hukum, maka melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundangan hukum pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵¹⁾ Di samping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵²⁾

Sedangkan penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana tidak lain bertujuan untuk menaggulangi kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian dalam

49) Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alurnni, 1981, hal.159.

50) Ibid, hal.20.

51) Op.Cit., hal.161.

52) Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.93 dan 109.

batas-batas toleransi dimaksud, tidak bermakna adanya semacam *political will* untuk mentolerir atau membiarkan kejahatan-kejahatan tertentu, tetapi lebih sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan memang "ditakdirkan" tetap ada dalam apa yang disebut masyarakat manusia. Oleh karena itu, peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke pengadilan dan diberi pidana.⁵³⁾

Gambaran diatas menurut **Reksodiputro**, hanyalah apa yang paling terlihat (*eksplisit*) dan yang diharapkan oleh masyarakat. Tugas yang sering kurang diperhatikan ialah yang berhubungan dengan pencegahan terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi tindak kejahatan. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana mencakup : (1) mencegah masyarakat menjadi korban; (2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana; dan (3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁴⁾

53) Lihat : Mardjono Reksodiputro, hal.84.

54) Op.Cit., hal.84-85.

Dalam geraknya (operasionalnya), sistem peradilan pidana dari beberapa sub-sistem, yaitu : Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan; ke empat sub-sistem ini, dari perspektif sistem dituntut bekerja sama dalam hubungan yang *mutual exclusive* demi tercapainya tujuan sistem. Inilah yang disebut *Integrated Criminal Justice System*.⁵⁵⁾

Keterkaitan antara sub-sistem yang satu dengan yang lainnya mestinya seperti "bejana berhubungan" ⁵⁶⁾ Setiap masalah dalam salah satu sistem, akan menimbulkan dampak pada sub sistem-sub sistem yang lainnya. Demikian pula, reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub-sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub-sistem yang lain. Dengan demikian mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, bukan saja tanggung jawab kepolisian, tetapi kejaksaan dan pengadilan turut bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan mengenakan pidana pada pelaku, akan mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan kejahatan. Pemasyarakatan pun dapat mendorong

55) Jurnal Ilmu Hukum, Reformasi Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.1 No.3 Tahun III/99, hal.38.

56) Ibid.

terjadinya kejahatan, apabila eks nara pidana gagal berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya ketakterpaduan kerja, maka kebijakan kriminal harus dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana, karena ia berfungsi sebagai perekat sistem. Artinya, keterpaduan itu diperoleh apabila masing-masing sub-sistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya, oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.⁵⁷⁾

Kebijakan kriminal bukan sekedar sebagai "hasil perumusan" bersama, tetapi juga sebagai hasil dari pelbagai kewenangan dalam negara yang bekerjasama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian polisi dan kejaksaan yang merupakan pelaksana aturan hukum itu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai "penguji kebijakan" penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat alasan untuk memidana pelaku kejahatan. Akhirnya, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana mempunyai kebijakan sendiri

57) Lihat : Marjono Reksodiputro, hal.93.

dalam merawat (memperbaiki) terpidana dan mengusahakannya untuk kembali kemasyarakat sebagai warga yang diterima.

Diakui bahwa gambaran ini lebih sebagai tipe ideal. Kenyataannya, pelbagai variabel diluar sistem peradilan pidana justru potensial sebagai variabel yang mempengaruhi efektif tidaknya kerja sistem. Karena cakupannya yang demikian maka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak sekedar *The net work of courts and tribunals which deal criminal law and its enforcement*, tetapi lebih berdimensi kebijakan lewat suatu sistem untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pada titik ini, jelas bahwa penegekan hukum lewat sistem peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat untuk mencapai dan menikmati kedamaian serta kesejahteraan.

Sudarto dalam salah satu bukunya⁵⁸⁾, menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (maksudnya : kejahatan. Pen.) maka hendaknya dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

58) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hal.104.

Usulan tentang perlunya pengintegrasian penanggulangan kejahatan termasuk lewat penegakan hukum pidana dengan keseluruhan kebijakan sosial, berulang kali dikemukakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain :

Kongres PBB ke-4 tahun 1970 di Kyoto, dalam salah satu kesimpulan tentang masalah *Social defence politics in relation to development planning* menegaskan : *The prevention of crime and the treatment of offenders can not be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trends⁵⁹⁾*

Demikian pula dengan kesimpulan Kongres PBB ke-5 tahun 1975 di Genewa dalam membahas masalah *Criminal legislation, judicial procedures, prevention of crime*, diusulkan bahwa : *"..... criminal policy should be integrated into a general social policy of each country"⁶⁰⁾*

Bertitik tolak dari konsepsi kebijakan integral seperti usulan-usulan diatas maka kita dapat mengatakan bahwa penegakan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kejahatan tidak akan maksimal apabila tidak terkait dan tidak searah dengan kebijakan-kebijakan sosial lainnya.

59) Lihat dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP UNDIP, 1995, hal.9.

60) Ibid, hal.

Kalau demikian halnya, maka bila dilihat dari perspektif politik kriminal⁶¹⁾, maka selain penegak hukum yang efektif, sektor strategis yang perlu diperhatikan untuk menanggulangi kejahatan ialah, memahami masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung, dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Itulah sebabnya sangat tepat pertimbangan yang mendasari Milan Plan of Action yang dihasilkan dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985,⁶²⁾ bahwa :

"Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development political system, social and cultural values, and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be full responsive to the diversity of political economic, and social systems and to the constantly evolving condition of society".

Dengan demikian sistem peradilan pidana harus dilihat dan diperlakukan sebagai sebuah sistem yang

61) Marc Ancel mengartikan Criminal Policy sebagai : "The rational organization of the control of crime by society". Dalam pada itu, Sudarto mengkonsepsikan politik kriminal dalam kategori : (a) politik kriminal dalam arti yang paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan, badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat; (b) dalam arti yang lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi; (c) dalam arti sempit, politik kriminal mencakup keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (lihat: Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hal.113-114).

62) Lihat dalam Muladi, 1995., hal.10.

terbuka (open system)⁶³⁾ karena faktor lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dimengerti mengingat, sistem peradilan pidana pada dasarnya hanya merupakan suatu sub-sistem dari suatu sistem yang lebih besar seperti : sub sistem-sub sistem ekonomi, teknologi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya.

3. Hakim dan Putusan Hakim

Membicarakan tentang hakim dan putusan hakim tidak bisa dilepas-pisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Sebab kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. **Gustav Radbruch**⁶⁴⁾ pernah mengemukakan, ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam kondisi normal memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) dijiwai oleh ketiga nilai dasar tersebut. Demikianpun putusan hakim seyogyanya mengacu pada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya susah sekali untuk mewujudkan

63) Op.Cit., hal.15. lihat pula Blumberg, bahwa yang dimaksudkan menciptakan sistem peradilan terbuka disini adalah sistem peradilan terbuka dengan pengawasan publik dalam rangka peningkatan kontrol masyarakat pada dunia peradilan (A.S. Blumberg, Criminal Justice, hal.70).

64) Achmad Ali, Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim, Ujung Pandang ; Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988, hal.9.

ketiga nilai dasar tersebut secara serempak. Dalam praktek sering kali terjadi adanya pertentangan antara nilai yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara keadilan dengan kepastian hukum ataukah antara kemanfaatan dengan kepastian hukum. **Gustav Radbruch**⁶⁵⁾ sendiri mengakui dan menyadari bahwa di dalam kenyataannya, ketiga unsur esensial hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) sulit terwujud secara bersamaan, lebih sering terjadi konflik antara ketiganya.

Biasanya konflik itu terjadi karena dua hal yakni : pertama, hukum (perundang-undangan) terkadang dibuat untuk melindungi kepentingan politik (*in the interest of politic*) kelompok tertentu. Produk hukum seperti ini sejak semula, saat diundangkannya, cenderung mengabaikan realitas sosial. Konsekuensi logisnya undang-undang tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada tidak relevan lagi dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Mungkin pada saat diundangkannya dan pada masa awal berlakunya sesuai dengan realitas dan rasa keadilan masyarakat tetapi lambat laun dirasakan tidak relevan lagi. Konsekuensinya, apabila perundang-undangan tersebut dipaksakan berlakunya akan menimbulkan kegon-

65) Ibid, hal.10.

cangan-kegoncangan dalam masyarakat. Dalam konteks ini akan muncul konflik antara rasa keadilan dengan kepastian hukum.

Apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara nilai keadilan dengan kepastian hukum, muncul suatu pertanyaan, nilai mana yang harus di dahulukan, apakah nilai keadilan ataukah kepastian hukum? menyangkut masalah ini masih merupakan perdebatan dikalangan yuris. Ada sebagian besar pakar hukum memilih keadilan dari pada kepastian hukum, sebaliknya ada sebagian kecil yang memprioritaskan kepastian hukum ketimbang keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing. Jika penulis disuruh untuk memilih kecenderungannya untuk mendahulukan nilai keadilan dari pada kepastian hukum. Mengapa harus keadilan? Karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan. Selain itu kita pun telah diingatkan dan selalu disadarkan oleh pernyataan arif dari **Aristoteles**⁶⁶⁾ seorang filsuf yang terkenal yang mengemukakan bahwa pada hakikatnya hukum substansinya adalah "keadilan", yaitu hukum sebagai *ius*, *iustitia*, *recht* dan *right*, artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas yang

66) S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII No.9 Vol.6, 1997, hal.11.

berintikan "keadilan". Jadi hukum pertama-tama berarti adil atau hukum karena adil (*ius quia iustum*).

Berkaitan dengan tersebut sebagaimana disebutkan dimuka menarik untuk disimak pendapat dari **Soenarjati Hartono** yang mengemukakan bahwa kaedah hukum itu bukan merupakan tujuan akan tetapi hanyalah jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.⁶⁷⁾ Kemudian lebih lanjut **Soenarjati Hartono**⁶⁸⁾ mengemukakan, tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Tujuan inilah yang menyebabkan dua hal, pertama ; kaedah-kaedah hukum itu tidak hanya merupakan kaedah yang sah (*mempunyai validity*) saja akan tetapi juga harus merupakan kaedah-kaedah yang adil (*harus mempunyai value*), kedua ; penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan martabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.

Selanjutnya mungkin perlu diuraikan, bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada tentang pilihan kedua nilai tersebut? secara sederhana dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia tidak secara tegas mengatur tentang hal

67) Soenarjati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu?, Bandung, Alumni, 1976, hal.17.

68) Ibid, hal.114-115.

tersebut. Tetapi di dalam rancangan (Konsep) KUHP diatur bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepastian hukum yang merupakan patokan formal (vide pasal 16) dan nilai keadilan yang merupakan patokan material (vide pasal 17).⁶⁹⁾ Namun perancang Konsep KUHP menyadari sepenuhnya bahwa dalam kenyataannya kedua nilai tersebut yakni keadilan dan kepastian hukum mungkin saling mendesak atau terjadinya konflik antara keduanya. Untuk itu Konsep KUHP berpendirian bahwa yang diutamakan sejauh mungkin adalah nilai keadilan.⁷⁰⁾ Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 Konsep KUHP yang berbunyi "Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapannya pada kejadian-kejadian nyata". Dengan menyadari hal tersebut, "maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum". (kursif penulis).

Berdasarkan uraian di atas diperoleh gambaran bahwa pada hakekatnya para yuris menghendaki agar perlu terciptanya keseimbangan antara nilai keadilan (*gerechtigheid*) dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Tetapi apabila ada konflik antara keduanya dan memang

69) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, hal.111.

70) Ibid.

sering terjadi konflik antara kedua nilai tersebut, maka yang diprioritaskan adalah nilai keadilan.

B. Penegakan Hukum dan Birokrasi Peradilan Terhadap Bekerjanya Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat serta alat untuk mengatur masyarakat. Untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dilakukan melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu⁷¹⁾ tetapi juga harus pada masyarakat apakah peraturan itu sesuai atau tidak dengan konteks masyarakat. Konteks adalah situasi karena ada kemungkinan perubahan tentang nilai-nilai keadilan, perubahan tentang fenomena, jadi tidak sekedar keinginan. Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum terdapat adanya harapan dari para pembuat undang-undang agar masyarakat mematuhi undang-undang.

71) Satjipto Rahadjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung : Sinar Baru) hal.24.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷²⁾

Ketiga unsur tersebut oleh Radbruch⁷³⁾ disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum yang diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan satu sama lain karena masing-masing berisi tuntutan yang berlainan dan bertentangan. Jika dalam penegakan hukum mengambil kepastian hukum, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan/kegunanaan kesamping.⁷⁴⁾

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya (*das sollen*) dengan perilaku masyarakat yang senyatanya (*das sein*). Kesenjangan tersebut menurut

72) Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum (Yogyakarta : Liberty, edisi 4), hal.145.

73) Gustav Radbruch, *Einführung in die rechtswissenschaft* (Stuttgart : K.F.Koehler, 1961), hal.36.

74) Setjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal.19.

Roscoe Pound⁷⁵⁾ merupakan perbedaan antara *law in book* dengan *law in action*.

Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan antara lain :

- (1) apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu;
- (2) apakah yang dikatakan pengadilan sama dengan apa yang dilakukan;
- (3) apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.

Penegakan hukum merupakan cara bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang didukung dengan adanya tatanan yaitu hukum. Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar tersebut di dukung dari dalam oleh lebih dari satu tatanan, yaitu kebiasaan hukum dan kesusilaan sehingga berpengaruh pada segi efektivitas tatanan itu sendiri.

Tataan-tatanan tersebut sebagai kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Hasil akhir dari pekerjaan tatanan

75) Edwin M. Schuur, *Law and Order*, hal.39. dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung : Angkasa, 1988), hal.71.

dalam masyarakat pada hakekatnya tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Kita lihat bahwa tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, tetapi melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya yaitu kebiasaan dan kesusilaan.

Berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum maka terkadang pula nilai-nilai dan kaidah hukum yang terjadi dalam masyarakat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa dalam penegakan hukum harus ada penyesuaian antara nilai-nilai dan kaidah yang mengatur perilaku manusia secara nyata. Manusia dalam proses penegakan hukum berperan sebagai pembuat hukum dan menerapkannya yang dilakukan aparat penegak hukum.⁷⁶⁾

2. Birokrasi Peradilan Terhadap Bekerjanya Hukum Pidana

Birokrasi peradilan merupakan bagian dari tahapan berjalannya proses peradilan pidana, dengan kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Lembaga peradilan merupakan gambaran birokrasi penegakan hukum.

Salah satu ciri negara modern adalah adanya struktur atau birokrasi untuk mengatur, mengolah dan

76) Berdasarkan bagan Chambliss dan Seidman yang diadaptasi oleh Satjipto, menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial dan pribadi. Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu tatanan selain hukum. Periksa Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal.20-21.

mengoperasikan sub-sub sistem pendukung penyelenggara negara dengan baik (efektif, efisien, dan sistematis dalam mencapai tujuannya).⁷⁷⁾

Birokrasi berkembang dalam masyarakat modern melalui organisasi-organisasi besar seperti pengadilan yang bekerja menembus dan mendominasi semua tingkat kehidupan kita. Karena tanpa disadari pikiran dan pengabdian kita sebagai karyawan, hakim maupun mahasiswa tercurahkan pada organisasi dimana kita sehari-hari berada.

Birokrasi sebagai suatu ciri dari organisasi masyarakat modern di dalamnya telah menunjukkan sifat-sifat yang tidak manusiawi, serba formal, lebih mementingkan rasional, kecepatan kerja (efektif dan efisien). Birokrasi juga mempunyai tujuan yang bersifat eksplisit, tetap publik, diidentifikasi dengan yurisdiksi yang ditugaskan.⁷⁸⁾

Menurut Satjipto Rahadjo, lembaga-lembaga hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum

77) Al.Wisnubrata, Hakim dan Peradilan di Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1997, hal.17.

78) Philippe Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transition*, New York : Harper & Row Publishers, 1978, hal.22. Lihat pula Peter M.Blau & Marshall W.Meyer pada *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press, 1987, hal.27-32 : bahwa Birokrasi yang ideal menurut Max weber adalah birokrasi yang memiliki ciri-ciri :

1. adanya pembagian tugas yang jelas dan spesialisasi
2. menempatkan perinsip hirarkis wewenang
3. adanya sistem peraturan yang abstrak dan konsisten
4. sikap "sine ira et studio" (formal dan tidak bersifat pribadi).
5. jenjang karier dikaitkan dengan senioritas atau restasi kerja atau gabungan keduanya.

tersebut, sering dirumuskan sebagai usaha untuk menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Dengan demikian maka apa yang disebut sebagai lembaga itu adalah pengorganisasian kegiatan-kegiatan untuk mencari tujuan-tujuan hukum tersebut. Pengadilan merupakan salah satu organisasi yang mengemban tugas demikian itu bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain, maka pengadilan ini mengembangkan kehidupannya sendiri, membentuk norma-normanya sendiri serta mengejar tujuan-tujuannya sendiri pula. Dengan demikian terbentuklah semacam lingkungan kebudayaan sendiri di sekitar organisasi tersebut.⁷⁹⁾

Tujuan dalam proses peradilan pidana adalah mengadili dengan hasil akhir berupa putusan pengadilan atau putusan hakim. Proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili perkara, dan ketika diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.

Dengan tugas menyelenggarakan peradilan yang diperinci ke dalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili perkara itu, pengadilan melakukan penegakan hukum. cara mengadili seperti dikehendaki oleh sistem hukum kita tersebut termasuk dalam kategori ajudikatif

79) Setjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980), hal.65.

yaitu menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu peraturan serta kemudian menentukan apakah peraturan itu telah dilanggar (khususnya dalam perkara pidana).⁸⁰⁾

Lembaga peradilan dalam konsep hukum modern rasional merupakan organisai yang mempunyai tujuan untuk mencapai prioritas yang di kehendaki. Pada prioritas penegekan hukum pidana, bekerjanya lembaga peradilan bertujuan memberi keadilan lewat putusan hakim yang dalam prosesnya membutuhkan pengelolaan secara administrasi. Dalam pendekatan secara administrasi, lebih memikirkan tentang efesiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili tersebut, maka penerapan keadilan sebagai periortitas dari tujuan lembaga peradilan pada sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur yang birokratis.

Pada administarsi peradilan pidana menurut Satjipto Rahardjo, bahwa pada administrasi itu badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Badan-badan yang terlibat adalah : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Malasalah yang paling rumit adalah bagaimana kita akan mengorganisasikan badan-badan ke

80) Satjipto Rtahadjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung : Sinar Baru), hal.67.

dalam satu kesatuan kerja, sedang masing-masing mempunyai wewenang tugas yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin belum berarti apa-apa, tetapi apabila diingat bahwa semua badan itu mengurus orang yang sama yaitu tersangka, terdakwa atau terhukum maka keadannya bisa jadi lain. Apabila misalnya masing-masing badan memegang teguh birokrasinya, maka efisiensi dari administrasi bisa terganggu.⁸¹⁾

Oleh karena itu dalam peradilan pidana memerlukan kecermatan dan efisiensi dalam mengatur jalannya birokrasi yang terdiri dari berbagai lembaga hukum. Karena peradilan pidana menyangkut hak asasi manusia dalam menjalani hidupnya maka terhadap kewenangan masing-masing lembaga-lembaga tersebut harus mempertimbangkan efektifitasnya untuk melakukan tindakan hukum sehingga tidak menempatkan hasil yang jauh dari rasa keadilan masyarakat.

C. Peranan Dan Tanggung jawab Hakim Terhadap Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara

1. Tugas dan Peranan Hakim.

Tidak dapat disanksikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

81) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996) hal.185.

dengan seadil-adilnya (vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.14/1970). Kata yang terpenting dalam kalimat tersebut adalah "mengadili", sebenarnya dengan kata "mengadili" sudah tercakup kata-kata yang lainnya.⁸²⁾

Perlu dikemukakan bahwa pada hakekatnya tugas hakim mengadili mengandung dua pengertian yakni, menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Kedua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

a. Tugas hakim untuk menegakkan keadilan

Salah satu tugas hakim adalah menegakkan keadilan (*gerechtigheid*) bukan kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan.⁸³⁾ Namun yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang (*letterknechten der wet*) semata, menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum *powerfull* melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat (1) UU No.14/1970, "Peradilan dilaksanakan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan itulah sebabnya maka setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu

82) K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, 1977, hal.39.

83) *Ibid*

didahului dengan ucapan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam setiap putusannya sang hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata melainkan juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Dengan kata lain, dalam setiap putusannya sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan material bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi) ataukah demi menjaga kepastian hukum semata.

Namun dalam kenyataannya tidak semua yuris memahami dan menyadari hal tersebut didepan. Masih ada pakar hukum yang secara apriori menyatakan bahwa rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim adalah suatu yang sangat subyektif. Karena itu apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya, besar kemungkinan putusan-putusannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya justru akan mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan ketidak-tentraman dalam masya-

rakat. Itulah sebabnya mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan pada suara hati nuraninya dan mengabaikan rumusan formal dalam perundang-undangan.

Terhadap pandangan tersebut di depan, tidak berlebihan kalau dikatakan disini, bahwa suara hati nurani yang dimaksudkan itu adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses pada kekuasaan, politik, atau materi. Dalam bahasa **Satjipto Rahardjo**, hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial (*social vacuum*).

Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial sebagaimana dikemukakan di depan, terbukalah kemungkinan bagi hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret. Oleh karena itu hakim harus mampu dan berani menolak segala pengaruh yang menggoyahkan impartialitasnya, meskipun berakibat ia tidak populer asalkan putusan yang dijatuhkannya

adalah murni didasarkan pada rasa keadilan yang dilandasi oleh "fairness" (kejujuran) sebagai kata kunci dalam teori keadilan sebagaimana diterangkan Rawls dalam teorinya tentang keadilan.⁸⁴⁾

Untuk maksud tersebut dapat dilakukan dengan interpretasi dan kontruksi hukum (uraian lebih lanjut dapat dibaca pada halaman 68 - 74). Langkah ini penting dilaksanakan untuk mencegah penerapan hukum berdasarkan bunyi undang-undang semata, tetapi hal ini dapat diterapkan dengan baik jikalau hati nurani hakim peka terhadap perasaan hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

b. Tugas Hakim sebagai Penegak Hukum

Selain untuk menegakkan keadilan seperti yang dikemukakan di depan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Pengertian pelanggaran hukum meliputi dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas yang termasuk pelanggaran hukum meliputi pelanggaran terhadap hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan dalam pengertian sempit yang dimaksud pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap kaedah

84) Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta : Pustaka Kanisius, 1982), hal. 197.

hukum yang tertulis saja. Pengertian yang terakhir ini lebih dominan dianut dalam hukum pidana. Hal ini terkait erat dengan azas legalitas yang menjadi pegangan utama dalam hukum pidana.

Dalam kaitan dengan tugas hakim dalam penegakan hukum khususnya dalam menegakkan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka/terdakwa, maka perlu dikemukakan bahwa pada hakikatnya tugas tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, jikalau jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa tugas hakim dalam menegakkan hukum tidak akan menemui hambatan yang berarti apabila peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan perasaan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu tidak relevan lagi dengan realitas dalam masyarakat maka hakim akan menemui kesulitan dalam menegakkannya kembali. Tetapi apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut, yang notabene bertentangan dengan rasa keadilan terhadap peristiwa konkret yang

terjadi dalam masyarakat maka besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan.

Dalam konteks seperti tersebut di depan, berlakulah adagium yang berbunyi, undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menyebabkan timbulnya malapetaka atau ketidakadilan. Contohnya, penerapan pasal-pasal haatzaai artikelen atau pasal-pasal penyebar rasa kebencian, yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda terhadap mereka yang secara kritis melakukan koreksi total terhadap kebijakan penguasa yang sering mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat banyak. Tindakan tersebut terciptanya ketidakadilan bagi warga masyarakat karena dapat memasung kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, yang telah dijamin oleh pasal 28 UUD 1945. Dan sekaligus dapat menghambat partisipasi warga masyarakat dalam menyukseskan pembangunan khususnya dalam bidang politik.

Itulah sebabnya maka dalam rangka penegakan kembali hukum yang telah dilanggar, hakim tidak boleh terikat pada bunyi perkataan undang-undang (*letterknechten der wet*) semata, melainkan harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-

putusannya, yang biasa disebut sebagai *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim).

c. Hakim sebagai Pencipta Hukum

Selain kedua tugas tersebut di depan hakim juga dibebani kewajiban untuk menciptakan hukum atau membentuk hukum (*rechtsvinding*).

Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna atau lengkap, pasti ada saja kekurangan atau kelemahannya. Ada dua kelemahan pokok yang potensial terdapat dalam perundang-undangan yakni: pertama, dari segi perumusannya terkadang kurang lengkap, jelas dan konkret; kedua, dari aspek muatan materinya terkadang tidak relevan lagi dengan realitas sosial.

Kekurangan yang terdapat dalam perundang-undangan diakui juga oleh beberapa pakar hukum kita diantaranya Satjipto Rahardjo dan Roeslan Saleh. Menurut Satjipto Rahardjo,⁸⁵⁾ bahwa ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Kekakuannya; Kelemahan ini sebetulnya segera tampil sehubungan dengan kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian. Apabila

85) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Cipta Aditya Bakti, 1991), hal.85.

kepastian ini hendak dipenuhi, maka ia harus membayarnya dengan membuat rumusan-rumusan yang jelas, terperinci dan tegas dengan resiko menjadi norma-norma yang kaku.

b. Keinginan perundang-undangan untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung resiko, bahwa ia mengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja. Terutama sekali dalam suasana kehidupan modern yang cukup kompleks dan spesialisasi ini, kita tidak mudah untuk membuat perampatan-perampatan (*generalizations*).

Menurut Roeslan Saleh,⁸⁶⁾ aturan-aturan perundang-undangan yang telah dipojitifikan itu dan telah dipertimbangkan secara rasional pula masih merupakan kristalisasi dari pengalaman-pengalaman hukum dan penilaian-penilaian kita yang sifatnya adalah kompleks sekali. Ia masih saja belum sempurna, dan tidaklah mungkin meliputi segala hal. Memang telah banyak hal yang diungkapkan oleh ketentuan perundang-undangan itu. Tetapi sementara itu masih banyak pula yang diselubunginya, yaitu

86) H. Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Azas-Azas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, 1996, hal.56.

masih banyak sekali aspek-aspek dari kehidupan sehari-hari yang terselubung di dalamnya.

Menyadari akan adanya kekurangan dalam perundang-undangan maka seyogyanya hakim tidak boleh menjadi terompet undang-undang semata, melainkan perlu melakukan penciptaan hukum atau penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini dilakukan untuk merespons kasus-kasus konkret yang dihadapinya di depan persidangan.

Van Eikema Hommes⁸⁷⁾ mengemukakan, yang dimaksud dengan *rechtsvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 pasal 14 ayat (1) ditegaskan, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Berdasarkan bunyi pasal tersebut

87) Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.4.

diperoleh gambaran bahwa sistem peradilan di negara kita menganut azas *ius curia novit*. Azas tersebut mengajarkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan megadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada ataukah karena perundang-undangan kurang jelas atau kurang lengkap.

Kedudukan hakim sebagai pencipta hukum semakin dipertegas dalam rumusan pasal 27 ayat (1), "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan, "Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat".

Bertitik tolak dari rumusan pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya maka semakin jelaslah bahwa dalam

keadaan-keadaan tertentu hakim diberikan kewenangan untuk menciptakan hukum melalui putusan-putusannya. Dalam arti apabila terjadi kekosongan hukum ataukah undang-undang yang ada tidak jelas atau kurang lengkap ataukah tidak relevan (lagi) dengan kenyataan sosial maka hakim adalah pencipta hukumnya dengan merujuk pada hukum yang tidak tertulis.

Untuk mewujudkan peran idealnya sebagai pencipta hukum itu, hakim dapat melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk diterapkan pada kasus-kasus konkret. Tetapi apabila metode interpretasi tidak dapat diterapkan pada suatu kasus hakim dapat mengadakan konstruksi hukum. Apa yang dimaksud dengan konstruksi hukum dan interpretasi? Hal ini akan diuraikan di bawah ini :

1. Interpretasi

Yang dimaksud dengan interpretasi adalah menafsirkan perkataan undang-undang dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal dari pembuat undang-undang. Dalam hal ini hakim masih tetap berpegang pada bunyi kata-kata dalam perundang-undangan,⁸⁸⁾ Adapun macam-macam

88) Ahmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Ujung Pandang ; Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988, hal.9.

interpretasi yang dapat digunakan untuk menafsirkan perundang-undangan antara lain, penafsiran secara historis (*wethistoris* atau *rechthistoris*), penafsiran sis-tematis, penafsiran teologis atau sosiologis, penafsiran resmi (*authentiek/officieel*), penafsiran bebas (*vrije interpretatie*), penafsiran fungsional, penafsiran rasional, penafsiran antisipasi atau futuristis, penafsiran perbandingan hukum dan penafsiran kreatif.⁸⁹⁾

Berkaitan dengan beberapa jenis interpretasi sebagaimana telah dikemukakan di depan maka di harapkan kepada para hakim agar pada masa yang akan datang semakin berani menggunakan metode interpretasi sosiologis, antisipatif dan kreatif. Hal ini sangat urgen untuk diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman terutama produk hukum kolonial yang sebagian besar tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tetapi masih tetap berlaku positif di Indonesia.

2. Konstruksi Hukum.

Yang dimaksud dengan konstruksi hukum adalah menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang dimana

89) Hadely Hasibuan, Op.Cit. hal.195.

tidak berpegang lagi pada bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁹⁰⁾ Adapun jenis-jenis konstruksi hukum antara lain, *argumentum per analogian* (analogi), *argumentum a'contrario*, pengkonkretan aturan hukum (*rechts-verwijring*) dan fiksi hukum.⁹¹⁾

Di atas telah diuraikan 4 (empat) jenis konstruksi hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam putusannya, salah satu diantaranya adalah metode analogi. Sehubungan dengan itu perlu dikemukakan bahwa penggunaan analogi dalam hukum perdata tidak menjadi persoalan dan hal ini sering digunakan oleh para hakim. Sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering menjadi perdebatan dikalangan yuris, ada yang setuju untuk digunakan dan ada yang menolaknya. Tetapi yang jelas bahwa sebagian besar negara-negara di dunia tidak dapat menerima analogi untuk diterapkan dalam hukum pidana, hal ini sebagai pengaruh dianutnya azas legalitas dalam hukum pidana.

Berkaitan dengan itu menarik untuk disimak pendapat N.V. Rutgers.⁹²⁾ Dikemukakannya, hampir

90) Ibid, hal.86.

91) Op.Cit. hal.90.

92) Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal.38-39.

semua negara hukum (*rechtsstaat*) didunia menempatkan azas legalitas sebagai azas yang fundamental dalam hukum pidana. Mereka menaruh kepercayaan terhadap azas tersebut, menghendaki supaya pelanggaran itu dinyatakan dengan jelas, menolak analogi dan berpendapat bahwa suatu peraturan-pidana khususnya tidak boleh bersifat *retro-active*.

Sebagaimana diketahui bahwa negara kita juga mengakui bahwa azas legalitas merupakan azas yang fundamental dalam hukum pidana. Azas tersebut telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Rumusan pasal tersebut mengandung makna bahwa seseorang baru dapat dituntut kemuka pengadilan apabila suatu perbuatan diduga telah melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Demikian pun dalam hal penjatuhan pidana, seseorang dapat dipidana apabila terbukti bahwa yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang pidana atau undang-undang lain yang bersanksi pidana. Selain itu bunyi pasal tersebut juga menghendaki agar peraturan

pidana tidak boleh berlaku surut. Kecuali, jikalau peraturan baru mengandung ketentuan yang menguntungkan seorang terdakwa sehingga diperlakukan surut (vide Pasal 1 ayat(2)).

Dalam Konsep KUHP pengertian azas legalitas tersebut telah diperluas. Dinyatakan bahwa suatu perbuatan patut dipidana tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis (undang-undang) saja melainkan juga berdasar hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/ hukum adat) sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya (bandingannya) atau tidak diatur dalam undang-undang (vide Pasal 1 ayat (1) dan (3) jo Pasal 90 Konsep KUHP. Dasar pertimbangan perluasan perumusan azas legalitas ini tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin keseimbangan antara kepentingan kepastian hukum dengan keadilan. Dan juga perumusan tersebut menunjukkan karakteristik azas legalitas menurut pandangan dan pemikiran orang Indonesia yang tidak terlalu formalistis dan terpisah-pisah.⁹³⁾

Perlu dikemukakan bahwa meskipun azas legalitas dalam Konsep KUHP telah diperluas sebagaimana di atas, tetapi tidak berarti prinsip

93) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.108-109.

analogi dapat diterapkan dalam hukum pidana. Mengenai hal ini telah dipertegas dalam pasal 1 ayat (2) Konsep KUHP yang berbunyi "Untuk menetapkan adanya tindak pidana tidak dapat digunakan penafsiran undang-undang secara analogi".

Namun, meskipun analogi dilarang penggunaannya dalam hukum pidana akan tetapi tidak berarti tertutup kemungkinan bagi hakim untuk menyimpanginya. Sebab hakim adalah aktor yang memiliki kebebasan untuk memilih alternatif tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Berbicara tentang tindakan hakim maka teori yang menjelaskan hal ini adalah Teori Aksi yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Dalam teori aksinya itu Parsons menguraikan tentang konsep voluntarism. Singkatnya voluntarism adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Aktor menurut konsep voluntarisme Parsons ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan untuk menilai dan memilih dari alternatif tindakan.⁹⁴⁾

94) George Ritzer, (Terj. Alimardan) Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penerbit CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hal.57.

Dalam hal ini hakim adalah bagian dari makhluk yang bebas itu. Dia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan atau putusannya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan.⁹⁵⁾ Hakim dapat menentukan putusannya tanpa harus terikat pada undang-undang. Nampaknya negara kita menganut ajaran kebebasan hakim. Dimana hakim diberikan kebebasan untuk menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam putusannya (vide pasal 14 jo pasal 27 UU No.14 Tahun 1970).

2. Tanggung jawab Hakim.

Proses peradilan pidana di selenggarakan oleh berbagai unsur aparaturnya penegak hukum dengan hakim sebagai pemegang peran untuk memberi keadilan. Hakim mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan hukum. Di dalam mengadili perkara yaitu memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya, ia berarti melaksanakan hukum, sesuai dengan pasal 27 undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang mewajibkan

95) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, 1985, hal.26.

hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. hakim tidak hanya menerapkan hukum saja, tidak sekedar mengadakan subsumptie (memasukkan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan) saja, tetapi dalam putusannya hakim juga harus menemukan dan menciptakan hukum. Putusan hakim bersifat mengikat bagi pencari keadilan yang berarti putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya serta itu secara materiel tidak benar. Dengan perkataan lain putusan hakim itu harus selama tidak mendapat koreksi/dibatalkan oleh hakim banding maupun kasasi. Hal yang demikian sering meresahkan masyarakat apabila putusan tersebut ternyata tidak mencerminkan keadilan, sehingga merupakan gambaran nyata bahwa hukum hanyalah janji-janji.

Tanggung jawab hakim sebagai profesional hukum tercermin dari hasil putusannya sehingga tugas mengadili telah dilakukan. Menurut Sudikno Mertokusumo tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang

UPT-PUSTAK-UNDIPI

diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.⁹⁶⁾

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya dibidang penegakan hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab undang-undang (publik), tanggung jawab kepada masyarakat dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab undang-undang adalah tanggung jawab hakim kepada negara karena telah melaksanakan peradilan berdasar perintah undang-undang. Tanggung jawab kepada masyarakat disebabkan dalam menjalankan fungsinya masyarakat sebagai kontrol sosial. Sedangkan tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku umat beragama sebagai landasan dalam menjalankan fungsinya dan menjalankan amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁷⁾

Bagian tanggung jawab hakim kepada negara terlihat pada penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang No.14 Tahun 1970 yaitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

96) Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indoensia sejak 1942 (PT.Gunung Agung, 1973), hal.179.

97) Bandingkan dengan Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.131 yang membedakan tanggung jawab hakim adalah tanggung jawab undang-undang dan tanggung jawab moral.

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili serta menuangkan dalam putusan. Dapat diartikan jika peraturan (hukumnya) tidak jelas atau tidak sesuai lagi ia tidak boleh menolak untuk mengadilinya. Ia dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Hakim bukanlah sekedar "penyambung lidah" dari pada undang-undang, bukan sekedar menerapkan undang-undang terhadap peristiwa. Hakim dalam mengadili suatu perkara, ia melakukan aktivitas atau "kegiatan yuridis" sendiri dan tidak sekedar melakukan sylogisme belaka.⁹⁸⁾ Hakim ikut serta dalam penerapan hukum, bukan hukum obyektif seperti yang diciptakan oleh pembuat undang-undang yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret yang diciptakan dengan putusannya sesuai dan dapat diterima oleh atau dimasyarakat, dengan wajib memperhatikan kebutuhan praktek hukum dan peradilan sebagai acuan bekerjanya lembaga pengadilan.

Tanggung jawab hakim terhadap masyarakat merupakan kontrol sosial yang berasal dari rakyat agar putusan hakim merupakan gambaran penerapan norma bagi masyarakat. Dalam tanggung jawabnya ini hakim harus mampu putusannya tersebut mencegah gangguan karena adanya pelanggaran hukum, dan hakim juga dituntut

98) Paul Scolten, *Algemeen Deel* (NV.Uitgevers W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1934), hal.1 dan 8.

mampu mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum.

Berdasar pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, peradilan di Indonesia dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dituliskan pada setiap kepala putusan sebagai irah-irah putusan. Irarah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan memberi kekuatan mengikat dan kekuatan untuk dilaksanakan bagi setiap putusan pengadilan di Indonesia. Hakim dalam mengadili harus mempunyai rasa dan keyakinan Ketuhanan, sehingga dapat menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan sebagai dzat tertinggi yang tidak pernah ada bandingnya. Dalam tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hatinya. Hakim tidak terpengaruh pada segala macam godaan dan rayuan serta himbauan negatif sesama manusia, karena hakim menyadari sepenuhnya jika tidak berlaku adil dia akan penuh dosa dan bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hakim telah menetapkan keputusannya sambil berkata "Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa", yang hak adalah hak, dan yang bathil adalah bathil.⁹⁹⁾

3. Kebebasan dan Kemandirian Hakim.

Dalam menerapkan keadilan hakim mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan dunia modern serta perkembangan hukum internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Dengan demikian sesuai dengan arah kebijakan lainnya di bidang hukum yang terdapat pada GBHN 1999-2004 untuk mewujudkan peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun diperlukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka yang di dalamnya mengandung maksud adanya kemandirian hakim sebagaimana diatur dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan :

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-Undang;
- (2) Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 25:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

99) Abdulkadir Muhammad, Op.cit., halaman 131.

Adanya penegasan pasal-pasal tersebut kekuasaan kehakimnan di negara Republik Indonesia tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh kekuasaan lain, kecuali yang diatur dan diizinkan oleh undang-undang. Sehubungan dengan ini Sudikno Mertokusumo mengatakan : satu-satunya campur tangan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan hanyalah grasi. Dan ini pada hakekatnya bukanlah campur tangan dalam bidang peradilan, melainkan koreksi terhadap putusan-putusan pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰⁰⁾ Dalam pasal 1 UU No.14 Tahun 1970 menyebutkan "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum dan keadilan". Dari ketentuan-ketentuan tersebut kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dilakukan oleh hakim, dengan demikian hakim dalam kewenangannya terikat pada Pancasila sebagai filter kebebasan, mempunyai sifat bebas/mandiri dalam menjalankan fungsinya.¹⁰¹⁾

100) Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942, Dan Apakah kermanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 1983), hal.212.

101) Ditegaskan pula oleh Sudikno Mertokusumo bahwa secara prosedural kebebasan peradilan mengandung pengertian pembatasan juga, yaitu bahwa hakim dalam mengadili, kebebasannya tidak mutlak melainkan dibatasi oleh UUD 1945, Undang-Undang, Hukum tidak tertulis, dan kepentingan para pihak. Tidak boleh dilupakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang juga membatasi hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila, (periksa : Sudikno Mertokusumo, 1983), hal.212.

Menurut Bismar Siregar "dasar kemandirian dan kebebasan hakim sangat tergantung pada pribadinya dan kemandirian hakim bukan terletak pada jaminan undang-undang tetapi kepada iman".¹⁰²⁾

Oleh karena itu hakim dalam kemandiriannya sebagai profesional hukum dalam melakukan pengambilan putusan dengan mempedomani kode etik hakim. Menurut Purwoto, contoh dari kode etik hakim di negara barat adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates yang di dalamnya mengandung ciri-ciri seorang hakim yang baik yaitu dengan :

1. *To hear conteously.*
2. *To answer wisely*
3. *To consider soberly.*
4. *To decide impartially*¹⁰³⁾

Kode etik hakim sebagai etika profesi hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun di seluruh dunia dan mengatur tentang nilai-nilai moral, kaedah-kaedah penuntun dan aturan-aturan tentang prilaku yang seharusnya dan seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Sedangkan kode etik hakim yang dikenal sebagai kode kehormatan hakim Indonesia diambil dari hukum adat yaitu

102) Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta : Rajawali, 1986), hal.74.

103) Socrates, dalam HR.Purwoto S.Gendasubrata, *Renungan Hukum* (IKAHL,1998), hal.93.

"Pepakem Cirebon" yang kemudian di implementasikan dalam Panca Dharma Hakim yaitu :

- | | |
|------------|---|
| 1. Kartika | :bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| 2. Cakra | :berlaku adil |
| 3. Candra | :bijaksana |
| 4. Tirta | :jujur |
| 5. Sari | :berbudi luhur/berkelakuan tidak tercela. |

Etika profesi hakim merupakan prinsip moral yang harus dipegang hakim Indonesia karena menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya yang luhur karena mengemban keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping tugas luhur, juga dipundaknya mengemban tugas berat karena sering menghadapi pelbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat. Etika moral yang demikian menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk dan teori tentang prilaku, tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk dengan mengembalikan kepada hati nurani masing-masing.¹⁰⁴⁾

Melihat hakim dalam memberikan keadilan sarat dengan nilai. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidanalah yang paling dekat dan paling sarat dengan nilai-nilai kejiwaan/moralitas. Di dalam norma-norma

104) Sehubungan dengan ini Paul Scholten mengatakan "suatu putusan nurani (gewetensbeslissing) merupakan inti putusan hakim". Hakim melakukan sesuatu yang lain ketimbang hanya mengamati ke arah untuk keuntungan siapa timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya. Periksa : JJH.Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal.227.

hukum pidana banyak terkandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (antara lain jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina dan pelecehan seksual lainnya), sehingga wajar untuk menegaskan diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung/pelaksananya.¹⁰⁵⁾

Strategi penerapan hukum ditekankan pada sistem nilai-nilai sehingga hukum harus disesuaikan dengan nilai realitas dalam masyarakat, dan bila hendak mengubahnya untuk mengarahkan perilaku masyarakat melalui nilai-nilai tersebut, maka memerlukan usaha yang bersifat terus menerus. Pada penggarapan proses penegakan hukum pidana terkait dengan tingkat kesadaran sebagai nilai dan sikap masyarakat, untuk itu harus diimbangi kemampuan aparat penegak hukum yaitu hakim yang profesional dengan mempunyai inovatif dan kreatif yang tinggi.

Penegakan hukum pidana secara *Integratyed Criminal Justice System* meletakkan hakim sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Namun istilah benteng terakhir dari keadilan agaknya masih sekedar mitos saja, sebab dalam kenyataannya lembaga peradilan cenderung

105) Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal.377.

menumpulkan kemungkinan terjadinya perubahan dan cenderung mempertahankan status quo. Hal ini tidak lepas karena hakim masih belum ada keberanian dalam menafsirkan undang-undang atau peraturan.

Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum kepada peristiwa konkret. Metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang, tujuan dari menjelaskan ketentuan undang-undang adalah untuk merealisasikan berlakunya fungsi hukum positif melalui penjabaran-penjabaran putusan yang dengan sendirinya menghindarkan pola pikir yang dogmatik. Dalam figur tersebut hakim tidak dapat menerapkan begitu saja undang-undang ke dalam peristiwa konkret. Untuk menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan khusus sifatnya ke dalam peristiwa konkret, maka ketentuan undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan dan ditafsirkan.¹⁰⁶⁾

106) Menurut Sudarto figur sentral hakim dipandang paling berwenang untuk menetapkan perantara dari dunia normatif (sollen) dengan dunia nyata (sein) dengan menerapkan undang-undang atas peristiwa-peristiwa yang konkret melalui atau dengan menggunakan metode-metode penafsiran. Pandangan dogmatis menurut Sudarto lebih menitik beratkan pendidikan (pengajaran) hukum pada penerapan aturan sehingga kurang memberi kemungkinan untuk bersikap kritis dan kreatif. Periksa Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1977), hal.21-22.

Sesuai dengan asas *independent judiciary* dari suatu negara hukum, maka di Indonesia merupakan hal yang mutlak adanya peradilan yang bebas, terlepas dari pengaruh pemerintah dan lain alat kekuasaan negara. Lembaga peradilan secara mandiri diberi kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran hukum karena semata-mata berdasar hukum, kebenaran dan keadilan : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mampu memberikan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila.

Untuk menuju pengembangan hukum modern di dalam penegakan hukum pidana apalagi dengan adanya tuntutan reformasi hukum pidana hakim tidak sekedar bersifat legalistis-normatif karena sebagaimana diajarkan oleh Roscoe Pound antara lain dijelaskan bahwa hukum pada hakekatnya merupakan suatu bentuk dari teknik sosial (*social engineering*) rekayasa sosial atau kontrol sosial, dengan tujuan untuk mengatur secara harmonis dan memenuhi secara optimal kebutuhan dan kepentingan individu dalam keseimbangannya dengan kepentingan masyarakat.¹⁰⁷⁾ Keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakekat dari keadilan. Seiring dengan perkembangan masyarakat di era globalisasi dan kemajuan dunia modern serta perkembangan hukum internasional

107) Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal.128

menuntut dilakukannya "reform" dalam hukum pidana menuju perwujudan supremasi hukum dengan pemberian keadilan substantif oleh hakim akan memberikan nilai kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. TUNTUTAN REFORMASI HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA.

Penegakan hukum memang tidak mengenal kata akhir. Karena proses ini adalah sebuah proses yang akan terus selama manusia masih ada. Hal ini sebuah konsekuensi dari kehidupan manusia yang selalu dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan serta pemenuhannya. Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, tentu orientasinya tidak terlepas dari proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui prosedur hukum. Prosedur hukum yang dimaksud disini adalah melalui peradilan pidana.

Menurut Mardjono¹⁰⁸⁾, dalam bekerjanya peradilan pidana paling sedikit ada empat komponen sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Diharapkan dari keempat komponen tersebut dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Bahkan menurut Romli Atmasasmita¹⁰⁹⁾ bahwa Penasehat

108) Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal.1.

109) Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bandung : Bina Cipta, 1996, hal.25.

hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Artinya bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana merupakan keterpaduan kerja sistem yang dilakukan oleh semua komponen tersebut. Namun di antara komponen sistem peradilan pidana tersebut, aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya.

Menurut **Sudarto**, penegakan hukum pidana secara *integrated criminal justice system* meletakkan hakim sebagai benteng terakhir keadilan. Lebih lanjut Sudarto mengatakan, figur sentral hakim di pandang paling berwenang untuk menetapkan perantara dari dunia normatif (*sollen*) dengan dunia nyata (*sein*) dengan menerapkan undang-undang atas peristiwa-peristiwa yang konkrit melalui atau dengan menggunakan metode-metode penafsiran¹¹⁰⁾. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka unsur aparatur penegakan hukum dalam hal ini hakim merupakan pemegang utama untuk memberi keadilan dan sekaligus sebagai unsur penegak hukum yang paling bebas untuk menentukan tindakan atau putusannya. Oleh karena itu, tanpa bermaksud mempersempit arti penegakan hukum

110) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alurni, Bandung, hal.21.

hanya terbatas pada proses peradilan oleh hakim di Pengadilan. Namun bahwa dengan melihat fungsi hakim sebagai "**pintu**" terakhir keadilan dengan kebebasasn yang dimiliki, hakim dapat menentukan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang (vide pasal 14 jo. pasal 27 UU No.14 tahun 1970).

Asumsi ini, menjadi dasar pembahasan mengenai tuntutan reformasi hukum terhadap penegakan hukum pidana yang difokuskan pada fungsi peradilan yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan (*benteng terakhir keadilan*).

1. Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan.

Setiap kali berbicara tentang penegakan hukum, maka mau tidak mau akan menyinggung mengenai para penegak hukum yang menjalankan hukum tersebut. Seperti di sebutkan di atas bahwa salah satu penegak hukum yang sangat penting posisinya adalah hakim. Ada satu preposisi, pernyataan yang dapat diuji kebenarannya dari masa kuno yang menyatakan hakim adalah mulut undang-undang. Preposisi tersebut saat ini dirasakan kurang relevan karena hakim tidak semata-mata merupakan mulut dari undang-undang. Tetapi preposisi tersebut cukup menggambarkan pentingnya posisi hakim sejak jaman dahulu.

Suatu undang-undang tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan seorang hakim.

Satu rumpun pemikiran hukum yang banyak menyoroti hakim adalah *American Legal Realism*. Hal tersebut dapat dilihat dari cara rumpun pemikiran ini mendefinisikan tentang hukum, yaitu apa yang diputuskan oleh hakim dan tidak lebih dari pada itu, seperti yang diproklamirkan oleh tokohnya **Oliver Wendell Holmes**. Mereka menekankan pentingnya kedudukan court, pengadilan dalam hal ini hakimnya dalam membentuk hukum. Maka dalam faham hukum Anglo Saxon kemudian dikenal asas *The Judges Made Law*. Pandangan-pandangan **Holmes** selanjutnya juga menunjukkan betapa dominannya peran hakim dalam bekerjanya hukum. Ia menekankan pentingnya faktor-faktor di luar hukum dan faktor bawah sadar dalam proses peradilan.¹¹¹⁾

Pernyataan **Holmes** yang sangat terkenal adalah "*the life of is not logic, it has been experience*", kehidupan hukum tidak pernah menurut logika, melainkan merupakan pengalaman¹¹²⁾. Demikian pula oleh **John C. Gray** dengan ungkapan *All law is judge made law* (hukum adalah putusan hakim). Dengan ungkapan ini **Gray** ingin menunjukkan bahwa hakim bukan hanya menemukan hukum dan menerapkan hukum yang diambil begitu saja langsung dari suatu buku

111) Alan Hunt, *The Sociological Movement in Law* (London, 1978), hal.42.

112) Lihat Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Bhatara, Jakarta, 1963, hal.182.

undang-undang, tetapi hakim membuat atau membentuk hukum. Hakim adalah sosok yang paling sentral dalam sistem hukum. Sedangkan undang-undang bukanlah hukum, akan tetapi salah satu dari sumber hukum sebagaimana juga suatu yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya), yang mendasari putusannya.¹¹³⁾

Perkembangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan kecenderungan dianutnya pandangan bahwa hakim selain menerapkan hukum, ia juga dapat membuat hukum. Hal tersebut berangkat dari pemikiran bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan dalam hal terdapat kekosongan hukum ia harus dapat menciptakan hukumnya.

Dalam pasal 14 ayat (1) ditegaskan, "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Berdasarkan bunyi pasal tersebut diperoleh gambaran bahwa sistem peradilan di negara kita menganut azas *ius curia novit*. Azas tersebut mengajarkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang

113) Mila Karmila Adi, "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatisme Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia dalam Mengambil Keputusan", Jurnal Hukum UII, No.16 Vol.6 (April, 1999), hal.125.

diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada ataukah karena perundang-undangan kurang jelas atau kurang lengkap.

Kedudukan hakim sebagai pencipta hukum semakin dipertegas dalam rumusan pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya.

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan, "Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat".

Bertitik tolak dari rumusan pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, maka semakin jelaslah bahwa dalam keadaan tertentu hakim diberikan wewenangan untuk menjelaskan hukum melalui putusan-putusannya. Dalam arti apabila terjadi kekosongan hukum atau undang-undang yang ada tidak jelas atau kurang lengkap ataukah tidak relevan (lagi) dengan kenyataan sosial maka hakim adalah pencipta hukumnya dengan merujuk pada hukum yang tidak tertulis.

Barangkali ada baiknya penulis mengutip pendapat **John P. Dawson**¹¹⁴⁾ yang sangat indah sebagai berikut:

“Bagi kami tidak terelakkan bahwa hakim mengambil peranan dalam penciptaan hukum, menciptakan sambil menerapkan. Kami percaya bahwa dalam sistem hukum manapun hakim dalam memutuskan perkara yang disidangkan di depannya, selalu menyesuaikan doktrin hukum dengan situasi baru dan dengan begitu memberikan arti baru kepada doktrin hukum itu”.

Tidak dapat disangkal bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna atau lengkap. Pasti saja ada kekurangan dan kelemahannya. Ada dua kelemahan pokok yang potensial terdapat dalam perundang-undangan yakni: *pertama*, dari segi perumusannya terkadang kurang lengkap, jelas dan konkrit; *kedua*, dari aspek muatan materinya terkadang tidak relevan (lagi) dengan realitas sosial.

Menurut **Ch. J. Enscheede**¹¹⁵⁾ dalam bukunya *Stafrecht en Politiek*, Undang-undang bukan endapan sistem nilai yang koheren. Seluruh perundang-undangan tidak pernah merupakan satu keseluruhan. Undang-undang berasal dari kurun waktu kebudayaan yang berbeda dan merupakan endapan pendapat, perbedaan dan kompromi politik yang acapkali berhubungan jauh dengan problematis kini dan nanti. Hal senada disampaikan oleh Molengraaf yang merupakan tokoh yang memainkan peran dalam pembentukan

114) Harold J. Berman (eds), *Ceramah-ceramah tentang Hukum Amerika Serikat* (terj. Gregory Churchill), PT. Tata Nusa, 1996, hal. 15.

115) W. Van Gerven (terj. Hartini Tranggono), *Kebijaksanaan Hakim*, Jakarta, Erlangga, 1990, hal. 108.

kodifikasi mengakui bahwa kodifikasi itu tidak sempurna. Dalam satu tulisan **Molengraaf**¹¹⁶⁾ mengemukakan bahwa selain aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, dalam tiap-tiap masyarakat masih ada banyak sekali aturan-aturan yang oleh setiap orang dalam hubungannya dengan anggota-anggota masyarakat seharusnya diperhatikan dan kini adalah aturan-aturan yang pasti setiap waktu bergantung kepada keadaan dari peradaban bangsa dan pertumbuhannya, tetapi di samping itu tetap dalam tiap-tiap kejadian konkret akan dtunjuk secara baik pula.

Berdasarkan pandangan tersebut tentang kondisi perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, di peroleh gambaran bahwa pada hakikatnya perundang-undangan memiliki kekurangan atau kelemahan yakni kekakuannya sehingga tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana dengan kondisi perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia? Atas pertanyaan tersebut ada baiknya kita menyimak pendapat **Sudikno Mertokusumo**, yang menegaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia itu merupakan suatu given dari peraturan perundangan-undangan dari manapun asalnya (baik produk nasional

116) H.Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Azas-azas Hukum Nasional, Karya Dunia Fikir, 1996, hal.70.

ataupun warisan kolonial) tetaplah mempunyai sifat pasif dan statis¹¹⁷⁾. Jadi hukum nasional kita juga memiliki banyak kekurangan.

Menyadari akan adanya kekurangan dalam perundang-undangan maka seyogyanya hakim tidak boleh menjadi terompet undang-undang semata melainkan perlu melakukan penciptaan hukum atau penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini dilakukan untuk merespon kasus-kasus konkret yang dihadapinya di depan persidangan.

Bahwa meskipun sistem hukum kita yang *notabene* berkiblat ke *civil law system*, konsekuensinya hakim tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan yang telah ada termasuk tidak boleh membentuk peraturan sendiri. Menurut hemat penulis terlalu simpel kalau dikatakan bahwa ide penciptaan hukum oleh hakim bertentangan dengan sisten hukum yang ada. Memang benar bahwa secara formal negara kita menganut *civil law system*. Tetapi sistem tersebut tidak diterapkan secara utuh melainkan telah dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam arti sistem hukum di negara kita memberikan peluang kepada hakim agar dapat bertindak sebagai pencipta hukum. Dasar hukumnya adalah pasal 14 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

117) Sudikno Mertokusumo dalam H.Abdurrachman, Beberapa aspek tentang Pembangunan Hukum Nasional, Bandung,, Citra Aditya, 1995, hal.145.

No.14 Tahun 1970 dan penjelasan-penjelasananya, sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam mengadili sesuatu perkara/memberi putusan, menurut hukum ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan, yaitu :

- (1) Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditujukan oleh sistem hukum;
- (2) Menafsirkan kaidah yang dipilih atau diterapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah dibentuk dan berkenaan dengan keleluasaan yang dimaksud, dan;
- (3) Menerapkan pada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang diketemukan dan ditafsirkan demikian.

Ketiga langkah tersebut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam usaha untuk menyelesaikan perkara inilah, maka hakim membentuk hukum.

Menurut Bagir Manan¹¹⁸⁾, ada 4 (empat) prinsip yang harus dimiliki oleh hakim yaitu : (1) seorang hakim hendaknya tidak hanya memutuskan suatu perkara tetapi juga harus bisa menyelesaikannya; (2) putusan yang diambil harus bermutu; (3) seorang hakim harus memberi perhatian pada perkara yang ditanganinya; dan (4) hakim harus menguasai hukum acara.

Untuk melaksanakan tugasnya, hakim Indonesia mempunyai kebebasan yang cukup besar untuk membentuk hukum apabila ia tidak dapat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu perkara dalam hukum tertulis, yaitu "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" (Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970).

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan hakim, bahwa hakim sudah sejak lama melakukan terobosan-terobosan dengan mengenyampingkan undang-undang dengan membentuk norma baru yang dapat menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui beberapa putusan hakim, yaitu : (1) putusan hakim tentang pengangkatan anak perempuan untuk golongan asing Tionghoa. Hakim dalam memutus perkara ini

118) Bagir Manan, Sekilas Info, dalam Buku Jurnal Pusdiklat MARI, Volume I, No.3/2002, hal.56.

telah melakukan suatu terobosan dengan mengenyampingkan Undang-Undang Stb.129 Th.1907 tentang adopsi, dimana dalam undang-undang ini pengangkatan anak yang dibolehkan hanya pengangkatan anak terhadap anak laki-laki; (2) demikian pula dalam perkara pidana, putusan hakim dalam kasus BNI 46 cabang New York (putusan PN Jakarta Pusat No.135/X/Pid/B/1987). Dalam perkara ini hakim menafsirkan bahwa pengertian mengambil adalah termaksud menggunakan alat berupa komputer dan pengertian ingin memiliki terbukti dengan berpindahnya uang melalui transper dari rekening BNI 46 Cabang New York ke rekening terdakwa.

Menurut **penulis**, dalam kondisi tertentu tampak bahwa dengan kebebasan (**dalam hal tidak mendapat tekanan**), maka hakim dapat mengenyampingkan undang-undang maupun menafsirkan sesuai dengan keyakinan hakim dan dapat memenuhi tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya, hakim tidak hanya mendasarkan pada undang-undang tetapi juga harus melihat perkembangan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan normal hakim dapat saja memutuskan perkara sesuai dengan peraturan, akan tetapi bila hukum atau

undang-undang itu adalah produk kolonial maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undangnya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khusus dalam berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus menemukan hukum (*rechttvinding*) yang sesuai dengan kebutuhan jaman.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, hakim akan memutus apa hukum dan keadilannya dalam kasus yang dihadapinya. Akan tumbuh kaidah-kaidah baru berupa yurisprudensi yang merupakan sumber hukum dan dapat dijadikan bahan bagi pembuat undang-undang untuk menyempurnakan atau memperbaiki hukum nasional. Karena itulah tugas hakim menjadi lebih berat, karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan masyarakat kita. Ia merupakan penyambung rasa dan penyambung lidah dari rakyat di bidang hukum dan keadilan. Ia pula yang diharapkan oleh masyarakat menjadi benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam negara kita.

Jawaban atas harapan-harapan dan tugas yang diberikan kepada hakim itu, dapat terlihat melalui putusan hakim.

Melalui putusannya hakim harus dapat mempertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan (*yustitabelen*) khususnya, maupun masyarakat pada umumnya, bagaimana ia telah menetapkan hukum terhadap kejadian/peristiwa hukum tertentu. Selain memutus berdasarkan hukum, maka hakim sekaligus harus berdasarkan putusannya pada keadilan dan kebenaran. Putusan hakim yang baik harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yakni : memenuhi kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis. Yang dimaksud dengan kebutuhan teoritis adalah, bahwa menilik kepada isi beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum (*harus juridisch en filosofich verantwoord*). Bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi, dapat menjadi sumber hukum baru. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis, bahwa putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan persoalan/peristiwa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (dapat diterima secara sosiologis).¹¹⁹⁾ Dari sudut tinjauan yang tidak berbeda,

119) Poerwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum* (Jakarta, 1998), hal.80-83.

Adi Andoyo Soetjipto menguraikan pula mengenai tugas dan kewajiban hakim. Ia memberikan arahan bahwa agar para hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak ketinggalan jaman ia harus mengikuti perkembangan baru mengenai teori *rechtsvinding* yang lebih modern. Salah satu titik sentral dari aliran modern ini adalah bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran (*systeemdenken*), akan tetapi yang menjadi pangkal tolak adalah problem sosial yang harus diselesaikan (*probleemdenken*). Undang-undang bukanlah merupakan kitab yang penuh dengan kebenaran dan penyelesaian, yang setidak-tidaknya memerlukan penafsiran untuk penerapannya pada suatu situasi yang konkrit. Undang-undang lebih merupakan usulan atau acuan untuk memecahkan masalah, suatu pedoman untuk mengambil putusan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah. selain itu hakim memiliki otonomi (lawan dari heteronom : tunduk pada undang-undang). Dengan otonomi berarti bahwa para hakim memutus perkara menurut apresiasi pribadinya mengenai setiap kejadian, atas kekuasaan sendiri (*de rechter oordeelt naar zijn persoonlijke appreciatie van elk individueel geval eigenmachtig*).¹²⁰⁾ Contoh putusan badan peradilan yang telah menerapkan aliran penemuan hukum modern

120) Adi Andoyo Soetjipto, *Aliran Baru Mengenai Tugas Hakim Menemukan Hukum* (Jakarta, 1996), hal.1-3.

adalah putusan kasasi kasus terdakwa Mochtar Pakpahan yaitu Yurisprudensi MARI No. 395 K/Pid/1995. Dalam putusan tersebut memuat ajaran penafsiran yuridis sosiologis dengan dasar pertimbangan hukum yang mengandung aspirasi masyarakat yang saat itu tertekan oleh Pemerintah Orde Baru. Disini hakim mempunyai semangat yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga berhasil menciptakan iklim baru dalam sistem penegakan hukum pidana dengan menggunakan aspek sosiologis. Hal ini sebagai bukti adanya unsur perubahan dan dinamika pola pemikiran hakim dari legalitas normatif menuju kearah pandangan yuridis sosiologis. Perubahan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukumnya seperti di bawah ini¹²¹⁾ :

“Bahwa seharusnya dalam setiap keputusannya Hakim menerapkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan yang berpola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkrit yang harus diputus. Bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini, bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan. Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam jaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mereduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Bahkan pada dasarnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi

121) Varia Peradilan No.24 Tahun XI, Januari 1996, halaman 25-44.

pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan. Bahwa ...dst".

Putusan kasasi tersebut sesuai dengan kehidupan realitas sosial dan rasa keadilan masyarakat, sehingga menyelesaikan masalah sosial masyarakat secara konkrit yang memerlukan keputusannya.

Pada sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan ternyata hakim masih banyak menggunakan pola lama yaitu hanya menekankan pola pikir pada undang-undang saja dan sedikit hakim yang telah menerapkan pola pemikiran yang menggabungkan antara pola pikir pada sistem dan keputusan yang didasarkan pada masalah atau problem sosial.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat pula disebutkan bahwa kedudukan hakim sebagai penegak hukum lebih penting dan strategis dari penegak hukum lainnya, karena dialah yang akan mengambil keputusan. Penegak hukum lain baik penyidik maupun penuntut umum hanyalah menyiapkan bahan, tetapi yang menentukan tetaplah hakim.¹²²⁾ Oleh karena itu tidak berlebihan jika hakim dipandang seperti wakil Tuhan, karena merekalah yang dapat ikut menentukan nasib seseorang.¹²³⁾

122) Wawancara dengan informan Hakim Into Ammy Tanjung.

123) Wawancara dengan informan Hakim Baharudin Siagian.

Akan tetapi ternyata kedudukan ideal tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Kedudukan hakim sebagai benteng terakhir peradilan sampai saat ini masih terbatas sebagai harapan, belum dapat terwujud.¹²⁴⁾ Kedudukan hakim yang penting menurut undang-undang tersebut baru terbatas sebagai teori.¹²⁵⁾ Hal tersebut karena dalam penegakan hukum hakim masih dipengaruhi berbagai hal seperti misalnya kedudukan sosial ekonomi, pandangan hidup, moralitas dan integritas.¹²⁶⁾

Sedikit paparan tersebut di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein*, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan serta *das solen* kenyataan yang berbeda.

2. Aktualisasi Fungsi Hakim Terhadap Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum yang ideal dalam pemeriksaan perkara pidana pada prinsipnya bersinggungan dengan akuntabilitas peradilan. Sejauh ini cukup banyak alternatif yang diajukan untuk mengembangkan pola dasar yang cukup memadai bagi peningkatan kinerja praktisi peradilan dan sejauh ini hasilnya belum memuaskan. Misalnya saja sebuah survei yang dilakukan oleh

124) Wawancara partisipasi dengan Sugeng Riyadi, Pengacara di Semarang

125) Ibid.

126) Wawancara partisipasi dengan Sunarto, Pengacara di Semarang.

KOMPAS¹²⁷⁾ menggambarkan institusi hukum tetap rapuh sampai saat ini, tidak ada perbaikan berarti selama proses membangun hukum di Indonesia.

“Penantian tak berujung. Itulah ungkapan yang paling tepat bagi para pencari keadilan di negeri ini. Meskipun Indonesia telah mengeyam setengah abad lebih kemerdekaan, tetapi penegakan hukum dan keadilan belum juga terwujud di negeri yang sering meneriakkan slogan “negara hukum” ini.¹²⁸⁾

I.S.Susanto dalam wawancaranya dengan harian Suara Merdeka menegaskan, di Indonesia peradilan/pengadilan lebih mengedepankan ritual (*prosedur formal*) dari pada muatan-muatan substantif, sebagaimana dikatakan beliau :

” selama ini saya juga melihat pengadilan tidak mampu mengangkat isu keadilan seperti yang diharapkan masyarakat. Para hakim hanya memproses sebuah perkara secara formalitas saja, sehingga keputusannya pun hanya formal saja. Padahal yang diinginkan masyarakat adalah hal yang sangat substansial, bukan sekedar aturan formal.¹²⁹⁾

127) Lihat Kompas, Selasa 11 Desember 2001, hal.39. Survei tersebut menanyakan. Menurut anda, apa prestasi paling penting yang berhasil dicapai institusi penegakan hukum selama tahun 2001 ? Yang menjawab tidak ada sebanyak 68,1 %, yang menjawab tidak tahu 12,2 %. Yang menjawab adil dalam penanganan kasus 7,6 %. Menjawab pemberantasan KKN 5,9 %, yang menjawab peningkatan penertiban hukum 4,0 % dan yang menjawab transparansi dan independensi 2,2 %.

128) BI Purwantari, Institusi Hukum Tetap Rapuh, Kompas, Selasa 11 Desember 2001, hal.39.

129) Suara Merdeka, Jumat 6 Oktober 2000. Demikian pula sebagaimana digambarkan oleh Tarmidzi Taher dalam sebuah seminar, dikatakannya, bahwa semakin banyak masalah yang muncul sejak adanya istilah mafia peradilan, putusan hakim yang kontroversial, mahalnya biaya perkara, proses upaya hukum melalui peradilan berjalan lambat, petugas administrasi dan hakim yang tidak berdisiplin, misalnya waktu sidang yang molor, belum lagi tidak bebasnya peradilan karena campur tangan pihak luar dan banyak lagi. Tarmidzi Taher, Rakernas Mahkamah Agung, Yogyakarta, 8 Januari 1997, hal.69 Himpunan Rakernas Mahkamah Agung.

Di Pengadilan pemeriksaan perkara pidana berlangsung dalam konteks dan relasi yang berpengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan. Adanya perkara titipan (dari hakim lain) atau instruksi khusus dari Ketua Pengadilan dan lembaga lebih tinggi merupakan contoh kecil dari sekian banyak peristiwa yang patut kita perhatikan.

"Selama saya menjadi Hakim, ada beberapa perkara yang dititipkan oleh hakim lain, bahkan ada yang mencoba datang kepada saya untuk memohon agar perkaranya dimenangkan, kadang-kadang agak sulit memang mengatasi persoalan itu, tapi itu persoalan pribadi dan jarang dibicarakan..."¹³⁰⁾

Aparatur peradilan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara, efeknya kecenderungan tidak netral tidak dapat dihindarkan. Pemeriksaan menunjuk kepada pelayanan status, dan biasanya memihak status lebih tinggi atau lebih berbobot materinya, dibandingkan status lebih rendah dan kering bobot materinya. Orientasi pada status ini berbau feodalisme dan secara tidak langsung ikut menciptakan kelas atau kasta dalam peradilan pidana. Perlakuan demikian merupakan sikap diskriminatif dan akhirnya melahirkan perlakuan berbeda terhadap segmen masyarakat tertentu.

130) Hasil wawancara tidak terstruktur dengan informan mantan Hakim Pengadilan Negeri.

Bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, terutama mereka yang memerlukan bantuan hukum, mengalami hal yang sama. Dunia **advokasi** (kepengacaraan) ikut menciptakan situasi yang mengarah kepada pembentukan kelas sosial, melalui seleksi ketat terhadap perkara, pelayanan/fasilitas yang ditentukan oleh kemampuan atau status klien. Singkatnya, ada seleksi kelas (disadari atau tidak) dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana uraian sebagai berikut.

"cepat atau tidaknya pelayanan, memuaskan atau tidak bantuan yang diberikan dipengaruhi oleh seberapa jauh klien mampu membayar, klien menjadi seorang raja yang bisa memiliki akses sampai mengatur proses persidangan, misalnya untuk kasus penipuan, pemanggilan pengadilan di atur sedemikian rupa sehingga limit waktunya bisa diperpendek, dan proses pemeriksaan di Pengadilan berlangsung lebih singkat".¹³¹⁾

Fenomena demikian kembali terjadi dalam dunia **advokasi** (kepengacaraan). sebagai contoh klien yang datang kepada praktisi hukum (pengacara) untuk meminta bantuan hukum memperoleh pelayanan yang tidak semestinya, pembujukan terselubung, ditakut-takuti dengan harapan memperoleh keuntungan yaitu agar klien menyerahkan perkara kepadanya atau mengharapkan imbalan dengan memberikan janji-janji tertentu.

131) Wawancara tidak tersruktur dengan informan seorang pengacara yang sering berpraktek di Pengadilan Negeri Semarang.

"Hal itu dapat ditunjukkan melalui hasil penelitian bahwa X datang kepada Y (pengacara) meminta pendapat sehubungan dengan perkara penipuan yang dituduhkan kepada X. Y (pengacara) memberikan pendapat bahwa kalau begini keadaan sudah gawat, sebaiknya bapak menyediakan uang dua puluh juta. Kalau uangnya sudah siap, biar saya saja mengurusnya, saya janji persoalannya akan segera beres".¹³²⁾

Pelayanan keadilan yang didasarkan pada status, kemampuan ekonomi, kepentingan dan pertemanan dijalin berulang-ulang membentuk siklus bahkan kultur penyelesaian perkara. Muncul beberapa istilah misalnya pengacara "bos" dan pengacara "kere", kasus "proyek" dan "kerjabakti" beberapa istilah yang mencerminkan fenomena di atas. Istilah tersebut bukan istilah baku, namun sering muncul dalam senda gurau atau jokes (lelucon) praktisi peradilan, hakim, jaksa bahkan tersangka.

Menurut penulis, tentu tidak ada prasangka bahwa aparat penegak hukum seluruhnya berperilaku buruk, tetapi masih ada hakim yang menunjukkan kredibilitas tinggi, integritas serta kemampuan manajerial yang baik yang bisa dijadikan teladan dan apabila dioptimalkan maka penciptaan kultur yang lebih positif bisa dicapai. Misalnya dalam perjalanan karier Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita yang konon meninggalnya akibat mempertahankan-

132) Pengakuan seorang terdakwa yang dicatat, terdakwa tersebut tidak mampu menyediakan uang sejumlah dua puluh juta sehingga memutuskan untuk tidak menggunakan pengacara.

kan keteguhan hatinya untuk menempatkan hukum sebagai sesuatu yang *supreme*. Tentu tidak saja membawa mereka dan kredibilitas organisasinya, tetapi penilaian publik.

Sikap diskriminatif tidak terlihat dipermukaan terutama dalam tatanan norma (undang-undang) namun bisa dipahami dengan melihat perilaku dan tindakan aparaturnya melalui konteks (relasi dan interaksi) tahapan pemeriksaan. Kepolisian dan Kejaksaan dapat menggunakan ancaman dalam berbagai bentuk terhadap tersangka atau mereka yang diperiksa di tingkat penyidikan. Dimulai dari pemanggilan, pencantuman sebagai tersangka, terdakwa, tanya-jawab disertai bentakan, waktu pemeriksaan yang molor dan berlarut-larut, sampai kepada kewenangan untuk melakukan "penahanan", bahkan "rekayasa perkara". Sulit membedakan "yang seharusnya" dengan "sesuatu yang pasti". Interaksi tatap muka melalui surat panggilan (perintah) resmi memberikan keuntungan efektif bagi kinerja, membentuk *image* bahwa tahap penyidikan merupakan tindakan aparaturnya di belakang meja (kepolisian dan Kejaksaan). Kepolisian dan Kejaksaan melihat perilaku yang disidik terbuka sedemikian rupa, memberikan peluang untuk melakukan berbagai tindakan, mempengaruhi tersangka, menguasai dan memutar balikkan fakta selama mereka diperiksa. Sementara yang disidik akan selalu

berada pada posisi tertekan. Kondisi demikian sangat ditentukan oleh kemampuan tersangka (dan kuasa hukumnya) untuk menyesuaikan diri, kedudukan, hubungan baik dan tingkat ekonomi. Hal serupa terjadi di Kejaksaan, namun sedikit berbeda di Pengadilan karena sifatnya lebih terbuka (publik bisa melihat secara langsung) maka perlakuan tertentu terhadap tersangka/terdakwa (dengan atau tanpa kuasa hukum) berlangsung lebih halus, komunikasi antara hakim, jaksa dan pengacara akan menentukan nasib terdakwa. Namun secara keseluruhan dari proses tersebut ditentukan di belakang layar.

Pada posisi tertentu kekerasan sering muncul dalam setiap proses pemeriksaan, bahkan intensitasnya bisa menjadi lebih tinggi. Terbatasnya pilihan penyelesaian yang disediakan serta sifat formalistik dan otoriter aparaturnya (menguasai dan mendominasi) terhadap golongan kecil, sikap memilih-milih (diskriminatif) merupakan persoalan utama. Kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang sangat spesifik, halus, tidak terasa sampai kepada bentuk kekerasan fisik yang bisa menimbulkan cacat permanen. Perilaku yang tidak dibenarkan menurut aturan, tetapi selalu ada dalam proses pemeriksaan.

"Seorang tersangka dalam perkara pencurian mengungkapkan pengalamannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, "selama saya ditahan, saya mengalami banyak siksaan fisik". Suatu hari tangan saya diikat keatas (digantung) dengan menggunakan tali plastik, kepala ditutupi kantong plastik, kemudian kepala dan badan dipukul dan ditendang. Saya hanya bisa menjerit kesakitan, tetapi tidak bisa minta tolong. Kadang-kadang sambil memukuli dan menendang, mereka berbicara "enak ya..rasain lu". Hal demikian adalah pengalaman rutin yang saya alami setiap malam selama saya ditahan.¹³³⁾

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan hakim, bahwa terkadang dalam suatu perkara cenderung dipaksakan. Oleh penyidik tersangka dituduh melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana di atur dalam pasal 372 KUHP namun dalam persidangan terungkap fakta bahwa tersangka tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang dituduhkan (karena persoalannya ternyata adalah perdata murni yaitu hibah dengan otentik) dan secara meyakinkan terdakwa menunjukkan bukti akurat, sehingga pengadilan harus membebaskan terdakwa. Ternyata kemudian terungkap bahwa pelapor memiliki hubungan khusus (istimewa) dengan atasan penyidik.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pada tingkat penyidikan benturan kepentingan antara profesionalisme dan ketaatan pada sistem atau atasan tidak dapat

133) Hasil penelitian partisipasi disertai wawancara tidak terstruktur dengan salah seorang tersangka.

dihindarkan. Misalnya, dalam melaksanakan tugas penyidikan polisi mengalami tekanan dari atasannya untuk menyelesaikan perkara tertentu. Alternatif lain adanya tawaran yang sulit ditolak, datang dari tersangka, dari orang yang memiliki kedekatan atau hubungan tertentu. Timbulnya konflik kepentingan dan pilihan tugas antara melaksanakan perintah atau bertindak profesional, dengan menerima tawaran tidak dapat dihindarkan.

Dalam hal ini penyidik menggunakan otoritas dan kekuasaan, kemudian menjadi pilihan yang banyak digunakan yaitu "kemampuan menyelesaikan secara paksa berbagai persoalan". Bahasa umum yang digunakan dalam prosedur ini adalah "saya akan berusaha membantu anda sedapat mungkin", "kita sudah biasa menangani perkara seperti ini", dan lain sebagainya. Teknik ini dinilai efektif dan sering dipergunakan di lembaga lain selain Kepolisian dalam mekanisme peradilan.

Pada tahapan pemeriksaan di Kejaksaan, setiap perkara yang ditugaskan kepada seorang jaksa memiliki beban sangat berat, baik psikologis, organisatoris, maupun yuridis. Jaksa harus memenangkan setiap perkara yang ditanganinya, hal itu berkorelasi dengan hukuman dan imbalan (*punish and reward*) yang akan diperoleh,

kemenangan merupakan ukuran sukses atau tidaknya karier jaksa.

"Bagi saya menuntut adalah tugas utama, tujuan akhirnya menang di Pengadilan, kalau terdakwa sampai lepas, ya ... kita kalah ... konduite dan prestasi kerja dianggap buruk dan ujungnya, jarang diberi perkara, kalau sudah begitu karier bisa macet ... memang pilihan sulit".¹³⁴⁾

Fenomena kekerasan muncul dalam berbagai bentuk dan simbol tertentu, hakim yang bertanya dengan nada marah atau membentak tersangka, arogansi kewenangan yang cenderung otoriter, atau aparat keamanan dengan persenjataan lengkap mengawal tersangka masuk ke persidangan. Termasuk eksekusi putusan pengadilan memiliki nuansa kekerasan karena praktek dominasi (pemaksaan kekuasaan dengan kekerasan), putusan kurang mampu meyakinkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, dipicu oleh adanya resistensi pembangunan yang dilakukan oleh negara (pemerintah).¹³⁵⁾ Muncul protes, kekerasan dilawan kekerasan.

Dari gambaran tersebut di atas, maka tujuan peradilan untuk mencari kebenaran materiil tidak terwujud. Bahkan di sisi lain penasehat hukum sering menggunakan hak pada dasarnya kurang menguntungkan bagi

134) Wawancara tidak tersuktur dengan salah seorang Jaksa yang sudah hampir 20 tahun berperaktek di Pengadilan.

135) Alexander Irwan dan Edriana, Pemilu Penyelenggara Asas LUBER, Hegemoni tak sampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal.11.

kepentingan terdakwa, misalnya pengajuan eksepsi bersifat untung-untungan. Eksepsi diajukan hanya untuk memenuhi prosedur dan memperoleh penilaian (dari tersangka) bahwa pengacara sudah bekerja sungguh-sungguh, namun apakah itu sungguh-sungguh, masih dipertanyakan.

Peradilan pidana yang melibatkan sistem administrasi keadilan tidak terpisahkan dari kondisi demikian, bahwa dibalik struktur modernnya peradilan masih membawa nilai-nilai budaya patrimonial ataupun paternalistik dari budaya masyarakat tradisional. Jenis masyarakat ini disebut dengan masyarakat prismatic, yang merupakan masyarakat sedang bertransisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.¹³⁶⁾ Dalam model ini individu-individu dan golongan yang memiliki kekuasaan melakukan pengawasan dengan otoritas jabatannya untuk kepentingan ekonomi dan politik. Hubungan dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut : pertama, pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi atau politik; kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; ketiga, pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun administrasi,

136) Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries : The theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1964, yang disitir oleh Denny B.C. Hariandja, *Birokrasi nan Pangah*, hal.55. Belajar dari Kegagalan Orde Baru, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi; keempat, setiap tindakan di dasarkan oleh hubungan pribadi dan politik. Kondisi tersebut pada gilirannya membentuk perilaku aparat yang cenderung menghamba pada kekuasaan, seperti yang tampak pada prinsip "asal Bapak senang" dalam kerja aparat birokrasi. Selain itu, pola hubungan yang diikat dengan tali genealogis dan ikatan merit-system atau yang lebih dikenal dengan sebutan nepotisme, yang tidak berhenti pada arah hubungan organisasional melainkan melebar pada pola hubungan patron-klien antara aparatur hukum dalam pembagian keuntungan dari pemanfaatan jabatan.

Korupsi, kolusi merupakan refleksi dari ciri tersebut, yang melibatkan unsur imbalan materiil dari klien atas perlindungan sebagai replika modern dari budaya upeti yang menjadi konsekuensi dari cara memandang jabatan dan kedudukan sebagai sumber-sumber kekayaan. Model dari sistem ini biasanya sangat mengutamakan harmoni dan stabilitas sebagai pengukuhan status quo. Kecenderungan establish membuat kekuasaan menolak setiap bentuk perubahan yang ditawarkan. Harmoni demikian disucikan dan konflik selalu berarti negatif serta kemaksiatan. Kekuasaan selalu mengidentifikasikan dirinya dengan lambang, simbol, yang keduanya sudah

direligiofikasi sedemikian rupa hingga tidak perlu diperdebatkan. Klaim kebenaran menjadi hak atasan, sedangkan bawahan ditempatkan dalam posisi sendiko dawuh.¹³⁷⁾

Pada tahapan pemeriksaan (seluruh tahapan) akan sia-sia mengharapkan bahwa perilaku kekerasan dapat dihilangkan, namun patut dipertimbangkan mengenai solusi yang menyatakan bahwa pengawasan dapat mempengaruhi perilaku kekerasan. Ada batasan yang jelas bahwa tindak kekerasan dapat ditolerir dalam batas-batas tertentu. Bagaimanapun juga pengungkapan kejahatan masih cukup efektif melalui cara ini. Dan sepanjang itu mendapat persetujuan kelompok maka proses demikian berlangsung terus.

Menurut **Muladi**¹³⁸⁾, hal lain yang penting dalam penegakan hukum pidana (terlebih di era reformasi sekarang ini) adalah harus adanya persamaan persepsi terutama bagi jajaran aparat hukum. Persamaan persepsi tersebut mengarah pada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang bertujuan untuk menghindari mekanisme kerja aparat penegak hukum yang seakan-akan terpisah yang berorientasi pada sektoral instansinya saja. Seperti penyidikan seakan-

137) Djoko Suryo, Feodalisme; Timur dan Barat, dalam Prisma 8/1991, LP3FS, Jakarta, hal.53.

138) Kompas, 29 Januari 1994.

akan hanya bertanggungjawab pada penyidikannya saja tanpa memperdulikan bagaimana proses perkara berikutnya, demikian pula penuntut umum yang hanya berpandangan sempit pada lingkup tugasnya saja, sehingga bagaimana prosesnya perkara itu bergantung sepenuhnya pada pengadilan.

Lebih lanjut menurut **Muladi**, kurang terpadunya kerja sama antara penegak hukum itulah yang antara lain menimbulkan banyaknya kasus mengambang (*floating cases*) lantaran berkas perkaranya sering mondar-mandir antara Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga penanganan kasus menjadi berlarut-larut¹³⁹⁾ .

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa berbagai hambatan penegakan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana, pada dasarnya antara lain meliputi distorsi komunikasi, lemahnya fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal, kultur dan struktur peradilan yang kurang mendukung, serta lemahnya penegakan etik dan terakhir perlunya pembenahan substansi hukum. Peta ini menjelaskan persoalan cukup luas sekaligus spesifik, bersangkut paut dengan berbagai standar perilaku diluar dan didalam tugas, juga menyangkut persoalan pengawasan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan.

139) Ibid.

Menurut **Bagir Manan**¹⁴⁰⁾, Membangun supremasi hukum merupakan salah satu sendi dan sekaligus tujuan reformamsi. paling tidak ada dua unsur penting supremamsi hukum, yaitu : (1) hukum dijunjung dan ditempatkan sebagai yang menentukan (penentu) bentuk dan cara melakukan hubungan atau peristiwa hukum beserta segala akibat yang timbul dari hubungan atau suatu peristiwa hukum, dan (2) supremamsi hukum menuntut "ketundukan pada hukum".

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden hakim, bahwa sekarang tekanan publik yang berlebihan itu diyakini sangat mengganggu upaya penegakan hukum, beberapa hakim harus mengeluarkan keputusan tertentu akibat tekanan publik yang berlebihan dan dikhawatirkan akan merusak independensi para hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Upaya memulihkan sistem peradilan yang sehat tidak dapat terselenggara dengan cepat apabila masyarakat yang berurusan dengan pengadilan "menghalalkan segala cara" untuk memenangkan suatu perkara. Bagi orang-orang tertentu berperkara di pengadilan bukan untuk menemukan dan memperoleh keadilan melainkan sekedar memenangkan perkara. Dibarengi oleh tingkah laku aparat peradilan

140) Bagir Manan, Membangun Citra Peradilan yang Bermartabat dan Dihormati, dalam Jurnal Pusdiklat MARI, Volume I Nomor 1/2002, hal.8.

tertentu yang mudah tergoda atau mempunyai watak amoral di tambah dengan kepentingan dari pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara, akan menjadi lahan subur bagi segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang memperihatinkan itu. Mungkin ada pula semacam keterpaksaan, karena palu kekuasaan hakim yang begitu kuat bahkan absolut menekan pencari kebenaran dan keadilan dan menundukkan mereka sehingga terseret yang menyebabkan dunia peradilan menjadi kelabu.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden hakim bahwa untuk menghindari terjadinya mafia peradilan dan peradilan yang diselenggarakan dengan serba rekayasa sebagaimana berbagai pandangan/pendapat umum, maka Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/039/SK/III/2002 tanggal 6 Maret 2002 telah mengeluarkan larangan bagi hakim menerima tamu yang bersangkutan dengan perkara.

Menurut **Bagir Manan**¹⁴¹⁾, Kehendak dan tekad bahwa untuk membangun dan menyelenggarakan peradilan yang sehat hanya akan terwujud dalam satu hubungan timbal balik antara lingkungan peradilan dan lingkungan masyarakat. Peradilan bukan sekedar institusi kenegaraan (*state institution*) tetapi harus dilihat pula sebagai

141) Ibid.

institusi sosial (*social institution*). Dapat terjadi, sistem peradilan yang tidak sehat bukan semata-mata mencerminkan suasana internal peradilan yang tidak sehat tetapi dapat pula terjadi peradilan yang tidak sehat merupakan cermin bahkan akibat perikehidupan kenegaraan dan kehidupan sosial yang tidak sehat. Kalau yang terakhir ini terjadi, maka peradilan yang tidak sehat adalah merupakan "bayang-bayang gelap" dari tidak sehatnya kehidupan kenegaraan atau kehidupan sosial kita secara keseluruhan.

Lebih lanjut dikatakan oleh **Bagir Manan**, bahwa dalam konsep teori atau wacana tuntutan ketundukan pada hukum lebih ditujukan kepada penyelenggara atau pemegang kekuasaan (*the ruling power*), karena seperti diutarakan oleh Montesquieu "berbagai pengalaman atau kenyataan secara ajeg menunjukkan setiap orang yang memegang kekuasaan dan menjalankan kekuasaan itu tanpa batas". Dalam ungkapan yang lebih populer dari Lord Acton menyebutkan : "*power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely*". Tetapi pandangan yang menekankan pada ketundukan penyelenggara kekuasaan terhadap hukum belum menjamin sepenuhnya perwujudan supremasi hukum. Hukum menurut pandangan ini lebih ditinjau sebagai fenomena kekuasaan (*power phenomena*). Hukum bukan

semata-mata fenomena kekuasaan, hukum adalah juga sebagai fenomena sosial (*social phenomena*), seperti diungkapkan Cicero : "*ubi sciets ibi ius*". Dalam kaitan ketundukan pada hukum, dapat disimpulkan pula bukanlah semata-mata penyelenggara kekuasaan yang harus tunduk pada hukum. Sama pentingnya yaitu keharusan setiap anggota masyarakat tunduk pada hukum. Hanya dengan itu supremasi hukum akan menjadi realitas sosial bukan sekedar tuntutan normatif.

Dalam pemeriksaan pidana harapan masing-masing pihak digantungkan kepada fakta yang terungkap, aturan yang berlaku, keadaan selama proses persidangan dan putusan hakim, yang akhirnya hanya menunjuk kepada tersangka bersalah atau tidak bersalah.

Tahapan pemeriksaan tidak berhenti pada putusan pengadilan negeri, kecuali apabila terdakwa atau jaksa menerima putusan hakim. Apabila jaksa atau terdakwa tidak menerima putusan hakim tingkat pertama, maka terdakwa atau jaksa masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, yaitu ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pada proses banding, kasasi atau peninjauan kembali intensitas interaksi (tatap muka) mengalami perubahan, pada pemeriksaan perkara di pengadilan negeri intensitas

interaksi (tatap muka) cukup tinggi. Masyarakat dan media ikut mengamati langsung proses pemeriksaan. Akan tetapi berbeda pada pemeriksaan banding, meski dimungkinkan pemeriksaan ulang fakta-fakta akan tetapi sejauh ini jarang dilakukan, demikian pula dalam pemeriksaan tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Kontrol berlangsung melalui instrumen tertulis, interaksi tatap muka semakin berkurang. Berbeda apabila mekanisme kontrol dilihat melalui aturan normatif (undang-undang), Mahkamah Agung berada pada fungsi tertinggi untuk mengawasi pengadilan di bawahnya, hal ini disebut sebagai fungsi khusus Mahkamah Agung yang bersifat administratif.¹⁴²⁾

Menurut aturan normatif (undang-undang) menempatkan Mahkamah Agung sebagai kontrol tertinggi, sementara dari sudut pandang realitas sosial pengadilan negeri merupakan gerbang kontrol utama. Namun sampai saat ini Mahkamah Agung belum mampu menjadi "gerbang terakhir" keadilan. Kebijakan penyelesaian masalah jumlah perkara yang bertumpuk merupakan persoalan tidak terpecahkan dan berkelanjutan dari satu era ke era lainnya, yang lebih mencolok tidak hanya dari pergantian rezim orde lama ke orde baru tetapi cukup menonjol di era reformasi.

142) Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal.133.

Menurut Danny Zacharias, penumpukan perkara tidak begitu menjadi masalah pada dekade 1966-1974, atas dasar itulah kinerja MARI dalam periode delapan tahun tersebut dinamakan sebagai *era of establishment*, setelah tahun 1974 MARI mulai memasuki masa kegelapan dalam pemberian keadilan (*dark ages in justice dispenser function*) sampai era reformasi, sehingga tak begitu salah apabila dikatakan semacam masa bencana pemberian keadilan (*era of disaster in justice dispenser functioning*).¹⁴³⁾

Masih segar dalam pikiran, yaitu Kasus Tommy Soeharto, sebagai skandal terburuk di dunia peradilan tahun 2000. Oleh karena itu penting dipahami bahwa, "*The law not only missed the boat, but was also left floundering in the wake of All Legal cases getaway*".¹⁴⁴⁾

143) Ulasan bedah buku, Kinerja MARI dalam Pemberian Keadilan (mampukah MARI keluar dari masa kegelapan dan bencana berkelanjutan), dalam buku Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung, ibid, hal.xviii. Danny Zacharias adalah Dekan Fakultas Hukum UKSW Salatiga.

144) Achmad Ali, Sekapur Sirih, sebagai pengantar Ketua Mahkamah Agung RI dalam bukunya Henry P. Panggabean, ibid, hal.xi. Dikatakan : "Bagi yang mengkaji ilmu hukum tentunya mengetahui bahwa pemidanaan (penghukuman secara legal di bidang hukum pidana) mempunyai sejumlah tujuan, seperti menakut-nakuti warga masyarakat luas agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya, merehabilitasi si pelaku agar mampu menjadi "manusia baru" setelah usai menjalani hukumannya. Dalam kenyataannya, tujuan pemidanaan inipun banyak yang tidak mampu diwujudkan karena vonis pengadilan yang sering dijatukan oleh pengadilan, sama sekali kontras dengan "rasa keadilan masyarakat". tuntutan bebas dan putusan bebas untuk terdakwa kasus korupsi misalnya, jelas sangat melukai "rasa keadilan" masyarakat. dampak langsung dari fenomena itu adalah membawa warga masyarakat membuat bentuk sosial kontrol sendiri dengan cara-cara kekerasan seperti perilaku kekerasan dalam bentuk penganiayaan, pembunuhan, dan perusakan barang.

Melihat kondisi di atas, posisi pengadilan negeri menjadi strategis sebagai benteng terakhir, artinya putusan hakim ditingkat ini harus benar-benar memperhatikan keadilan, bukan putusan asal-asalan dengan pertimbangan ada koreksi dari pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam usaha memberikan solusi terhadap tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan perilaku aparat peradilan i.c. hakim agar berperilaku sesuai dengan standar yang sudah ditentukan baik di dalam maupun diluar tugas. Persoalan ini memiliki keterkaitan cukup penting dalam usaha menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

B. PERSEPSI DAN SIKAP HAKIM TERHADAP TUNTUTAN REFORMASI HUKUM PIDANA

Pembahasan mengenai persepsi dan sikap hakim terhadap tuntutan reformasi hukum pidana akan diawali dengan mengutip pendapat **Satjipto Rahardjo** mengenai pentingnya faktor manusia. Dalam pembahasan mengenai masalah penegakan hukum beliau menguraikan, bahwa dalam pembicaraan tentang penegakan hukum, juga tentang badan pengadilan seperti sekarang ini, peranan manusia yang

menjalankannya, dalam hal ini hakim, selalu meminta perhatian.¹⁴⁵⁾

Sudah dikemukakan di muka bahwa reformasi hukum meliputi komponen-komponen yang membentuk suatu sistem hukum yang meliputi substansi hukum (*legal Substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dari ketiga komponen dasar sistem tersebut, maka faktor penegak hukum dalam hal ini faktor manusianya menjadi penting dan merupakan hal yang sangat sentral dalam penegakan hukum pidana.

Hal demikian di sampaikan juga oleh Herman Mannheim dalam bukunya "*Criminal Justice and Social reconstruction*", yang di kutip oleh Andi Hamzah mengatakan : "*it is not the formula that dicides the issue but the men who have apply the formula*". Baik buruknya hasil dari penegakan hukum itu tidak tergantung pada baiknya hukum/perundang-undangan, walaupun perundang-undangan sangat baik, namun apabila para penegaknya berwatak jelek, maka hasilnya akan jelek juga¹⁴⁶⁾ .

145) Satjipto Rahardjo, Penegekan Hukum : Suatu Tinjaun Sosiologis (Jakarta, 1983), hal.77.

146) Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selektu Hukum Pidana, BP UNDIP, Semarang, 2001, hal. 57.

Menurut **Tb. Rony Nitibaskara**, pentingnya faktor manusia pribadi hakim karena bagaimanapun, antara hukum dan hakim senantiasa ada jarak, karena keduanya memang berbeda. Oleh karena itu setiap tindakan hakim dalam memutus perkara, senantiasa merupakan tafsir hakim atas hukum. Karena merupakan tafsir, maka faktor yang paling dominan dalam jatuhnya suatu putusan adalah pribadi hakim.¹⁴⁶⁾ Hal demikian berhubungan erat dengan pendapat **Weber**, bahwa tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup dikepala manusia pelakunya.¹⁴⁷⁾

Jadi ada sejumlah pengertian batasan-batasan atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang terekspresi secara eksplisit. Karena demikian halnya maka realitas itu bersifat subyektif interpretatif dan itulah fenomena yang tampak kalau kita mau menghayatinya.¹⁴⁸⁾

146) **Tb. Ronny Nitibaskara**, "Judicial Crime", Kompas, 29 Maret 2000, hal.4.

147) Pendapat **Weber** tersebut dalam buku **Sanapiah Faisal**, Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi (Malang, YA3, 1990), hal.13.

148) *Ibid*, hal.13.

Untuk mendapatkan persepsi¹⁴⁹⁾ diperlukan makna-makna yang dijadikan acuan dan diinterpretasikan oleh seseorang yang diperoleh dan dikembangkan melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bahwa makna-makna tersebut dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia. Dengan demikian maka dengan mengacu pada arti pentingnya rasa keadilan diperoleh persepsi terhadap tuntutan reformasi hukum pidana serta perkembangan hukum pidana sebagai makna hasil interaksi antara hakim dalam lingkungan bekerjanya.

Berkaitan dengan faktor manusia, yakni pribadi hakim ini, Satjipto Rahardjo lebih lanjut menguraikan, yang dimaksud dengan faktor manusia adalah faktor latar belakang perorangan, pendidikannya, serta keadaan-keadaan konkrit yang dihadapinya pada waktu akan membuat suatu keputusan. Untuk itu di bawah ini akan di bahas sebagai berikut :

1. Latar belakang Kepribadian.

Kepribadian merupakan totalitas kemampuan menyerasikan diri manusia pada keteraturan sosial budaya

149) Menurut J.S. Rouck, Pengendalian Sosial, Disadur : Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), hal.22. Proses menyadari adanya hal-hal itu dan memberikan suatu tanggapan, lazim disebut persepsi. Kesadaran ini diperoleh berkat penggunaan panca indera manusia. Akan tetapi sarana sensoris manusia saja tidak menjelaskan proses pemahaman. Panca indera hanya merupakan alat fisik yang menerima kesan terhadap obyek yang dijumpai manusia dalam kehidupan sehari-hari.

tempat dia hidup, yang diperolehnya berkat perjalanan sosialnya. Perkembangannya tergantung pada komunikasi dengan mana nilai-nilai kebudayaan suatu kelompok ditransmisikan kepada pribadi-pribadi.

Pengalaman sosial dari masing-masing hakim berbeda dalam kehidupannya. Masing-masing pengalaman dalam pribadi hakim tersebut akan membentuk pola berpikir hakim dalam menghadapi setiap persoalan yang diekspresikan dalam persepsi hakim, dengan memandang bahwa tuntutan reformasi hukum pidana merupakan suatu faktor tekanan sosial. Dalam proses sosial sebagai hakim tidak lepas dari bagian pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam menjalankan peranannya itu hakim merupakan :

- a. Pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat.
- b. Hasil pembinaan masyarakat atau yang lazim disebut sosialisasi.
- c. sasaran pengaruh lingkungannya.¹⁵⁰⁾

Dari kutipan pandangan **Satjipto Rahardjo** tersebut dapat dikristalkan bahwa faktor pribadi hakim sangat dominan dalam penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar pribadi hakim tersebut. Faktor pribadi hakim tersebut akan tercermin dalam

150) Satjipto Rahardjo, Op.cit., hal.79.

persepsi dan sikapnya terhadap satu permasalahan. Dikaitkan dengan tuntutan reformasi hukum pidana maka persepsi dan sikap hakim sebagai cerminan kepribadian hakim tidak dapat dilepaskan pula dari latar belakang kondisi sosial masyarakat.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil hubungan antara hakim dan latar belakangnya serta pengaruh pada diri hakim yang membentuk persepsi hakim dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan hukum pidana untuk menjawab tuntutan reformasi hukum pidana. Hasil kajian tersebut adalah :

- (1). Adanya mobilitas geografis (keseluruhan responden hakim melakukan tugasnya di luar daerah dari tempat mereka dilahirkan).
- (2). Keseluruhan dari responden hakim berasal dari keluarga taat beragama.
- (3). Tiga dari responden berasal dari lingkungan keluarga pegawai negeri.

Keberadaan latar belakang diri hakim adalah sebagai rangsangan yang memberi makna melalui penalaran, pengenalan ataupun perasaan untuk membentuk persepsi sehingga membangun kesan, penilaian atau pengertian. Karena latar belakang dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi berarti terdapat makna intrerpretasi yang

bersifat subyektif yang mengakibatkan persepsi antara informan satu dengan lainnya berbeda.

2. Pendidikan.

Pendidikan sebagai salah satu unsur dalam proses sosialisai seorang hakim akan menentukan kerangka berpikirnya dalam mengambil keputusan. Konsep-konsep tentang hukum, tentang asas-asas dalam hukum, tentang metode pengambilan keputusan dan sebagainya merupakan kekayaan yang tersimpan di dalam diri seorang hakim dan merupakan kerangka berpikirnya dalam mengambil keputusan.

Pendidikan hukum yang telah dicapai rata-rata responden hakim adalah sarjana hukum (strata satu) dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, dan tiga diantaranya sedang menempuh program pendidikan Strata Dua (S.2) di Indonesia dalam kajian yang sama (*Business Law*). Selain itu pada umumnya terdiri dari hakim-hakim senior dan berpengalaman dengan masa bhakti telah lebih dari duapuluh tahun.

Dalam hubungan antara pendidikan yang ada pada responden tersebut¹⁵¹⁾ diperoleh kesimpulan bahwa pola pikir tentang persoalan tuntutan reformasi hukum pidana adalah tidak hanya secara normatif saja yaitu dengan

151) Hakim-hakim yang menempuh Strata Dua (S.2). Hakim dengan pendidikan tambahan tersebut tentu memiliki penguasaan dan wawasan keilmuan yang lebih dibandingkan dengan hakim-hakim lain.

menganalisa secara menyeluruh yang tidak terbatas pada hukum yang berlaku akan tetapi melalui kajian dari berbagai disiplin ilmu serta fakta hukum yang dihadapi (*law in action*). Sehingga dari mereka diperoleh kesimpulan pendirian yang tegas dan kukuh serta merupakan seorang yang bersifat mandiri dengan berpikir sesuai dengan pranata yang ada. Sedangkan responden lainnya ternyata masih berpikir normatif saja karena ketentuan undang-undang sebagai landasan penyelesaian persoalan hukum.

Dari hasil penelitian menurut informan **Baharudin Siagian**, hakim-hakim yang demikian lebih peka menghadapi permasalahan dan tuntutan keadilan dari masyarakatnya. Hasil riset ini menunjukkan hakim-hakim yang memperoleh pendidikan tambahan memiliki penguasaan dan wawasan keilmuan yang lebih sehingga mempunyai pandangan yang responsif terhadap masalah reformasi hukum pidana yang merupakan tuntutan masyarakatnya.

3. Kondisi keberadaan Hakim.

Seorang hakim menempati kedudukan tertentu dalam masyarakat yang telah ditetapkan oleh pola interaksi yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan oleh seorang hakim tidak dapat ditentukannya sendiri secara penuh, melainkan sangat

ditentukan pula pada tata nilai dan susunan masyarakatnya, yang oleh **Talcott Parsons** dan **Julius Stone** disebutkan adanya *expected reations* yang datangnnya dari masyarakat.¹⁵²⁾

Tugas-tugas dan pekerjaan sehari-harinya harus dijalankan oleh seorang hakim dilingkungi oleh harapan-harapan serta tuntutan-tuntutan para anggota masyarakat yang diorganisasi di sekitar tugas-tugas hakim tersebut. Disini hakim merupakan bagian dari realitas kehidupan sosial yang tidak menempatkan hakim dalam kebebasan. Secara yuridis formal hakim dijamin dengan kebebasan dan kemendiriannya dalam hal memberikan putusan. Namun apabila tindakan tersebut dikaitkan pada kehidupan sosial yang lebih besar melingkupinya, maka peranan yang dimainkan hakim ditentukan oleh adanya beban pengaruh, berupa tuntutan dan harapan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Dan apabila hal demikian terjadi maka hakim menjadi tidak mandiri lagi dalam menggunakan kebebasan akan tetapi dituntut kepekaan atas dinamika masyarakat.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan hakim, mereka berpandangan bahwa tuntutan reformasi hukum pidana perlu dipertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Faktor-faktor yang

152) Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung, Sinar Baru), hal.84.

mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut adalah, sebagai berikut :

- (a) bahwa kita ketahui hukum pidana yang kita gunakan sekarang ini adalah ciptaan Pemerintah Belanda yang diciptakan pada beberapa abad yang lalu, dan dengan menggunakan asas konkordansi maka diberlakukan di Indonesia. Produk yang diciptakan tersebut, produk lama yang cukup usang, karena ada kalanya tidak sesuai dengan keadaan jaman sekarang ini;
- (b) bahwa kemajuan teknologi, seperti komputer, kredit card merupakan hal-hal yang baru yang tidak ada diatur secara jelas di dalam hukum pidana, malahan kejahatan-kejahatan di bidang yaysan sendiri belum ada diakui, karena dasar hukum pembentukan yaysan sendiripun belum ada undang-undangnya. *(pada saat penelitian ini dilakukan)*.
- (c) bahwa kemajuan masyarakat yang begitu cepat, komunikasi yang begitu canggih belum tertampung oleh hukum pidana yang berlaku sekarang ini, artinya hukum pidana itu terlalu jauh tertinggal di belakang, dibandingkan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri.¹⁵³⁾

153) Hasil wawancara dengan informan Into Ammy Tanjung, SH. Hakim PN.Semarang.

Pada kondisi yang demikian hakim dituntut kepekaannya menerima aspirasi masyarakat sebagai sebuah kajian yang mendasar sehubungan dengan adanya tuntutan reformasi hukum pidana dengan tetap berpegang kepada pranata hukum yang ada. Jika di kembangkan oleh hakim maka putusannya berkembang menuju hukum modern.

Sebagai contoh dalam perkara Narkoba, bukan saja karena efeknya terhadap pelaku atau pemakai barang haram tersebut tetapi lebih jauh dapat merusak generasi bangsa. Contoh lain adalah masalah Korupsi, terhadap kejahatan jenis ini tidak saja merugikan keuangan negara akan tetapi masyarakat secara keseluruhan juga adalah termasuk yang dirugikan.

Alasan memberikan pertimbangan yang demikian adalah karena hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mempertimbangkan segala aspek. Karena itu meskipun tuntutan reformasi hukum pidana bukan hal yang dipertimbangkan (diatur) dalam KUHP, akan tetapi hakim dalam memutus perkara di samping berpegang pada hukum positif juga harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Atas dasar pertimbangan rasa keadilan inilah hakim dapat mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam putusannya.¹⁵⁴⁾

154) Hasil wawancara dengan informan hakim Suparti Hadyono, SH.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka mereka pun (hakim) bersikap responsif dengan mempertimbangkan kondisi objektif agar dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut berarti hakim telah mencoba membuat satu putusan yang baik, yaitu dapat memenuhi dua persyaratan yakni kebutuhan teoritis maupun kebutuhan praktis. Yang dimaksud dengan kebutuhan teoritis ialah bahwa menilik kepada isi beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum (harus "*juridisch en filosofisch verantwoord*"). Bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis adalah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan peristiwa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya, karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (dapat diterima secara sosiologis).¹⁵⁵⁾ Dalam hal ini persoalan praktis yang dihadapi masyarakat dan harus diselesaikan oleh hakim adalah masalah-masalah yang timbul akibat tuntutan reformasi.

155) Purwoto S Gandasubrata, *Renungan Hukum* (Jakarta, 1998), hal.83.

Dari segi penemuan hukum, hakim-hakim tersebut telah mengikuti perkembangan baru mengenai teori *rechtsvinding* yang lebih modern. Salah satu titik sentral dari aliran modern ini adalah bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran (*systeemdenken*), akan tetapi yang menjadi pangkal tolak adalah problem sosial yang harus diselesaikan (*probleemdenken*). Undang-undang bukanlah merupakan kitab yang penuh dengan kebenaran dan penyelesaian, yang setidak-tidaknya memerlukan penafsiran untuk penerapannya pada suatu situasi yang konkrit. Undang-undang lebih merupakan usulan atau acuan untuk memecahkan masalah, suatu pedoman untuk mengambil putusan dalam rangka menemukan hukum. Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang paling penting dalam rangka menyelesaikan suatu masalah. Selain itu hakim memiliki otonomi (lawan dari heteronom : tunduk pada undang-undang). Dengan otonomi berarti bahwa para hakim memutus perkara menurut apresiasi pribadinya mengenai setiap kejadian atas kekuasaan sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan hakim, mengatakan bahwa seorang hakim harus senantiasa memperdalam ilmu dan bersikap tanggap terhadap semua permasalahan yang timbul dalam masyarakat,

tidak lekas puas serta pengetahuan dan pengalamannya, tetapi selalu berusaha menimba ilmu dan pengalaman agar putusan-putusannya dapat adil dan dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, maupun secara filosofis.¹⁵⁶⁾

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan hakim Pengadilan Negeri Semarang, lebih lanjut dikatakan bahwa dalam era reformasi ini, para hakim tidak bisa atau tidak boleh terpaku pada undang-undang atau peraturan pemerintah saja, tetapi harus juga dapat merasakan denyut nadinya keadilan yang ada di masyarakat, apalagi hukum pidana kita adalah peninggalan penjajah Hindia Belanda. Walaupun kadang kala suatu peristiwa hukum telah ada aturannya, akan tetapi apabila diterapkan akan menimbulkan suatu ketidakadilan, maka hakim sesuai dengan kewenangan dan jabatan yang ada padanya, dapat saja mengenyampingkan aturan-aturan tersebut, sepanjang mempunyai cukup alasan-alasan yang dapat diterima rasio dan rasa keadilan dan kewajaran serta kesusilaan yang hidup di masyarakat (non-mekanistik).¹⁵⁷⁾

156) Wawancara dengan informan Baharudin Siagian, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran. Informan juga menempuh pendidikan program Strata Dua (S.2) bidang kajian *Business law*.

157) Wawancara dengan informan Into Ammy Tanjung, SH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Berarti hakim tersebut telah berorientasi pada masalah sosial yaitu adanya tuntutan reformasi hukum pidana yang harus dipecahkan. Hakim-hakim demikianlah yang menurut **Satjipto Rahardjo, SH.** disebut tidak menjadi tawanan undang-undang. Menurut beliau supremasi hukum itu tidak sama dengan supremasi undang-undang. Apabila berbicara mengenai supremasi hukum, maka yang ada dalam pikiran kita adalah "keunggulan dari keadilan dan kejujuran". Bukan undang-undang yang dipikirkan tetapi keadilan itulah. Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Akan tetapi, memang itulah yang menjadi taruhan bukan semata-mata "memencet tombol undang-undang". **Roeslan Saleh** (almarhum) pernah merumuskan dengan sangat indah mengenai usaha kita untuk membuat putusan hukum, yaitu sebagai suatu "pergulatan kemanusiaan". Jadi para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Sesudah disahkan dalam Lembaran Negara, maka undang-undang memang menjadi sah dan siap dipakai untuk mengatur masyarakat. Akan tetapi, mengatakan bahwa dengan begitu segalanya sudah selesai

dan jelas adalah sangat keliru. Hal yang rumit telah digusur menjadi teknologi pencet tombol yang sangat teknis. Hukum itu memang sebagian teknologi, tetapi sesungguhnya lebih besar dari pada itu, yaitu suatu putusan kemanusiaan.¹⁵⁸⁾ Dalam kaitan ini, tugas hakim memberikan keadilan, tidak langsung berhenti manakala dasar perundang-undangan mengenai satu kasus tidak diketemukan. Akan tetapi hakim harus membebaskan diri dari tawanan undang-undang yang terbatas dan memberi jawaban terhadap masalah-masalah hukum akibat kondisi reformasi yang diajukan kepadanya.

Salah satu contoh putusan badan peradilan yang telah menerapkan aliran penemuan hukum modern adalah putusan kasasi kasus terdakwa Mochtar Pakpahan yaitu Yurisprudensi MARI No.395 K/Pid/1995. Dalam putusan tersebut memuat ajaran penafsiran yuridis sosiologis dengan dasar pertimbangan hukum yang mengandung aspirasi masyarakat yang saat itu tertekan oleh Pemerintah Orde Baru. Disini hakim mempunyai semangat yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga berhasil menciptakan iklim baru dalam sistem penegakan hukum pidana dengan menggunakan aspek sosiologis. Hal ini sebagai bukti adanya unsur perubahan dan dinamika

158) Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang", Kompas 24 Mei 2000.

pola pemikiran hakim dari legalitas normatif menuju kearah pandangan yuridis sosiologis. Perubahan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukumnya seperti di bawah ini¹⁵⁹⁾ :

"Bahwa seharusnya dalam setiap keputusannya Hakim menerapkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan yang berpola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkrit yang harus diputus. Bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini, bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan. Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam jaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mereduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Bahkan pada dasarnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan. Bahwa ...dst".

Akan tetapi pandangan mengenai tuntutan reformasi hukum pidana yang demikian tidak dipunyai oleh semua hakim, masih banyak hakim yang tidak mau tahu dengan adanya tuntutan reformasi, bahkan tetap berpedoman pada cara kerjanya yang bersifat prosedural. Masih segar dalam pikiran, beberapa kasus seperti kasus skandal Bank Bali dan kasus terdakwa HM Soeharto, merupakan contoh-contoh putusan yang tidak memperlihatkan kebebasan hakim

159) Varia Peradilan No.24 Tahun XI, Januari 1996, halaman 25-44.

dalam mengambil keputusan. Sehingga masyarakat berpandangan dan menilai bahwa hakim hanya memutus berdasarkan apa kata undang-undang dengan tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dari kasus-kasus tersebut, memang sangat bisa dimengerti mengapa masyarakat menganggap hakim adalah sebagai corong undang-undang belaka. Karena kelihatan jelas bahwa hakim sangat lihai menggunakan undang-undang sebagai sarana berlindung dari tuntutan masyarakat, sementara dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan kepentingan, perlindungan dan juga tekanan-tekanan baik secara psikologis maupun politis dan lain-lain.

Sorotan masyarakat terhadap pemenuhan rasa keadilan yang diberikan oleh hakim dalam proses penegakan hukum dewasa ini ialah bahwa hakim terlalu terpaksa menggunakan undang-undang (hukum tertulis) sebagai alat untuk mencari jalan keluar paling mudah terhadap setiap kasus yang ditanganannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa apabila dalam mengadili suatu perkara dimana hakimnya mendapat tekanan baik secara psikologi maupun politis, maka hakim akan memanfaatkan undang-undang untuk "menyelamatkan posisinya".

Dari dua contoh kasus tersebut di atas, memperlihatkan bahwa sebagian hakim masih belum bersikap responsif terhadap perubahan keadaan jaman karena masih terlalu dicekam oleh pemikiran yang mengutamakan hukum positif, sehingga kurang menangkap pesan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab sikap hakim yang terlalu kaku ini mengakibatkan seorang yang melakukan kejahatan menjadi tidak bisa dihukum. Disamping itu bisa "menciderai" citra penegakan hukum dalam rangka menjawab tuntutan reformasi hukum pidana.

Pandangan dan Sikap hakim terhadap tuntutan reformasi hukum pidana dalam ilmu hukum disebut sebagai budaya hukum. **Esmi Warassih** mengartikan budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem itu ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.¹⁶⁰⁾ Pengertian tersebut selaras dengan pengertian yang diberikan oleh **Friedman**, yaitu kebiasaan-kebiasaan budaya umum, pandangan-pandangan, cara bertindak dan berpikir yang mengikat kekuatan-kekuatan sosial ke dalam dan ke luar hukum dan dalam cara-cara yang khusus.¹⁶¹⁾

160) Esmi Warassih, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum", Hukum dalam Perspektif Sosial, ed. Satjipto Rahardjo, Bandung, 1981, hal. 134.

161) M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York, 1975, hal. 22.

Secara lebih spesifik **Friedman** membuat perbedaan dalam budaya hukum. Menurutnya, budaya hukum terbagi atas budaya hukum internal yang dimiliki hakim-hakim serta budaya hukum eksternal yang dimiliki masyarakat umum.¹⁶²⁾

Bila dilihat dari perbedaan yang dibuat oleh **Friedman** tersebut maka pandangan dan sikap hakim terhadap tuntutan reformasi hukum pidana tergolong kedalam budaya hukum internal. Pandangan dan sikap hakim terhadap tuntutan reformasi hukum pidana tersebut menghubungkan dan mengikat kekuatan-kekuatan sosial masyarakat kedalam sistem hukum. Sebagai akibatnya tuntutan reformasi hukum pidana tersebut melekat dan terbawa masuk kedalam proses bekerjanya sistem hukum. Bila dalam hal ini hakim, maka tuntutan reformasi hukum pidana tersebut melekat dan terbawa pada saat hakim membuat pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

Penjelasan mengenai hal tersebut dapat diberikan dengan contoh yang dikemukakan oleh informan hakim **Into Ammy Tanjung** sebagai berikut : walaupun kadang kala suatu peristiwa hukum telah ada aturannya, tetapi apabila diterapkan akan menimbulkan suatu ketidakadilan maka hakim sesuai wewenang dan jabatan yang ada padanya dapat

162) Lawrence M. Friedman, "Legal Culture & Welfare State", *Dilemmas Of Law in The Welfare State* ed. Gunther Teubner (New York, 1986), hal.17.

saja mengenyampingkan aturan-aturan tersebut, sepanjang mempunyai cukup alasan yang dapat diterima rasio dan rasa kepatutan, kewajaran serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat (*non-mekanistik*).

Dengan bantuan kerangka yang disusun oleh **Chambliss** dan **Seidman** akan kita coba untuk meneliti contoh yang diajukan di atas. Menurut **Chambliss** dan **Seidman** lembaga pelaksana hukum, dalam hal ini hakim dalam memeriksa perkara ditentukan oleh peraturan-peraturan yang ada beserta sanksi, kompleksitas tuntutan reformasi hukum pidana dan adanya umpan balik dari pemegang peran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan normal hakim dapat saja memutuskan perkara sesuai dengan peraturan, akan tetapi bila hukum atau undang-undang itu adalah produk kolonial maka hakim dapat menafsirkan agar dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal hukum/undang-undang-nya kurang jelas atau belum mengaturnya dan khusus dalam berlakunya hukum adat atau hukum tidak tertulis, maka hakim perlu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi yang diuraikan di atas, ternyata bersesuaian dengan proposisi yang diajukan oleh Friedman. Ia menyatakan bahwa perubahan sosial membawa perubahan pada budaya hukum dan pada gilirannya membawa perubahan hukum.¹⁶³⁾ Adanya perubahan sosial berupa munculnya tuntutan reformasi mendorong perubahan dan sikap serta pandangan hakim, dan pada akhirnya mendorong adanya perubahan hukum yang dibuatnya.

Tentang bagaimana seorang hakim dapat mempunyai pandangan dan sikap yang responsif terhadap tuntutan reformasi hukum pidana, dapat dicoba untuk diterangkan dengan bantuan teori interaksionisme simbolik. Teori ini memandang suatu keputusan yang dibuat oleh individu merupakan hasil dari interaksinya dengan lingkungan. Adapun proses-prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Individu pelaku akan memandang diri dan sesamanya sebagai suatu objek dalam interaksi. Dalam berinteraksi terdapat struktur harapan seperti nilai dan norma sebagai pedoman interaksi.
2. Terhadap objek tersebut pelaku akan mempunyai kecondongan untuk dilakukan.
3. Pelaku akan sampai pada satu definisi tentang situasi yang berlaku sebagai acuan umum.

163) Lawrence M. Friedman, 1986, Op.Cit., hal.26.

4. Pelaku akan membuat pilihan perilaku dalam satu proses simbolik yang rumit.
5. Setelah satu perilaku diambil akan muncul pendefinisian ulang situasi dan pemetaan ulang sebagai reaksi dari lingkungannya.¹⁶⁴⁾

Kerangka sebagaimana diajukan dalam teori interaksionisme simbolik tersebut akan dibumikan dalam meneliti proses munculnya pandangan dan sikap hakim seperti tersebut di atas.

Bila dikaitkan dengan adanya pandangan dan sikap hakim terhadap tuntutan reformasi hukum pidana, maka proses-proses yang terjadi dalam diri hakim bila digunakan kerangka interaksionisme simbolik adalah sebagai berikut :

1. Hakim sebagai pejabat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berhadapan dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu antara pihak-pihak yang bertentangan (terdakwa dan korban). Hakim akan memandang dirinya dan para pihak sebagai sesama objek dari suatu sistem yang mempunyai tugas masing-masing, para pihak memberi masukan dan hakim akan memberikan keluaran (output). Para pihak (korban yang diwakili oleh Jaksa) pergi ke Pengadilan dengan serangkaian harapan dan

164) Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Illinois, 1974), hal. 177-179.

nilai-nilai yang diperjuangkannya. Hal tersebut akan menjadi pedoman dalam interaksi, hakim akan terikat dengan serangkaian harapan dan nilai yang di bawakan oleh para pihak kepadanya. Dikaitkan dengan tuntutan reformasi hukum pidana, harapan yang dibawa antara pihak-pihak yang bertentangan tersebut adalah agar hakim dapat memberikan pemecahan secara tuntas dengan adil terhadap kasus tersebut.

2. Dengan adanya dua pihak yaitu terdakwa dan korban (atau masyarakat), disatu sisi terdakwa merasa tidak bersalah dan meminta di adili menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan di sisi lain korban (atau masyarakat) meminta keadilan ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya.
3. Hakim akan memberikan definisi dan memberi makna terhadap situasi yang muncul. Yaitu dengan adanya tuntutan reformasi hukum pidana hakim dituntut untuk memberikan keadilannya terhadap kasus-kasus yang muncul tersebut.
4. Hakim kemudian akan menentukan garis perilaku secara simbolik yaitu berupa putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan satu simbol hukum sebagai jawaban terhadap kasus yang diajukan dipersidangan.

Hakim memutuskan agar pidana yang dijatuhkan dapat diterima oleh terdakwa dan korban (**atau masyarakat**).

5. Atas putusan pengadilan tersebut akan muncul reaksi dari para pihak, yaitu reaksi menerima maupun reaksi tidak menerima yang diwujudkan melalui upaya hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa hakim sebagai individu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk menjalankan suatu peran. Menurut **Erving Goffman** peran adalah ekspektasi yang didefinisikan secara sosial dan dimainkan seseorang dalam suatu situasi untuk memberikan citra tertentu kepada orang lain.¹⁶⁵⁾

Dalam hal ini hakim menjalankan suatu peran, suatu harapan dari para pihak agar dapat memberikan solusi yang terjadi akibat peristiwa hukum yang dihadapkan kepadanya. Hakim berusaha menjawab harapan masyarakat tersebut dan memberikan citra sebagai penegak hukum kepada masyarakat.

Ditambahkan oleh **George Herbert Mead** bahwa proses interaksi tersebut ditempuh melalui suatu komunikasi terbuka dan proses berpikir yang terlihat (*covert thinking*) sehingga menghasilkan suatu keputusan.¹⁶⁶⁾ Dalam kasus tersebut komunikasi terbuka diwujudkan dalam

165) Deddy Mulyana, "Drama Soeharto", KOMPAS, 14 Oktober 2000, hal.4.

166) Ibid.

sidang pemeriksaan dan berbagai perdebatan yang dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sedangkan proses berpikir yang tidak terlihat terwujud dalam sidang musyawarah yang bersifat tertutup di mana hakim akan merenungkan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.

Demikian dalam pandangan teori interaksionisme simbolik munculnya persepsi dan sikap hakim terhadap tuntutan reformasi hukum pidana terjadi melalui proses interaksi. Dalam proses interaksi tersebut hakim menangkap harapan-harapan yang diajukan diantara pihak-pihak sebagai lawannya dalam berinteraksi melalui proses komunikasi yang terbuka. Setelah melalui proses berpikir yang tidak terlihat hakim merespon harapan-harapan masyarakat secara simbolik, yaitu dalam bentuk putusan pengadilan.

C. IMPLEMENTASI TUNTUTAN REFORMASI HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM.

1. Putusan Hakim Dalam Masa Reformasi Hukum Pidana.

Apabila kebesaran seorang penyair ditentukan oleh karya sastra yang ditulisnya, dan kecendekiawanan seorang ilmuan ditentukan oleh karya ilmiahnya, maka kualitas seorang hakim ditentukan oleh putusannya.

Bahkan **Bismar Siregar** menyatakan bahwa mahkota seorang hakim adalah putusannya¹⁶⁷⁾. Maka mengkaji putusan hakim merupakan hal yang selalu menarik, sebab produk yudikatif tersebut merupakan suatu keluaran (output) dari suatu proses sosial yang cukup kompleks.

Menurut **Panususnan Harahap**, suatu putusan yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ¹⁶⁸⁾ :

Pertama; putusan harus tuntas dan memuaskan. Putusan yang baik adalah harus berdampak positif artinya tuntas dan memuaskan terutama menyangkut kepentingan antara berbagai pihak yang bertentangan. Tuntas berarti putusan hakim harus benar-benar menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi, bukan sebaliknya.

Kedua; putusannya harus obyektif. Jikalau dibandingkan dengan posisi Pengacara dan Jaksa, maka kedudukan hakim jauh lebih obyektif. Oleh karena ia fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dan penilaiannya pun obyektif, karena ia harus berdiri di atas kedua kepentingan yang berbeda, dan tidak boleh memihak. Posisi dan penilaian hakim itu harusnya obyektif, adalah hal yang wajar saja. Sebab ia harus menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi.

167) Bismar Siregar, "Mahkota Seorang Hakim adalah Putusannya", Varia Peradilan, No.93, Juni 1993, hal.50.

168) Panususnan Harahap, Bobot Seorang Hakim Lebih Ditentukan Oleh Putusannya, Majalah Varia Peradilan, No.19 (April, 1987), hal.162-163.

Untuk bersikap obyektif tanpa memihak salah satu pihak, kecuali hanya semata-mata berpihak pada keadilan dan kebenaran bukan hal yang mudah. Tidak mustahil bahwa masing-masing pihak berusaha mempengaruhi hakim, dengan berbagai cara dan upaya agar hakim mau mengabulkan tuntutananya. Pengaruh itu bisa juga datang dari luar para pihak, yang merasa ada kepentingan.

Disinilah sangat diperlukan sikap seorang hakim yang tegas. Dengan kata lain, iman seorang hakim akan dipertaruhkan. Apakah ia goyah dengan berbagai macam cara, rayuan dan godaan yang datang itu.

Ketiga; putusan harus cukup dipertimbangkan. Agar putusan dapat diterima oleh berbagai pihak maka hakim harus dapat meyakinkan dengan pertimbangan dan argumentasi yang tepat dan benar serta dengan penuh keyakinan pula.

Putusan hakim haruslah cukup dipertimbangkan, artinya bahwa tidak ada satupun dalil diterima atau ditolak dengan tanpa pertimbangan atau alasan. Disinilah pentingnya penguasaan seorang hakim terhadap peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Serta penguasaan terhadap fakta dan peristiwa-nya. Dasar pertimbangan inilah nantinya antara lain yang

menentukan berbobot tidaknya putusan hakim yang bersangkutan.

Putusan hakim yang sarat dengan pertimbangan, yang tidak saja terbatas pada unsur yuridis atau logika yuridis semata, senantiasa menjadi bahan kajian oleh ilmuwan hukum, dan sudah tentu oleh para hakim itu sendiri.¹⁶⁹⁾

Oleh karena itu sebelum hakim menjatuhkan putusannya (pidana), maka hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah, sebagai berikut ¹⁷⁰⁾ :

- (1) Kesalahan pembuat;
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- (3) Cara melakukan tindak pidana;
- (4) Sikap batin pembuat;
- (5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
- (6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- (9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- (10) Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hal-hal di atas membantu hakim dalam menakar pidana, sehingga pidana bersifat proporsional dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri. Namun perlu pula dipahami, bahwa butir-butir di atas tidak bersifat limitatif. Hakim bisa

169) Ibid, hal.163-164.

170) Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal.109-110.

saja menambahkan pertimbangannya pada hal-hal lain, selain apa yang tercantum di atas, namun paling sedikit harus memuat hal-hal di atas. Disamping tentu saja harus pula mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana di atur dalam aturan pidana yang sudah ada.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden hakim, bahwa mengenai kesalahan dan cara melakukan tindak pidana serta pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat selalu menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan mengenai motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana sebagian responden menyatakan tidak selalu dan sebagian lainnya menyatakan selalu menjadi pertimbangan. Adapun mengenai sikap batin pembuat, riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat hampir semua responden menyatakan tidak selalu menjadi pertimbangan dan sebagian kecil lainnya menyatakan selalu menjadi pertimbangan. Sedangkan mengenai pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan jumlah responden yang menyatakan selalu menjadi pertimbangan lebih banyak dibanding yang menyatakan tidak selalu menjadi pertimbangan. Kemudian mengenai pengaruh tindak pidana terhadap korban atau

keluarga korban, hampir semua atau lebih dominan responden menyatakan tidak selalu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Akan tetapi mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan berencana semua responden menyatakan selalu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Tugas dan kewajiban hakim adalah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya melalui dua fase, yaitu :

pertama; fase pemeriksaan. Dalam fase ini dimaksudkan agar hakim dapat memperoleh kebenaran fakta-fakta yang menjadi dasar diajukannya suatu masalah kepada hakim untuk diadili. Agar hakim mendapatkan kebenaran dari suatu kasus, maka diajukan dimuka persidangan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.

Dalam memberikan penilaian tentang kebenaran fakta tersebut hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, dalam pengertian terhadap alat-alat bukti tersebut dilakukan verifikasi ataupun falsifikasi. Fakta diperoleh hakim yang memeriksa tersebut, apabila dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa suatu peristiwa telah terjadi dan dinyatakan perbuatannya telah terbukti sedangkan apabila

fakta tersebut tidak diperoleh, hakim yang bersangkutan melakukan falsifikasi dan dinyatakan tidak terbukti.

Kedua; fase pemberian putusan. Dalam fase ini hakim memberikan penetapan hubungan dengan memperhatikan fase pemeriksaan dinyatakan perbuatannya terbukti maka terdakwa harus diberi sanksi pidana, sedangkan yang dinyatakan tidak terbukti karenanya terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*).

Hakim dalam memberikan keadilan tersebut adalah berdasarkan hukum yang berlaku, yang bersumber pada : (1) peraturan perundang-undangan; (2) adat istiadat, kebiasaan, custom (*living law*); (3) putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*); dan (4) ilmu hukum (*doktrin*).

Menurut Suparti Hadhyono¹⁷¹⁾, menyebutkan suatu putusan hakim seyogyanya memenuhi faktor-faktor sebagai berikut :

Pertama; faktor yuridis, sudah merupakan suatu pendapat umum dikalangan para hakim dan merupakan kesepakatan tidak tertulis, bahwa dalam mengambil suatu keputusan baik perkara perdata maupun pidana, pertama-tama harus didasarkan kepada hukum positif yang berlaku.

171) Dalam wawancara tidak berstruktur beliau juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang dirasakan mempengaruhi dan menjadi kendala penegakan hukum bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari adalah : kendala substansial, karena dirasakan berbagai undang-undang pidana sudah ketinggalan zaman, kendala struktural, perlunya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara, kendala politis, berbagai kebijakan makro pemerintah pada sisi lain membawa dampak pada proses penegakan hukum. Wawancara dengan informan hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Hukum positif yang berlaku tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai adat kebiasaan atau hukum adat yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Kedua; faktor sosiologis. Suatu putusan hakim yang sudah dilandasi oleh hukum positif yang berlaku, belum merupakan putusan yang lengkap dan sempurna untuk menuju ke arah rasa adil yang diinginkan. Ucapan terkenal dari seorang sosiolog Carl Von Savigny : *"das recht nicht gemacht, is und wird mit dem volke"*, hukum itu tumbuh tidak dibuat, ia ada dan tumbuh bersama atau di sisi masyarakat. Dari ungkapan ini dapat disimpulkan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang dari masyarakat, dipergunakan oleh masyarakat untuk mencapai suatu tata yang teratur.

Bertitik tolak dari pendapat **Carl Von Savigny** di atas, suatu putusan perkara kurang tepat kalau hanya berdasar dan bertanggungjawab pada faktor yuridis saja. Suatu putusan harus dibuat selain berdasar faktor yuridis juga beranjak dari kesadaran hukum masyarakat dan pemenuhan rasa adil dari masyarakat atau bangsa.

Ketiga; faktor filosofis. Melalui faktor filosofis pertanggungjawaban hakim dalam putusan perkara akan terlihat lebih jelas. Tujuan utama suatu putusan perkara adalah rasa keadilan yang hanya bisa dijumpai dalam ruang lingkup filosofis (filsafat hukum). Arti keadilan dalam penegakan hukum sebagai tujuan suatu putusan yang dibuat oleh hakim bukanlah pekerjaan yang mudah.

Untuk mewujudkan suatu keadilan, yaitu bila putusan hakim telah berdasarkan pada faktor yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁷²⁾

Uraian berbagai pandangan di atas, secara singkat dikatakan suatu putusan hakim haruslah dapat memenuhi rasa keadilan dan merespon kebutuhan masyarakat. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang dalam penjelasan pasal 27 disebutkan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

172) Suparti Hadyono, "Pertanggungjawaban Hakim Dalam Putusan Perkara", Majalah Varia Peradilan, No.XXXIII, Juni 1988, hal.130-133.

Bila dikaitkan dengan tuntutan reformasi, kondisi ini merupakan suatu keadaan yang secara obyektif dirasakan dan dialami oleh masyarakat kita. Apakah hal tersebut dapat dipertimbangkan pula dalam putusan hakim, khususnya dalam putusan perkara pidana sebagai suatu respon atas kebutuhan masyarakat ?

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para informan berpendapat bahwa tuntutan reformasi hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu faktor non hukum yang dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.¹⁷³⁾

Argumentasi yang digunakan oleh para informan adalah bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, selain itu juga demi memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat.

Dari semua responden memberikan pandangan yang sama bahwa tuntutan reformasi hukum pidana telah membawa perubahan keadaan yang pada akhirnya berpengaruh dalam praktek hukum. Hal tersebut kiranya bersesuaian dengan pemikiran Satjipto Rahardjo dalam menguraikan proses bekerjanya lembaga pengadilan. Disebutkannya bahwa bagaimana suatu pengadilan menjalankan fungsinya tidak akan sama saja dari masa ke masa. Proses yang terjadi di

173) Hasil wawancara dengan informan hakim Suparti Hadyono, SH.

dalam ruang pengadilan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Keadaan yang demikian ini mengandung arti, bahwa perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat pada akhirnya juga akan bergema dalam sidang-sidang pengadilan.¹⁷⁴⁾

Proses sosial yang sedang berjalan dalam masyarakat dalam hal ini dapat kita sebut adalah munculnya tuntutan reformasi hukum pidana. Seperti digambarkan **Tb. Ronny** bahwa proses pengadilan sebagai pergulatan manusia melawan berbagai kepentingan untuk menegakkan keadilan pada masyarakat yang kian terbuka, selalu memunculkan kejutan. Mereka yang berharap akan bebas dari segala tuntutan atau memperoleh vonis yang sangat ringan, bisa jadi menemui kenyataan yang mengecewakan, karena ternyata ada sebagian kecil hakim yang tetap memelihara nurani dan integritas moral, sehingga berani menjatuhkan putusan sebagaimana seharusnya.¹⁷⁵⁾

Setiap kali muncul peristiwa atau masalah hukum, maka institusi hukum akan terpanggil untuk memecahkannya. Agar hukum dapat memecahkan masalah yang timbul karena kondisi sosial masyarakat tertentu, maka dalam menjalankan fungsinya lembaga-lembaga hukum harus

174) Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, 1983, hal.75

175) TB Ronny Nitibaskara, *Super White Collar Crime*, Kompas, 1 Oktober 2002, hal.4.

mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakanginya. Kiranya sudut pandang yang demikian nampak bagi kita betapa kondisi sosial masyarakat menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam proses bekerjanya hukum.

Keniscayaan hadirnya satu kondisi sosial masyarakat berupa tuntutan reformasi hukum pidana dalam proses bekerjanya hukum dapat pula kita lihat dalam kerangka yang diciptakan oleh **William J. Chambliss** dan **Robert B. Seidman** dalam bagan seperti telah kami sajikan dalam bab kesatu.

Pembicaraan sementara dipersempit sebatas mengenai proses kegiatan lembaga pelaksana atau penegak hukum yang dalam hal ini hakim. Masih menurut **Chmabliss** dan **Seidman** bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.¹⁷⁶⁾

176) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 1986, hal.28.

Dengan demikian melalui kerangka yang dibuat oleh **Chmablis** dan **Seidman** terbukti pula di lapangan betapa kondisi sosial masyarakat, yaitu adanya tuntutan reformasi hukum pidana dipertimbangkan pula dalam pembuatan keputusan. Hal tersebut menurut informan hakim tidak lain dalam kerangka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Seperti diuraikan di atas, Hakim Indonesia diamanatkan oleh undang-undang agar dapat menggali nilai-nilai keadilan dan memenuhi tuntutan keadilan masyarakatnya. Amanat tersebut dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, yaitu hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus rajin terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut mantan Hakim Agung **Adi Andojo Soetjipto** menyatakan bahwa agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak ketinggalan zaman ia harus mengikuti perkembangan baru mengenai teori *rechtsvinding*

yang lebih modern. Salah satu titik sentral aliran modern ini adalah bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran (*systeemdenken*), akan tetapi yang menjadi pangkal tolak adalah problem sosial yang harus diselesaikan (*probleemdenken*). Undang-undang bukanlah merupakan kitab yang penuh dengan kebenaran dan penyelesaian, yang setidaknya memerlukan penafsiran untuk penerapannya pada suatu situasi yang konkrit. Undang-undang lebih merupakan usulan atau acuan untuk memecahkan masalah, suatu pedoman untuk mengambil putusan dalam rangka menemukan hukum. Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Selain itu hakim memiliki otonomi (lawan dari heteronom : tunduk pada undang-undang). Dengan otonomi berarti bahwa para hakim memutus perkara menurut apresiasi pribadinya mengenai setiap kejadian, atas kekuasaan sendiri.¹⁷⁷⁾

Atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, hakim harus dapat mengambil prakarsa untuk turut berupaya memecahkan permasalahan tersebut. Upaya hakim tersebut antara lain terwujud dalam pembuatan putusan yang bersifat responsif terhadap permasalahan

177) Adi Andojo Soetjipto, Aliran Baru Mengenai Tugas Hakim Menemukan Hukum, Jakarta, 1996, hal.1-3.

aktual dan memberi pemecahan hukum atas permasalahan tersebut dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa perkara yang diteliti berkaitan dengan tuntutan reformasi hukum pidana, ternyata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : pertama, yang menangkap dan merespon tuntutan reformasi terbukti dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya; kedua, yaitu putusan hakim yang bersifat konservatif ialah hakim yang cenderung untuk tidak berimprovisasi tetapi hakim lebih mengacu pada pasal undang-undang dengan kaku sehingga putusannya terasa tidak adil.

Berikut ini akan disajikan beberapa contoh putusan yang berpandangan dan bersifat responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat terlihat dalam putusan-putusan pengadilan sebagai berikut :

(1). Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Juni 2000 No.54/Pid.B/2000/PN.Ung.

Dalam pertimbangannya antara lain disebutkan :

(a). Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- bahwa waktu ditemukan pohon ganja tersebut daunnya ada yang patah dan layu.
- bahwa karena tanamannya tidak berbunga maka terdakwa mengira tanamannya tersebut adalah ganja.
- bahwa terdakwa telah sempat mencampur daun ganja tersebut dengan tembakau tetapi belum merasakan apa-apa.

(b). Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengira tanaman ganja tersebut adalah jenis bunga biasa.
- bahwa terdakwa adalah seorang petani bunga dan guru ngaji.
- bahwa terdakwa belum mengenal sama sekali bentuk ganja.

(c). Menimbang, bahwa dipersidangan juga majelis telah menerima surat dari para ketua RT dalam RW.06 yang diketahui oleh Kepala Desa Kenteng yang dibacakan di persidangan oleh saksi yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa dapat dijatuhi pidana ringan-ringannya karena diantara alasannya terdakwa sebagai guru ngaji yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka putusan pengadilan Negeri Ungaran tersebut ternyata telah mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan memasukkannya dalam putusannya.

(2). Putusan kasasi kasus terdakwa Mochtar Pakpahan yaitu Yurisprudensi MARI No.395 K/Pid/1995. Dalam pertimbangan hukumnya adalah seperti di bawah ini ¹⁷⁸⁾ :

¹⁷⁸⁾ Varia Peradilan No.24 Tahun XI, Januari 1996, halaman 25-44.

"Bahwa seharusnya dalam setiap keputusannya Hakim menerapkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan yang berpola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkrit yang harus diputus. Bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini, bukan sistem undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan. Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam jaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mereduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante dari pembuatan menimbang semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Bahkan pada dasarnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan. Bahwa ...dst".

Dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut, terbukti telah menangkap dan merespon tuntutan masyarakat sekaligus menyelesaikan masalah sosial yang konkrit yang memerlukan keputusannya.

Sebagai perbandingan disajikan pula beberapa contoh putusan yang bersifat konservatif dimana hakim cenderung tidak berimprovisasi tetapi lebih mengacu pada pasal undang-undang dengan kaku. Hal tersebut antara lain dapat terlihat dalam putusan-putusan pengadilan sebagai berikut :

- (1). Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.100/Pid.B/2000/PN.Smg, putusan yang membebaskan terdakwa.

Bahwa pertimbangan hakim yang menjadi dasar pembebasan terdakwa adalah : (1) Pembuktian tidak disertai hasil analisa pemeriksaan laboratorium terhadap limbah bahan berbahaya beracun sehingga tidak dapat membuktikan bahwa akibat limbah tersebut mencemarkan lingkungan; (2) Karena tidak ada laporan dari masyarakat yang kena dampak pencemaran tersebut, sehingga hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada korban; (3) Alasan lain, bahwa hakim tidak dapat menerima POLRI sebagai penyidik tindak pidana lingkungan, dengan alasan harus dilakukan oleh PPNS (Bapedal).

- (2). Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Desember 2001 No.334/Pid/2001/PT.Smg. putusan yang membebaskan terdakwa.

Bahwa pertimbangan hakim yang menjadi dasar pembebasan terdakwa adalah : (1) bahwa mengenai pajak apabila terjadi pelanggaran maka harus diperiksa dan diadili menurut undang-undang perpajakan No.16 Tahun 2000 bukan dengan menggunakan undang-undang No.3 Tahun 1971; (2) mengenai perhitungan kelebihan pembayaran karena tidak sesuai dengan ketentuan Bappenas dikesampingkan karena pada saat perhitunagn tersebut tidak datang kelapangan; (3) karena tidak ada kerugian keuangan negara.

Dari contoh kasus tersebut di atas, memperlihatkan bahwa sebagian hakim masih belum bersikap responsif terhadap perubahan keadaan jaman karena masih terlalu dicekam oleh pemikiran yang mengutamakan hukum positif, sehingga kurang menangkap pesan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian mengenai putusan-putusan hakim tersebut di atas, baik yang bersifat konservatif maupun yang bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Terhadap kedua macam putusan tersebut penulis akan memberikan analisisnya hanya terhadap dua putusan saja yaitu putusan Pengadilan Semarang dan Putusan Pengadilan Ungaran masing-masing sebagai berikut :

Menurut **penulis**, dengan mencermati alasan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Juni 2000 No.54/Pid.B/2000/PN.Ung. disini hakim mempunyai semangat yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga berhasil menciptakan iklim baru dalam sistem penegakan hukum pidana dengan menggunakan aspek sosiologis. Hal ini sebagai bukti adanya unsur perubahan dan dinamika pola pemikiran hakim dari legalitas normatif menuju kearah pandangan yuridis sosiologis.

Lebih lanjut menurut **penulis**, bahwa dalam putusan tersebut di atas hakim telah memadukan antara aturan formal (hukum positif) dengan kenyataan empiris (problem sosial). Bahwa menanam atau memelihara ganja adalah melanggar norma hukum pidana (hukum positif) dan adanya tuntutan masyarakat sesuai dengan surat yang diterima

majelis dari para Ketua RT dalam RW VI Desa Kenteng yang pokoknya memohon keringan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan diantara alasannya terdakwa sebagai guru ngaji sangat dibutuhkan oleh masyarakat merupakan kenyataan empiris (poblem sosial).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu meskipun terdakwa sebagai petani bunga dan menanam bunga adalah pekerjaan sehari-hari akan tetapi menanam dan memelihara tanaman ganja merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan pertimbangan adanya tuntutan masyarakat merupakan hal yang meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan vonis enam bulan dan atas vonis tersebut dirasa adil oleh masyarakat dan juga oleh terdakwa. Sehingga putusan tersebut menyelesaikan masalah sosial.

Terhadap putusan hakim yang bersifat konservatif, dimana hakim cenderung tidak berimprovisasi tetapi lebih mengacu pada pasal undang-undang secara kaku sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan No.100/Pid.B/2000/PN.Smg, akan diberikan analisis sebagai berikut :

Menurut **penulis**, dengan mencermati alasan pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang menjadi dasar pembebasan tersebut, maka memberikan analisis sebagai berikut : bahwa dalam keseluruhan pertimbangan

hukumnya hakim tidak menunjukan improvisasi yang baik dalam mempertimbangkan segala hal, sebab terhadap alasan (1) Bahwa untuk mencari kebenaran materiil, hakim dapat saja memanggil saksi ahli sebagai saksi tambahan karena dipandang sebagai kepentingan pemeriksaan; (2) Bahwa terhadap alasan ke-2, pertimbangan hakim yang demikian merupakan ketidakcermatan hakim yang menganggap tindak pidana lingkungan sebagai delik aduan, karena tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana pada umumnya; (3) Jika dikaji pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 yang melakukan penyidikan adalah disamping POLRI juga PPNS, artinya jika di daerah tersebut tidak ada Penyidik PNS maka POLRI sebagai penyidik negara dapat saja melakukan penyidikan. Dan untuk penanganan kasus ini adalah merupakan temuan Polisi sendiri yang kemudian dilakukan penyidikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas.

Untuk memperkuat analisis penulis disajikan pula perbandingan dalam kasus lain yang sifatnya sama dalam Perkara No.31 PK/Pid/1988 juga terjadi, dimana terdakwa oleh Penuntut umum didakwa melakukan **tindak pidana korupsi** berdasarkan UU No.31 Tahun 1971 dan juga didakwa melakukan **kejahatan** sebagaimana di atur dalam pasal 415, 372 dan 374 KUHP, akan tetapi penyidikan terhadap kasus

ini dilakukan oleh petugas kejaksaan. Oleh hakim tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian dalam tingkat kasasi putusan *judex facti* tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan : (1) terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; (2) membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut; (3) menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "penggelapan" yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya; (4) menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; dst.

Atas putusan Kasasi tersebut, terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dengan alasan sbb : (1) merujuk pada amar putusan kasasi pada point 1, 2 dan 3 seperti tersebut dimuka, menunjuk bahwa perkara ini bukan perkara pidana khusus; (2) berkas perkara ini bukan hasil penyidikan pejabat Polisi Negara sesuai dengan kasus yang tergolong pada perkara biasa, tetapi penyidikan atas kasus ini dilakukan oleh Jaksa yang berwenang menyidik perkara pidana khusus. Berdasarkan Peninjaun Kembali yang diajukan oleh terpidana tersebut,

hakim PK memberikan pertimbangan yakni : bahwa hakim dalam tingkat kasasi tidak memperhatikan atau mempertimbangkan fakta-fakta materiil sebagai dasar pemeriksaan perkara hasil penyidikan yang dilakukan penyidik/Jaksa yang tidak berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana biasa. Sehingga putusan Penjualan Kembali adalah membebaskan terdakwa.

Sehubungan dengan putusan tersebut Mantan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto menyatakan¹⁷⁹⁾ :

"Menurut pendapat saya adalah bahwa terlalu formalitas dan kaku. Apalagi karena sikap hakim yang terlalu kaku ini mengakibatkan seorang terdakwa yang telah dianggap terbukti bersalah melakukan kejahatan menjadi tidak bisa di hukum, merupakan hal yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan dapat menghambat penyelesaian suatu perkara. Disamping masalahnya hanya soal "kewenangan penyidik melakukan penyidikan", yang sebenarnya apabila ditinjau dari segi "hasil"-nya (bukankah hal ini merupakan yang terpenting bagi hakim dalam memutus perkara?) mungkin tidak ada masalah. Dan hal ini juga sudah diterima berdasarkan Hasil Keputusan Panitia Kerja Bidang Hukum Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 24 januari 1985".

Kembali pada masalah keputusan, biasanya suatu putusan hakim dari sudut isinya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

179) Adi Andojo Soetjipto, Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Perluakah Diadakan Pembedaan yang ketat dalam rangka sahnya putusan, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun IX No.108 September 1994, hal. 140-141.

- (a). Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang didapati hakim setelah memeriksa perkara.
- (b). Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yang ditemukan oleh hakim, berdasarkan kenyataan-kenyataan tadi.
- (c). Keputusan atau *dictum*¹⁸⁰⁾

Masih seputar substansi putusan, **Satjipto Rahardjo** mengemukakan bahwa perlu dibedakan antara *ratio decidendi* dan *obiter dicta*. Hal yang pertama adalah ketentuan hukum atau proposisi yang diciptakan oleh pengadilan atau yang oleh pengadilan dilihat sebagai ketentuan yang harus diberlakukan terhadap kasus yang dihadapi. Sedangkan yang kedua adalah ilustrasi mengenai penalaran hukum pada umumnya dan menyebut situasi yang bersifat hipotesis dan hukum yang seharusnya dikenakan terhadap situasi tersebut.¹⁸¹⁾

Dari beberapa kasus yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa dua diantaranya telah memasukkan tuntutan reformasi menjadi satu hal yang dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi, akan dicoba diulas dengan menggunakan pandangan yang

180) Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, 1985), hal.77.

181) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung, 2000), hal.11.

bersifat sosiologis tentang hukum. Satu pandangan yang dapat diajukan adalah pendapat **Satjipto Rahardjo** yang menyatakan bahwa bagaimana suatu pengadilan menjalankan fungsinya tidak akan sama saja dari masa ke masa. Proses yang terjadi dalam ruang pengadilan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Keadaan yang demikian ini mengandung arti, bahwa perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat pada akhirnya juga akan bergema dalam sidang-sidang pengadilan. Kecenderungan-kecenderungan yang terdapat pada suatu masa tertentu akan mengimbas pula kepada para hakim pengadilan. Di sini akan dijumpai pikiran-pikiran yang dominan pada suatu saat, sehingga sulit bagi hakim untuk menolak dominasi yang demikian itu.¹⁸²⁾

Perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat adalah munculnya tuntutan reformasi hukum sedikit banyak telah berimbas pada pribadi hakim, yaitu terhadap pikiran-pikiran dan sikap hakim. Tuntutan reformasi hukum telah membentuk kerangka berpikir dan bersikap yang baru pada hakim yang memungkinkan ia dapat merespon kondisi masyarakatnya.

182) Lihat Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal.75-76.

Demikian ternyata adanya perubahan sosial berupa munculnya tuntutan reformasi hukum sedikit banyak telah mendorong perubahan sikap dan pandangan hakim, dan pada akhirnya mendorong adanya perubahan hukum dalam putusan yang dibuatnya.

2. Kinerja Hakim Sehubungan Dengan Tuntutan Reformasi Hukum Pidana.

Ungkapan Sir Alfred Denning, yakni : *The nations, fall when judges are unjust, because there is nothing which the multitude worth defending* sebagaimana dikutip **Sudikno Mertokusumo**.¹⁸³⁾ Atas ungkapan ini menunjukkan betapa kualitas hakim dalam menjalankan mesin hukum sangat penting bagi eksistensi suatu bangsa. Satu bangsa akan jatuh bila hakimnya tidak adil, karena tidak ada lagi yang dianggap penting untuk dipertahankan.

Pandangan **Charles Himawan** dalam uraiannya mengenai praktek penegakan hukum kiranya dapat menguraikan lebih lanjut ungkapan yang dikutip **Sudikno Mertokusumo** tersebut. Menurut **Charles Himawan**¹⁸⁴⁾ salah satu pilar utama bagi suatu negara adalah pengadilan. Lembaga ini menjadi instrumen vital sekaligus refleksi bagi banyak

183) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1977), hal.v.

184) Charles Himawan, *Kasus Suap di Lembaga Peradilan Makin Dahsyat*, Kompas, 3 September 2000, hal.1

hal, misalnya penegakan hukum, pembangunan ekonomi, martabat dan moral bangsa, ketertiban dan sebagainya. Undang-undang atau berbagai kaedah hukum boleh tidak bagus, tetapi penegakan hukumnya mutlak prima. Primanya penegakan hukum itu ditampilkan atau dipanggungkan dalam berbagai putusan tepat dari institusi pengadilan. Artinya para hakim di pengadilan dengan tepat dan ekstra bijak menjatuhkan putusan-putusan yang kemudian menjadi cermin bagi tegaknya hukum, munculnya hukum dan ketertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden hakim, bahwa keberhasilan penegakan hukum sebagaimana dicita-citakan dapat dicapai apabila ada komitmen bersama semua aparat penegak hukum dengan menunjukan perubahan keberpihakan dari keadilan yuridis menuju keadilan sosiologis dan keadilan moral. Termasuk juga perlunya persepsi yang sama dari masyarakat, artinya bahwa demi tegaknya supremasi hukum segala bentuk main hakim sendiri harus dihentikan. Masyarakat harus sadar bahwa upaya penyelesaian kasus melalui cara-cara kekerasan dengan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebenarnya merupakan tindakan yang tidak produktif dan malah cenderung merusak dan menimbulkan kerugian.

UPT-PUSTAK-UNDI?

Dengan putusan pengadilan yang tepat dan arif tadi, semua penjahat dari kelas tinggi sampai kelas terbawah akan terjerat hukum. Koruptor boleh berlagak, tetapi kalau putusan pengadilan menghukumnya, koruptor tidak akan bisa apa-apa. Masalahnya, untuk menghasilkan putusan pengadilan yang hebat tadi, hakim tidak hanya harus cerdas sehingga dengan kecerdasannya itu dapat melihat suatu perkara dengan jernih dan tepat. Hakim pun harus mempunyai kejujuran, hati nurani, manusiawi dan sikap walas asih kuat. Dan yang juga penting (terlebih-lebih di era reformasi) seperti sekarang ini adalah dukungan semua aparat hukum, artinya *diperlukan reformasi komitmen terhadap penegakan hukum* (kursif penulis).

Tanpa beberapa kriteria tersebut sulit diharapkan hakim Indonesia menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai salah satu sendi kehidupan berbangsa akan runtuh.¹⁸⁵⁾

Sungguh disayangkan, apabila berbicara mengenai cara kerja perilaku hakim dan para penegak hukum lainnya, dapat dipastikan yang akan ditemui adalah wajah buram peradilan.

185) Charles Himawan, Kasus Suap di Lembaga Peradilan Makin Dahsyat, Kompas, 3 September 2000, hal.1

Seorang advokat Senior Ridwan Widyadharma memberikan kesaksian mengenai hal tersebut. Disebutkannya, masa penuh suram telah menggeluti peradilan Indonesia, keadilan yang diharapkan rakyat justru berbalik menjadi ketidakadilan. Kasus Kedungombo di Jawa Tengah, Kasus Tanah Adat Hebe-Ohee di Irian Jaya, Kasus Gandhi Memorial School di Jakarta serta berbagai kasus lain menjadi barometer runtuh dan bobroknya peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan.

Menurutnya, bagi sebagian praktisi hukum dugaan adanya kolusi bahkan korupsi di lingkungan pengadilan bukanlah suatu yang aneh atau mengejutkan. Sudah tidak menjadi rahasia di kalangan pengacara bahwa mereka tidak boleh bergantung pada argumentasi-argumentasi yuridis semata untuk memenangkan perkara yang mereka tangani di pengadilan. Pendekatan-pendekatan non-yuridis sangat diperlukan, bahkan tidak jarang lebih menentukan dari faktor-faktor yuridis. Tuduhan adanya mafia peradilan yang dikemukakan oleh seorang mantan hakim agung beberapa tahun lalu merupakan indikasi bagaimana mengkhawatirkannya tingkat kolusi di lingkungan peradilan Indonesia. Tidak berhasilnya Ketua Mahkamah Agung Soerjono meredakan dugaan adanya kolusi di Mahkamah Agung

yag digulirkan Adi Andoyo menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya sama sekali pada temuan Korwasus. Ketidakpercayaan tersebut disebabkan oleh karena tidak baiknya citra lembaga peradilan mulai dari tingkat bawah sampai yang tertinggi.¹⁸⁶⁾

Gambaran yang lebih transparan dan detail tentang cara kerja dari perilaku hakim terungkap dalam pengakuan para pencari keadilan seperti di muat di Harian Kompas sebagai berikut :

Tiga pria yang semuanya berwajah cukup ganteng, menuturkan bahwa mereka didakwa melakukan perbuatan korupsi untuk suatu perkara yang bukan mutlak kesalahan mereka. Ketika perkara dibawa ke Kejaksaan mereka diperiksa tim penyidik yang galaknya luar biasa. Mereka ditahan dan menjadi bahan cemoohan masyarakat dan pers.

Setelah tiga minggu disidik, sudah ada jaksa yang menghubungi mereka. Transaksi pun dilakukan, mereka tidak lagi dibentak-bentak. Ketika perkaranya di bawa ke Pengadilan, segalanya berjalan lancar. Saat jaksa penuntut umum hendak membacakan tuntutan, mereka ditanya oleh jaksa, bagaimana ? tidak apa-apa kalau saya tuntutan sekian tahun?.

186) Ign.Ridwan Widyadharma, Menata Peradilan Indonesia (Semarang, 1996) hal.5-6.

Pertanyaan cuma itu, tutur seorang dari tiga terdakwa, Achmad (bukan nama sebenarnya), sambil tertawa, tetapi dia langsung paham apa yang dimaksudkan, dan menawarkan sekian ratus juta rupiah. Pak Jaksa setuju, dan dia tidak jadi dituntut berat. Sekarang tinggal hakimnya saja. Dia dan pengacaranya mendekati hakim. Tetapi, hakimnya jual mahal, membentak-bentak dan bahkan mengusir. Katanya, berani benar mereka mencoba menyuap hakim Indonsia.

Tahu jawaban hakim seperti itu, Achmad dan Pengacaranya akhirnya bersikap diam saja. Achmad yang merasa yakin tidak bersalah pasrah saja apa pun putusan hakim. Akan tetapi, dua hari sebelum palu vonis dijatuhkan, ketika ia sedang tiduran di LP Cipinang, datanglah utusan hakim yang sepekan sebelumnya membentak-bentak dan mengusirnya. Si utusan yang pakai suara bisik-bisik menuturkan, hakim akan menjatuhkan vonis sekian tahun, kalau ia bisa memberi Rp.2 milyar. Dan, harus dalam bentuk tunai dan diserahkan dalam 24 jam kemudian. Keesokan harinya seluruh uang kontan Rp.2 milyar itu dia diperoleh. Semuanya dikemas rapi dalam beberapa koper. Utusan hakim datang mengambil uang itu,

tanpa pakai uang tanda terima. Dia pasrah saja, untungnya si hakim itu menepati janji.¹⁸⁷⁾

Demikianlah perilaku menyimpang dari hakim dan penegak hukum lainnya ternyata sudah sedemikian meluas. Hal tersebut bahkan seolah-olah telah menjadi bagian dari sitem penegakan hukum dan mempunyai mekanisme sendiri. **Al.Wisnubroto** mengungkapkan bagaimana mekanisme suap-menyuap dan perilaku menyimpang para penegak hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Di dalam uraiannya disebutkan, pintu terakhir dari proses peradilan pidana adalah pengadilan. Lembaga yang disebut terakhir ini merupakan harapan terakhir dari para pencari keadilan, oleh sebab itu oleh sebagian besar masyarakat pengadilan merupakan tempat yang sakral termasuk juga para aparat yang berada didalamnya. Sebutan sakral bagi lembaga peradilan tersebut tidaklah berlebihan, sebab ditempat ini semestinya kebenaran akan terungkap, hukum berlaku pasti tanpa hambatan, ada prosedur, dan keadilan akan ditegakkan. Namun celakanya kolusi peradilan juga sampai ke lembaga sakral ini. Kolusi tersebut tidak hanya dilakukan oleh oknum hakim, tetapi bisa juga dilakukan oleh oknum panitera, baik sendiri-sendiri ataupun dengan bekerja sama, bahkan

187) Berita Hukum dalam KOMPAS, 3 September 2000, hal. 11.

dimungkinkan adanya kerja sama dengan aparat di luar pengadilan seperti jaksa penuntut umum. Pihak yang paling mudah didekati adalah oknum panitera. Jika imbalan telah disepakati, maka panitera akan melakukan aksinya dengan cara sesuai dengan kewenangannya, misalnya mengusahakan memilih hakim yang lunak atau hakim yang bisa dipengaruhi.¹⁸⁸⁾

Pertanyaannya sekarang adalah apakah munculnya tuntutan reformasi hukum dalam penegakan hukum pidana telah pula membawa perubahan dalam kinerja lembaga peradilan, khususnya para hakim. Seperti telah diketahui selama rezim orde baru berkuasa lembaga peradilan khususnya hakim terlalu sering untuk diintervensi dan menjadi alat kepentingan penguasa orde baru. Demikian juga virus korupsi, kolusi dan nepotisme yang melekat pada rezim orde baru menghinggapi pula lembaga peradilan. Hingga sering terdengar dengan adanya istilah kolusi, mafia peradilan, dan sebagainya.

Akan tetapi sungguh disayangkan, momentum reformasi di segala bidang belum menyentuh lembaga peradilan. Sistem dan kinerja lembaga peradilan kita belum beranjak untuk berubah. Survei yang dilakukan oleh ICW terhadap 103 pihak yang pernah berperkara di Mahkamah Agung

188) Al.Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, (Yogyakarta, 1997), hal.53-54.

menunjuk ke satu arah. Mahkamah Agung, yang mestinya menjadi pengawas terdepan bagi setiap praktek kotor ala mafia peradilan, kini justru berkubang di dalamnya. Mayoritas responden mengaku pernah didatangi calo, mulai dari panitera sampai orang suruhan hakim agung dan pernah membayar sejumlah upeti. Penelitian tersebut juga mengungkap berbagai modus praktek mafia peradilan seperti terungkap dalam praktek jual beli vonis, pengaturan majelis hakim sampai keterlibatan sejumlah calo perkara dari kalangan anak petinggi Mahkamah Agung.¹⁸⁹⁾

Dengan melihat kinerja lembaga peradilan tersebut, Bambang Widjojanto menandaskan, bahwa era yang disebut reformasi sebenarnya bersifat transisional, akan tetapi situasi transisi justru dipenuhi dengan ketidakjelasan. Sebagian tidak hanya absurd tapi juga paradoks, ada ambiguitas dan kontradiksi. Hal tersebut karena perilaku penegak hukum yang menginjak-injak hukum itu sendiri.¹⁹⁰⁾

Selain itu meskipun apresiasi penegakan hukum pidana secara positif sudah mulai muncul ketika beberapa kasus pidana yang melibatkan "orang-orang penting" digelar dipersidangan, akan tetapi penilaian masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan i.c. putusan hakim

189) Liputan khusus dalam KOMPAS, 27 Maret 2000, hal.23.

190) Bambang Widjojanto, "Paradoks Penegakan Hukum di Indonesia", Jawa Pos, 2 Oktober 2000, hal.4.

misalnya vonis bebas yang dijatuhkan membuat masyarakat kecewa. Hanya 22 % yang menilai adil, dan 56 % menilai tidak adil. Selain vonis itu terlalu jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut 10 tahun penjara, vonis bersalah hanya dijatuhkan kepada pelaku pejabat sipil seperti mantan Gubernur Timor-Timur Abilio Jose Osario Soares. Uniknya, tatkala kekuatan atau intervensi asing mulai berbicara maka kembali independensi hukum tampak rapuh. Dalam contoh kasus Asuransi Manulife, misalnya dengan cepat dapat terkoreksi dan diikuti oleh pemeriksaan terhadap para hakim yang tersangkut. Memang, koreksi yang terjadi semakin memperkuat kebenaran dari kasus tersebut. Namun, semua itu terjadi tidak lepas dari intervensi pihak luar. Terhadap persoalan ini, semakin nyata tampak bahwa wibawa hukum di negeri ini teramat jauh dari yang seharusnya dimiliki.¹⁹²⁾

Rapuhnya kualitas penegakan hukum tidak terlepas dari kualitas aparat hukum itu sendiri. Meskipun gerakan reformasi telah berjalan cukup lama, akan tetapi upaya untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan masih jauh dari harapan. Melihat kenyataan citra aparat penegak hukum yang demikian buruk ini, harapan masyarakat untuk

192) Ibid.

misalnya vonis bebas yang dijatuhkan membuat masyarakat kecewa. Hanya 22 % yang menilai adil, dan 56 % menilai tidak adil. Selain vonis itu terlalu jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut 10 tahun penjara, vonis bersalah hanya dijatuhkan kepada pelaku pejabat sipil seperti mantan Gubernur Timor-Timur Abilio Jose Osario Soares. Uniknya, tatkala kekuatan atau intervensi asing mulai berbicara maka kembali independensi hukum tampak rapuh. Dalam contoh kasus Asuransi Manulife, misalnya dengan cepat dapat terkoreksi dan diikuti oleh pemeriksaan terhadap para hakim yang tersangkut. Memang, koreksi yang terjadi semakin memperkuat kebenaran dari kasus tersebut. Namun, semua itu terjadi tidak lepas dari intervensi pihak luar. Terhadap persoalan ini, semakin nyata tampak bahwa wibawa hukum di negeri ini teramat jauh dari yang seharusnya dimiliki.¹⁹²⁾

Rapuhnya kualitas penegakan hukum tidak terlepas dari kualitas aparat hukum itu sendiri. Meskipun gerakan reformasi telah berjalan cukup lama, akan tetapi upaya untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan masih jauh dari harapan. Melihat kenyataan citra aparat penegak hukum yang demikian buruk ini, harapan masyarakat untuk

192) Ibid.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pemaparan yang dilakukan dan setelah melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi para hakim sebagian cukup responsif dengan adanya tuntutan reformasi hukum pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Pandangan dan sikap hakim pada umumnya berpendirian bahwa tuntutan reformasi hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu faktor non hukum yang dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut karena dalam memberikan suatu pertimbangan hukum, hakim harus memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan perkara termasuk didalamnya kondisi sosial masyarakat. Hal tersebut agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Tuntutan reformasi hukum pidana ternyata telah menjadi satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan hukum untuk kasus konkret. Apa yang tertulis dalam peraturan hukum tidak secara konkrue diterapkan dalam kasus secara konkret. Ada beberapa perkara yang diputus oleh hakim, dimana dalam pertimbangan hukumnya di

nyatakan bahwa yang menjadi titik sentral bukan undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah atau problem sosial yang harus diselesaikan.

Akan tetapi pandangan mengenai tuntutan reformasi hukum pidana yang demikian tidak dipunyai oleh semua hakim. Masih ada sebagian hakim yang belum bersikap responsif terhadap perubahan keadaan karena masih terlalu dicekam oleh pemikiran yang mengutamakan hukum positif. Bahkan bagi hakim yang moralitasnya jelek, adanya tuntutan reformasi hukum pidana justru semakin mendorong dan membuka peluang baginya untuk berperilaku tidak terpuji. Hal tersebut terbukti dari semakin banyaknya suap dan penyimpangan yang melibatkan oknum hakim. Bahkan lebih parah lagi, adanya tuntutan reformasi hukum pidana justru sering dijadikan alasan atau pembenar bagi hakim nakal yang hendak mencari keuntungan sendiri.

3. Kemandekan penegakan hukum (pidana) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (a) Tidak jelasnya plan action pemerintah terhadap penegakan hukum; (b) Inisiatif penegakan hukum oleh Mahkamah Agung masih parsial; (c) Lemahnya fungsi pengawasan dan tidak berfungsinya manajemen penegakan hukum; (d) Tidak jelasnya simpul koordinasi penegakan hukum; (e) Pemberantasan KKN di

lembaga penegak hukum belum menjadi prioritas utama;
(f) Belum adanya reformasi komitmen antara penegak hukum; (g) Dan terakhir budaya hukum masyarakat.

B. S A R A N

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sesuai dengan kaitan dengan persoalan yang dibahas dalam tulisan ini, adalah :

1. Hasil penelitian telah menunjukkan adanya hakim-hakim yang belum bersikap responsif terhadap keadaan masyarakatnya karena masih terlalu dicekam oleh pemikiran yang mengutamakan hukum positif. Mereka cenderung bersikap "demi amannya" berpegang secara kaku pada pendekatan normatif. Hal tersebut disebabkan karena latar belakang pendidikan hukum para hakim. Kurikulum pendidikan hukum di Indonesia lebih menitik beratkan pada penguasaan hukum positif sedangkan materi yang berkaitan dengan ilmu hukum yang sosiologis sedikit sekali.¹⁹³⁾ Untuk itu kepada para hakim kiranya perlu diperkaya wawasannya dengan pandangan-pandangan yang bersifat sosiologis tentang hukum. Hal tersebut akan membantu hakim untuk dapat menggali dan memahami kondisi masyarakatnya. Langkah ini bisa dilaksanakan melalui

193) Al Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Kajian*, Yogyakarta, 1997, hal.75-76.

pendidikan, penataran, kursus di kalangan hakim, atau juga melalui media informasi hakim yaitu majalah varia peradilan dan jurnal Pusdiklat Mahkamah Agung (Media Komunikasi dan Informasi Diklat).

2. Berkaitan dengan perilaku dan kinerja hakim yang masih banyak menjadi sorotan, kiranya elemen kontrol sosial ini dapat diajukan sebagai suatu alternatif untuk memaksa lembaga peradilan dan hakim-hakimnya untuk memperbaiki kinerjanya. Para hakim dan aparat hukum lainnya akan bekerja dengan hati-hati manakala perkara yang ditanganinya merupakan perkara yang mendapat sorotan publik. Kontrol sosial tersebut dapat dilakukan oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara perseorangan.
3. Peningkatan profesionalisme hakim yang dimulai dari rekrutmen calon hakim secara terbuka, mutasi dan promosi serta sistem karier yang tidak didasarkan pada senioritas tetapi pada prestasi. Prestasi hakim dapat dinilai dari putusannya melalui examinasi dan anotasi, untuk lebih *fair* maka examinasi dan anotasi dinilai dari pertimbangan masing-masing hakim dengan cara *descenting opinion*. Disamping itu perlunya keamanan dan peningkatan kesejahteraan hakim termasuk juga sarana dan prasana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Mila Karmila, *Hakim Sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatisme Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia dalam Mengambil Keputusan*, Jurnal Hukum UIL, No.16 Vol.6, April, 1999.
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1978.
- Ali, Achmad, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Penerbit UNHAS, Ujung Pandang, 1988.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.
- *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP Semarang, 1996.
- *Kebijakan Pengembangan Peradilan*, Seminar Nasional "Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 6 Maret 1999.
- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- *Reformasi Hukum, HAM dan Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Aubert, Vilhelm, *Sociology of Law*, Middlesex : Penguin Books, 1973.
- Blumberg, Abraham S, *Criminal Justice*, Published by Burns and MacEachern Ltd., Toronto, 1970.
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, Published by Academic Press, Inc., London, 1976.

- B. Miles, Matthew, dan Huberman. A. Michael, *Analisa Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, terjemahan Rohidi, Tjejep Rohendi, Penerbit UI Press, Jakarta, 1992.
- Berman, Horald J, *Ceramah-Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat*, Penerbit PT. Tata Nusa, 1996
- Biran, Zainoel B, *Bahan Pelengkap Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan/OPPEK*, 1996.
- Blau, Peter M & Meyer, Marshall W, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta, 1987.
- Dworkin, Ronald, *Law's Empire*, Published by Fontana Press, London, 1986.
- Faisal Sanapiah, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Russel. Sage Foundation, New York, 1975.
- *Legal Culture & Welfare State*, Dillemas Of Law in The Welfare State, Ed.Gunther Teubner, New York, 1986.
- *On Legal Development*, Rutgers Law Review, 1969.
- Gandasubrata, Poerwoto, Pidato pada Mukernas IKAHI, Bandung 18-20 April 1994, dalam Bismar Siregar, *Hakim-Akulah Hakim yang Didambakan Mampu Menegakkan Keadilan*, Jakarta, 1994.
- *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998.
- Gerungan, WA, *Psikologi Sosial*, Penerbit PT. Eresco, Cetakan III, Jakarta, 1972.
- Gibson, Ivancevich, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987.
- Gurvitch, Georges, *Sosiologi Hukum*, Bhatara, Jakarta, 1963.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Harahap, Panusunan, *Bobot Seorang Hakim Lebih Ditentukan Oleh Keputusannya*, Majalah Varia Peradilan Tahun II No.19, April, 1987.

- Hadhyono. Suparti, *Pertanggungjawaban Hakim dalam Putusan Perkara*, Majalah Varia Peradilan Tahun III No.33, Juni, 1988.
- Hariandja, Denny B, *Birokrasi Nan Pangah, Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Hartono, Sunaryati, *Apakah The Rule Of Law itu ?*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Hammer, W. Clay, dan Orgen, Dennis W, *An Applied Psychological Approach*, Business Publication, Inc. Dallas, 1978.
- Hennesy, Bernard, *Pendapat Umum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1989.
- Himawan, Charles, Kasus Suap di Lembaga Peradilan Makin Dahsyat, Kompas, 3 September 2000.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Hunt, Alan, *The Sociological Movement in Law*, London; Billing and Sons, 1978.
- Indrajaya, Adam, *Perilaku Organisasi*, Penerbit Sinar Baru, Tanpa Tahun.
- Irwan, Alexander, dan Edriana, *Pemilu Pelanggaran Asas LUBER; Hegemoni tak Sampai*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Kairys, David, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, New York : Pantheon Books, 1982.
- Kamus Besar Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Lev, Daniel S, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, Hukum dan Perkembangan Sosial* : Buku Teks Sosiologi Hukum eds. A.A.G. Peters & Koesriani Siswosoebroto, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Lotulung, Paulus Effendi, *Kemandirian dan Independensi Peradilan*, Seminar Nasional "Reformasi Sistem Peradilan", Semarang, 6 Maret 1999.
- M, Darmansyah, *Pemuda dan Sosialisasi, dalam Ilmu Sosial* (Kumpulan Essai), Penerbit Usaha Nasional, Jakarta, 1984.
- Majalah Ilmiah, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, Edisi II Juli-September, 1998.
- Majalah Varia Peradilan*. No.24, tahun XI, Januari 1996.

Manan, Bagir, *Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum*, Makalah "Pelatihan Teknis Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara", Jakarta 4 Juni 2001.

----- *Sekilas Info*, dalam Buku Jurnal Pusdiklat MARI, Volume I, No.3, 2002.

Marbun, S.F, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum UII, No.9, Vol.6, 1997.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1977.

----- *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Muladi & Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995

Muis, A, *Fenomena Baru Usia 53 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*, Artikel dalam Kompas, 19 Agustus 1998.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mulyana, Deddy, *Drama Soeharto*, dalam Kompas, 14 Oktober 2000.

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, 1992.

Nitibaskara, Ronny Tb, *Judicial Crime*, dalam Kompas, 29 Maret 2000.

----- *Super White Collar Crime*, dalam Kompas, 1 Oktober 2002.

Nonet, Philippe, Selznick, Philip, *Law and Society in Transition*, Harper Colophon Books, New York, Hagerstown, San Francisco, London, 1978.

Panggabean, Henry P, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Pariaman, H.Hasan Basri Saamin Dt. T, *Psikiater dan Pengadilan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Peter, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Peter, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001.
- Purwantari, B.I, *Institusi Hukum Tetap Rapuh*, Kompas, 11 Desember 2001.
- Plano, Jack, *Kamus Analisa Politik*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum*, Seminar Nasional "Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi", Semarang 22 Juli 2000.
- *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural*, Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 27 Juli 2000.
- *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.
- *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- *Masalah Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Kompas, 2 dan 25 Mei 2000
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Rouclck, J.S, *Pengendalian Sosial*, Disadur : Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
- Ritzer, Gerooge, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Saleh, H. Roeslan, *Pembinaan Cita Hukum dan Azas-Azas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, 1996.

Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Savalastoga, Karl, *Deferensiasi Social*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

----- *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

Souyal, Sam S, *Ethics in Criminal Justice, In Search of the Truth*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1994.

Susanto, I.S, *Mencari Format Penegakan Hukum di Era Reformasi*, Diskusi Interaktif "Mencari Format Upaya Penegakan Hukum di Masyarakat", LIKH Jateng, Semarang, 29 Maret 2001.

----- *Kejahatan Korporasi Di Indonedia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan "Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum", Fak.Hukum UNDIP, Semarang, 12 Oktober 1999.

----- *Menciptakan Lingkungan Hidup yang Nyaman*, Pidato " Dies Natalis UNDIP ke-40", Semarang 15 Oktober 1997.

----- *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, dalam Majalah "Masalah-Masalah Hukum" No.9, 1992.

----- *Mengembangkan Sistem Hukum yang Berpijak pada Rakyat Banyak*, Seminar Nasional "Paradigma Ilmu Hukum dalam Memasuki Milenium Ketiga", Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 18 Nopember 2000.

Suryo, Djoko, *Feodalisme, Timur dan Barat*, 1991, LP3FS, Jakarta, 1991.

Siregar, Bismar. *Mahkota Seorang Hakim ialah Putusannya*, Majalah Varia Peradilan, Tahun VIII, No.93, Juni 1993.

----- *Hakim Wajib Menafsirkan Undang-Undang*, Majalah Varia Peradilan, Tahun X, No.120, September 1995.

----- *Rasa Keadilan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1996.

Soejipto, Adi Andoyo, *Aliran Baru Mengenai Tugas Hakim Menemukan Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1996.

----- *Penyidik Dalam Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Perlukah Diadakan Pembedaan Yang Ketat Dalam Rangka Sahnya Putusan*, Majalah Varia Peradilan No.108, Tahun IX, September 1994.

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soeparman, Parman, *Pengembangan dan Pembinaan Badan Peradilan Dalam Meningkatkan Citra dan Wibawa Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*, Seminar Nasional "Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang, 6 Maret 1999.
- Turner, Jonathan H, *The Structure of Sociological Theory*, Illionis, 1974.
- Wahyusumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1987.
- Warassih, Esmi, "*Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*", *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Ed.Satjipto Rahardjo, Bandung, 1981.
- Widjojanto, Bambang, *Paradoks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jawa Pos, 2 Oktober 2000.
- Widyadharma, Ign.Ridwan, *Menata Peradilan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah "Seminar Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum", Bandung-Ambarawa, 5-8 Desember 1994.
- Wisnobroto, Al, *Hakim dan Peradilan di Indonessa dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 *tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang No.35 Tahun 1999 *tentang perubahan UU No.14 Tahun 1970.*

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 *tentang Mahkamah Agung.*

Surat Kabar

Surat Kabar Kompas, tanggal 27 Maret 2000.

Surat Kabar Kompas, tanggal 3 September 2000.

Surat Kabar Kompas, tanggal 11 Desember 2001.

Surat Kabar Kompas, tanggal 9 September 2002.

Surat Kabar Suara Merdeka, tanggal 6 Oktober 2000.

Widjojanto, Bambang, *Paradoks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jawa Pos, 2 Oktober 2000.

Widyadharma, Ign.Ridwan, *Menata Peradilan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah "Seminar Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum", Bandung-Ambarawa, 5-8 Desember 1994.

Wisnobroto, Al, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997.